



AKTIVITAS GERWANI
DI KOTA SEMARANG TAHUN 1950-1965

Skripsi
Diajukan untuk menempuh ujian Sarjana
Program Strata 1 dalam Ilmu Sejarah

Disusun oleh:

Risdha Nugroho Budiyanto
NIM A2C002159

FAKULTAS ILMU BUDAYA UNIVERSITAS DIPONEGORO

SEMARANG

2009

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto :

"Let the ruling classes tremble at a Communist Revolution.

The proletarians have nothing to lose but their chains.

Working men of all countries, unite!"

(Biarkan para penguasa gemetar saat terjadi revolusi komunis. Kaum proletar tidak akan kehilangan kekuatannya. Kaum pekerja di seluruh dunia, bersatulah!)

(Karl Marx, 5 Mei 1818-14 Maret 1883)

Dipersembahkan kepada:

Ibundaku, keluarga, sahabat, dan

semua orang yang telah mengisi hari-hariku.

Disetujui oleh:
Dosen Pembimbing,

Dr. Yetty Rochwulaningsih, M. Si.
NIP 131629779

Diterima dan disahkan oleh

Panitia Ujian Skripsi Program Strata 1

Jurusan Sejarah Fakultas Ilmu Budaya

Universitas Diponegoro

Pada hari : Senin

Tanggal : 31 Agustus 2009

Ketua,

Anggota I,

Dr. Dewi Yuliati, MA.

Dr. Yetty Rochwulaningsih, M. Si.

NIP. 131629778

NIP. 131629779

Anggota II,

Anggota III,

Drs. Indriyanto, S.H., M. Hum.

Dra. Sri Indrahti, M. Hum.

NIP. 131875484

NIP. 131954780

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga pada akhirnya penulisan skripsi yang berjudul: *Partisipasi Politik Gerwani di Kota Semarang tahun 1950-1965* ini dapat diselesaikan. Penulis sangat bersyukur karena mendapat dukungan dan dorongan yang tidak henti-hentinya diberikan oleh berbagai pihak selama ini. Motivasi-motivasi yang diberikan kepada penulis sangat membantu moral sehingga memberikan semangat dan kekuatan bagi penulis untuk segera menyelesaikannya, walaupun melalui proses yang tersendat-sendat, mulai dari proses pengumpulan data sampai pada akhir penulisan.

Pertama kali penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada Prof. Dr. Nurdien H. Kistanto, M. A. selaku Dekan Fakultas Ilmu Budaya Undip dan Dr. Dewi Yuliati, M. A. selaku Ketua Jurusan Sejarah Fakultas Ilmu Budaya, yang memberikan kemudahan dalam penulisan skripsi ini. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada DR. Yetty Rochwulaningsih M. Si, selaku dosen pembimbing yang dengan sabar memberikan perhatian serta gagasan dan bimbingannya dalam penyelesaian skripsi ini, kepada Drs. Dhanang Respati Puguh M. Hum selaku dosen wali, yang sabar memperhatikan perkembangan kemajuan akademik saya, kepada Drs. Indriyanto, S.H., M. Hum yang membantu dengan sabar demi sempurnanya revisi skripsi saya, dan seluruh staf pengajar Jurusan Sejarah Fakultas Ilmu Budaya Undip.

Terima kasih kepada staf pengelola Arsip Nasional Republik Indonesia, Perpustakaan Nasional, Perpustakaan Jurusan Sejarah Fakultas Ilmu Budaya

Undip, dan berbagai instansi yang telah memberikan fasilitas sehingga dapat membantu penulis dalam mendapatkan sumber-sumber yang sangat diperlukan untuk menyusun skripsi ini. Kepada tokoh-tokoh yang terlibat ataupun yang menjadi saksi langsung dalam pergerakan Gerwani, Ibu Heryani Busono, Ibu Tumini Khadim, Ibu Sumini, Ibu Endang Mardiningsih, Ibu Indarsih, Ibu Rondiah, Ibu Warsono, dan Bapak Sumaun Utomo, terima kasih atas waktu dan kesediaannya untuk penulis wawancara, tanpa sumber-sumber ini penulis tidak bisa menyelesaikan penelitian ini.

Ucapan terima kasih yang dalam kepada Ibundaku tercinta yang dengan kesabarannya telah memberikan kasih sayang, dorongan, dan kepercayaan kepada penulis selama ini. Kepada Bapak dan adik-adikku R Deva A, R Devi A, Ratih AA, yang penulis sayangi dan banggakan, semoga kita bisa bersatu kembali. Kepada Ibu Aminah, Ibu Ngatini, dan ibu dari sahabat-sahabatku, terima kasih atas bantuan dan dorongan dalam memacu semangat penulis. Selain itu, ucapan terima kasih juga saya haturkan kepada kawan-kawan seperjuangan di Jurusan Sejarah angkatan 2002, Ady Entit, Danni Dean Ali dan Ria, Umawan, Nanda dan Lila, Syuhada dan Ajeng, Adi Ho' dan Rina, Adi Karyo, Devi Budjana dan Vika, Sidik Roronoa, Agus dan Vita, Sigit Doni, Andi, Kholid, Wahyu Coro Maningrat, Diajeng, Desy, Hary, Fanny, Prihadi, Dedy dan Nike, Dinda dan Bowo, Oli Leemathers, Wina, Endah, Leli, Mawar, Ika, dan Ning. Terima kasih juga buat Fachrudin Syam (almarhum), Kang Johan, Kang Kustam, Mas Bram, Mas Bekso, Uung, Bung Aryono dan Mbak Ita, Purwo Ompong dan Visi, Athourrouf dan

Ayu, Indra dan Ika, Sukoco Gumoong dan kawan-kawan kampung Ngembak, terima kasih atas dorongan dan motivasinya.

Untuk kawan-kawan Jurusan Sejarah angkatan 2003 sampai dengan 2008, terima kasih atas dukungan semangat dan motivasinya. Kepada kawan Tria Jambi, Krisno Barep, Deni Jak Mania, Uli Aurelia, Petra Petruk, Haryono Chiklet, Ronaldo, teruskan perjuangan kalian. Tak terlupakan kepada Mas Woto Kantin, Mas Sugeng, Mas Ndori, Mas Komsin, Bu Ut, Bu Ning, Mbak Putu, Mas Bayu, dan semua personel Tata Usaha dari Jurusan Sejarah, terima kasih atas fasilitas dan kemudahan yang diberikan pada penulis. Kepada kawan-kawan kampung Boto, Mas Koprak, Gendut, Penyok, Konde, Gundul, No Lholhok, Plengeh, Boyo, Mas Balung, Mas Wawe, Mas Kis, Mas Kadi, Lek Didik, Dik Anang, Mas Yudhi, Bidin, Takim, dan lain-lain, terima kasih atas hari-hari yang ceria dan selalu menghibur penulis dikala penat. Kepada semua kalangan yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, terima kasih sebanyak-banyaknya.

Semoga skripsi ini dapat berguna bagi kawan-kawan aktivis pergerakan khususnya dan masyarakat awam yang tertarik dan peduli pada perkembangan gerakan wanita di Indonesia. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kepentingan ilmu pengetahuan. Skripsi ini mempunyai banyak kekurangan baik dalam hal tata tulis maupun isinya, sehingga kritik dan saran dari pembaca sangat penulis harapkan. Akhirnya, penulis ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya dan selamat membaca.

Semarang, 11 Agustus 2009

Risdha Nugroho Budiyanto

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	ii
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR SINGKATAN.....	xi
DAFTAR ISTILAH.....	xv
DAFTAR TABEL.....	xix
DAFTAR LAMPIRAN.....	xx
INTISARI.....	xxi
 BAB I. PENDAHULUAN.....	 1
A. Latar belakang dan Permasalahan.....	1
B. Ruang Lingkup.....	8
C. Tinjauan Pustaka.....	10
D. Kerangka Teoretis dan Pendekatan.....	13
E. Metode Penelitian dan Penggunaan Sumber.....	14
F. Sistematika Penulisan.....	16
 BAB II. GAMBARAN UMUM KOTA SEMARANG TAHUN 1950 – 1955.....	 18
A. Keadaan Wilayah.....	18
1. Keadaan Geografi.....	18
2. Keadaan Demografi.....	21
B. Keadaan Sosial Ekonomi.....	22
C. Keadaan Sosial Budaya.....	27
D. Keadaan Sosial Politik.....	34
 BAB III. GERWANI SEBAGAI ORGANISASI SOSIAL POLITIK DI INDONESIA.....	 42
A. Perkembangan Pergerakan Wanita di Indonesia.....	42
1. Periode Kolonial: Dari Sosial Budaya Menuju Politik.....	43
2. Kongres Perempuan Indonesia.....	50

3. Setelah proklamasi (1946) sampai tahun 1950.....	56
B. Kelahiran Gerwani dalam Pergulatan dengan Ideologi Komunis.....	61
1. Berdirinya Gerwis.....	62
2. Metamorfosa Gerwis menjadi Gerwani: Kongres-kongres Gerwani.....	64
a. Kongres pertama tahun 1951.....	64
b. Kongres kedua tahun 1954.....	67
c. Menuju Kongres Konsolidasi tahun 1954-1957.....	70
d. Kongres ketiga tahun 1957.....	74
e. Kongres keempat tahun 1961.....	75
C. Afiliasi Gerwani dengan PKI.....	80
 BAB IV AKTIVITAS GERWANI DI KOTA SEMARANG TAHUN 1950-1965.....	 85
A. Aktivitas Sosial Politik.....	86
B. Aktivitas Sosial Ekonomi.....	87
C. Aktivitas Sosial Budaya.....	90
D. Gerwani dalam Periode Menjelang G30S 1965.....	92
E. Penghancuran PKI dan Berakhirnya Gerwani di Semarang Pasca Peristiwa G30S.....	96
 BAB V. SIMPULAN.....	 108
 DAFTAR PUSTAKA.....	 111
 DAFTAR INFORMAN.....	 115
 LAMPIRAN.....	 125

DAFTAR SINGKATAN

ABRI	: Angkatan Bersenjata Republik Indonesia
AD	: Angkatan Darat
AK	: Api Kartini
AL	: Angkatan Laut
AURI	: Angkatan Udara Republik Indonesia
BTI	: Barisan Tani Indonesia
CGMI	: Central Gerakan Mahasiswa Indonesia
DI	: Darul Islam
DPC	: Dewan Pimpinan Cabang
DPAC	: Dewan Pimpinan Anak Cabang
DPD	: Dewan Pimpinan Daerah
DPR	: Dewan Perwakilan Rakyat
DPP	: Dewan Pimpinan Pusat
DPR	: Dewan Pimpinan Ranting
DPPP	: Dewan Pimpinan Pusat Pleno
DPPH	: Dewan Pimpinan Pengurus Harian
DPRD	: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
DPR-GR	: Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong
Dwikora	: Dwi Komando Rakyat
FN	: Front Nasional
Gerindo	: Gerakan Rakyat Indonesia

Gerwani	: Gerakan Wanita Indonesia
Gerwis	: Gerakan Wanita Indonesia Sedar
GOW	: Gabungan Organisasi Wanita
GWS	: Gerakan Wanita Sosialis
G 30 S	: Gerakan 30 September
Gestok	: Gerakan Satu Oktober
GWDS	: Gerakan Wanita Demokratis Sedunia
IBKA	: Istri Buruh Kereta Api
JIBDA	: Jong Islamitien Bond Dames
Kabir	: Kapitalis Birokrat
KNIP	: Komite Nasional Indonesia Pusat
KOWANI	: Kongres Wanita Indonesia
Lekra	: Lembaga Kebudayaan Rakyat
Manipol	: Manifesto Politik
Masyumi	: Majelis Syuro Muslimin Indonesia
MPR	: Majelis Permusyawaratan Rakyat
MPRS	: Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara
Nasakom	: Nasionalis, Agama, Komunis
NU	: Nahdatul Ulama
NVB	: Nederlands Vrouwen Beweging
OKB	: Orang Kaya Baru
Parkindo	: Partai Katolik Indonesia
Partindo	: Partai Indonesia

PETA	: Pembela Tanah Air
Perwin	: Persatuan Wanita Indonesia dari Manado
Putra	: Pusat Tenaga Rakyat
PBB	: Perhimpunan Bangsa-Bangsa
PBH	: Pemberantasan Buta Huruf
PKI	: Partai Komunis Indonesia
PNI	: Partai Nasional Indonesia
PP	: Peraturan Pemerintah
PPI	: Pemuda Putri Indonesia
PPI	: Perikatan Perempoean Indonesia
PPII	: Persatuan Perkumpulan Istri Indonesia
PR	: Pemuda Rakyat
PRRI	: Persatuan Rakyat Republik Indonesia
PSI	: Partai Sosialis Indonesia
Putera	: Pusat Tenaga Rakyat
RT	: Rukun Tetangga
Rupindo	: Rukun Putri Indonesia
RUU	: Rancangan Undang-Undang
SDPP	: Sekretariat Dewan Pimpinan Pusat
SBSI	: Serikat Buruh Sejahtera Indonesia
SOBSI	: Sentral Organisasi Buruh Seluruh Indonesia
TII	: Tentara Islam Indonesia
TK	: Taman Kanak-kanak

TKR	: Tentara Keamanan Rakyat
TNI	: Tentara Nasional Indonesia
TP	: Tentara Pelajar
Trikora	: Tri Komando Rakyat
UU	: Undang-Undang
UUD	: Undang-Undang Dasar
UUDS	: Undang-Undang Dasar Sementara
VOC	: Vereenigde Oost-Indische Compagnie
Wankom	: Wanita Komunis

DAFTAR ISTILAH

Agitasi	: hasutan/mempengaruhi
Aisyah	: organisasi wanita Muhammadiyah
Aksi bongkok	: aksi yang dilakukan oleh kaum tani di Sragen, Jawa Tengah, terhadap kepala desa yang sewenang-wenang kepada warganya, diikat dan digotong rame-rame dibawa ke kantor kecamatan dan diserahkan kepada camat untuk diadili
aliran	: golongan atau orientasi sosio-kultural masyarakat Indonesia
ansor	: organisasi pemuda NU
<i>Api Kartini</i>	: majalah Gerwani
Arisan	: undian bergilir di kalangan ibu-ibu rumah tangga
Barisan Srikandi	: laskar wanita bentukan Jepang
Basis massa	: wilayah berkumpulnya pengikut-pengikut organisasi
Berita Gerwani	: nama majalah gerwani
Borjuis	: golongan bangsawan atau golongan orang kaya
Buta huruf	: tidak bisa menulis dan membaca

Bhayangkari	: organisasi istri-istri polisi
Darul Islam	: gerakan bersenjata yang memperjuangkan negara islam
Demokrasi Terpimpin	: corak demokrasi yang mengenal satu pemimpin menuju tujuan suatu masyarakat yang berkeadilan sosial
Diskriminasi	: perlakuan yang membedakan antara seseorang dengan orang lain
Feminisme	: gerakan wanita yang menuntut persamaan hak sepenuhnya antara wanita dan laki-laki
Feodalisme	: sistem sosial atau politik yang memberikan kekuasaan yang besar kepada golongan bangsawan
Fujinkai	: organisasi wanita yang dibentuk semasa dan oleh tentara pendudukan Jepang
Garwa padmi	: istri pertama dan sah raja Jawa
Garwa selir	: istri kedua raja dan pembesar Jawa
Golongan netral	: kelompok yang tidak memihak pada kekuatan apapun
Hegemoni	: Pengaruh kepemimpinan, dominasi, kelebihan kekuatan ekonomi, politik dan militer suatu negara terhadap negara lain dalam kawasan tertentu

Heiho	: pasukan cadangan Indonesia, bagian dari pasukan militer Jepang
Ibu	: emak, kata penghormat untuk wanita
Ibuisme	: suatu paham yang dibentuk pada masa orde baru, ditanamkan pada organisasi-organisasi wanita bahwa posisi para wanita berada di belakang suaminya
Ideologi	: paham, teori, dan tujuan yang merupakan satu program sosial politik
Interest gender	: ketertarikan terhadap persamaan hak
Kauman	: kampung tempat kediaman orang-orang Muslim keturunan Arab
Kodrat	: kekuasaan (Tuhan), hukum (alam), sifat asli, sifat bawaan
Konsolidasi	: memperkuat jaringan hubungan organisasi
Konstituante	: lembaga pembuat konstitusi
Konservatif	: mempertahankan kebiasaan/tradisi lama/kolot
Ladies women movement	: istilah yang diberikan Soekarno saat memberikan sambutan pada pembukaan Kongres IV Gerwani, yang berarti gerakan wanita jangan hanya bersifat “ndoro den ayu” atau bergerak pada kepentingan wanita saja

Land-reform	: semangat juang kaum buruh tani untuk merebut tanah dari tangan tuan tanah
Mobilisasi	: bergerak mengumpulkan massa
Monogami	: bentuk perkawinan antara seorang wanita dan seorang laki-laki saja dalam jangka waktu tertentu
Neokolonialisme	: paham penjajahan dalam bentuk baru
Organisasi sekawan	: memiliki kesamaan paham perjuangan dan saling mendukung dalam melakukan aksi-aksi bersama antara organisasi (dalam keluarga komunis)
Perjuangan heroik	: semangat perjuangan yang tinggi
Poligami	: seorang laki-laki memiliki dua istri atau lebih dari satu
Political move	: gerakan politik
Progresif	: semangat untuk melakukan perubahan atau kemajuan
Propaganda	: menyebarkan paham-paham tertentu untuk mencari pengikut
Putsch militer	: gerakan pemberontakan militer/kudeta
Radikal	: secara mendasar (sampai ke akar-akarnya), amat keras menuntut perubahan, maju dalam berpikir atau bertindak

Reform perkawinan	: mengubah peraturan perkawinan menjadi lebih baik
Rekonstruksi	: penyusunan kembali, membangun kembali
Revolusioner	: cenderung menghendaki perubahan secara menyeluruh dan mendasar
Revolusi	: perubahan ketatanegaraan (pemerintahan atau keadaan sosial) yang dilakukan dengan kekerasan (seperti dengan perlawanan bersenjata)
Rezim	: pemerintahan/penguasa
Ruangan Wanita	: rubrik untuk wanita dalam Harian Rakjat
Santri	: pemeluk Islam yang taat, yang belajar di pondok pesantren
Sarekat rakyat	: sayap “merah” dalam Sarekat Islam

DAFTAR TABEL

Tabel:

Halaman

1. Jenis dan Corak Pasar Tradisional di kota Semarang Tahun 1965.....	23
2. Macam-macam Gedung Kesenian.....	30
3. Hasil Pemungutan Suara Tahun 1955 Anggota DPR di Tiap-tiap Kecamatan Kota Semarang.....	37
4. Hasil Pemungutan Suara Tahun 1955 Konstituante di Tiap-tiap Kecamatan Kota Semarang.....	38
5. Perbandingan Hasil Pemungutan Suara Anggota DPR dengan Konstituante di Kota Semarang.....	38

DAFTAR LAMPIRAN

Tabel:

Halaman

A. Program Kerja Gerwani.....	117
B. Instruksi Presiden No. Inst-09/KOGAM/5/66 tentang penghapusan PKI dan ormas- ormasnya.....	123
C. Jumlah Kursi DPRD Peralihan Kota Semarang	128

INTISARI

Skripsi ini berjudul “*Aktivitas Gerwani di Kota Semarang tahun 1950-1965*”. Adapun permasalahan yang disajikan dalam skripsi ini adalah bagaimana latar historis pembentukan Gerwani di kota Semarang dan pihak-pihak yang berperan dalam pembentukan tersebut, kemudian partisipasi politik Gerwani di kota Semarang dan faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi politik tersebut, lalu bagaimana kehancuran Gerwani di kota Semarang tahun 1965.

Penulisan skripsi ini menggunakan metode sejarah kritis yang mencakup empat langkah yaitu pengumpulan sumber primer dan sekunder, kritik sumber yang terdiri dari kritik eksteren dan kritik interen agar sumber memiliki otentisitas dan kredibilitas. Interpretasi terhadap fakta yang ada dan terakhir penulisan kembali peristiwa sejarah secara diskriptif analitis. Pendekatan yang digunakan adalah sosiologi politik. Pengertian partisipasi politik adalah kegiatan seseorang atau sekelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, yaitu dengan jalan memilih pemimpin negara, dan secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kebijakan pemerintah (*public policy*). Gerwani sebagai sebuah organisasi wanita mempunyai karakter sebagai organisasi yang sadar politik dan ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik Indonesia.

Munculnya Gerwani bermula dari berkumpulnya enam organisasi wanita di Semarang pada 4 Juni 1950 untuk melebur organisasi mereka masing-masing ke dalam satu wadah tunggal, yaitu Gerwis. Gerwis mempunyai hasrat yang kuat demi perjuangan kemerdekaan nasional maupun mengakhiri berbagai politik feodalisme. Pada bulan Desember tahun 1951 nama Gerwis berubah menjadi Gerwani. Pada tahun 1964, Gerwani mulai merancang program-program kerja guna mengembangkan dirinya dan berpartisipasi dalam politik. Program-program itu meliputi: Hak-hak Wanita; Hak-hak Anak; Hak-hak Demokrasi; Kemerdekaan Nasional yang Penuh; dan Perdamaian.

Peristiwa G 30 S memberi implikasi terhadap kelangsungan hidup Gerwani. Bersamaan dengan operasi pembersihan besar-besaran yang dilakukan oleh tentara dan milisi sipil terhadap PKI dan ormas-ormasnya di seluruh penjuru Indonesia, maka berakhir pula segala aktivitas Gerwani. Di kota Semarang, Gerwani tidak luput dari pembersihan atau penghancuran yang dilakukan oleh tentara dan milisi sipil. Kebanyakan dari anggota Gerwani Semarang ditahan di penjara Plantungan hingga tahun 1978.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang dan Permasalahan

Keikutsertaan kaum wanita dalam semua aspek kehidupan suatu bangsa tidak dapat diabaikan. Disamping sebagai ibu dan isteri yang menjalankan peran domestik seputar urusan keluarga dan rumah tangga, kaum wanita sejalan dengan tuntutan zaman dan kondisi real lingkungan sekitarnya, juga dituntut berperan di sektor publik. Keikutsertaan kaum wanita Indonesia di sektor publik telah berlangsung lama sejak zaman pra kolonial yang antara lain ditandai oleh tampilnya beberapa tokoh wanita sebagai penguasa kerajaan baik di Jawa maupun luar Jawa. Demikian juga pada masa perang kemerdekaan Indonesia tahun 1945-1949, kaum wanita Indonesia secara langsung dan tidak langsung ikut berperan aktif di medan peperangan.¹

Keikutsertaan secara aktif kaum wanita dalam melawan kekuatan kolonial telah menonjol sejak abad 19. Hal itu antara lain dapat diketahui dari maraknya gerakan-gerakan perlawanan yang dipimpin oleh tokoh-tokoh wanita seperti Christina Martha Tiahahu dari Maluku pada tahun 1817-1819; Nyi Ageng Serang dari Jawa Tengah pada sekitar pertengahan abd XIX; Cut Nyak Dien dan Cut Meutia di dalam perang Aceh tahun 1873-1904; dan juga RA Kartini tahun 1879-

¹ Nana Nurliana, dkk, *Peranan Wanita Indonesia di Masa Perang Kemerdekaan 1945-1950* (Jakarta: Depdikbud Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional, 1986), hlm.1.

1904; Dewi Sartika 1884-1947; Maria Walenda Maramis tahun 1872-1924, Nyi Ahman Dahlan tahun 1872-1936, Rasuna Said 1901-1965.²

Jika dicermati sejarah gerakan kaum wanita dapat dikemukakan bahwa pada mulanya lebih tertuju pada bidang pendidikan. Hal ini tampaknya didasari oleh kesadaran bahwa pendidikan dapat membawa pengaruh yang besar pada perubahan dan kemajuan. Oleh karena itu bukanlah tanpa sebab jika tokoh-tokoh wanita yang terkemuka dalam masyarakat Indonesia pada mulanya bergerak dibidang pendidikan. Rohanna Kudus dan Rahma El Yunusiyah merupakan tokoh wanita di Sumatera Barat yang giat memajukan pendidikan seperti Maria Walanda Maramis di Sulawesi Utara. Demikian pula halnya, organisasi-organisasi wanita yang pertama-tama dibentuk, kegiatannya terutama dalam usaha bagaimana meningkatkan kepandaian wanita, sehingga peranannya pun akan semakin besar. Organisasi Putri Mardika (tahun 1912 di Jakarta), Putri Budi Sejati (Surabaya), Keutamaan Istri (Jawa Barat), Sarekat Kaum Ibu Sumatera (Bukit Tinggi) dan PIKAT (Minahasa) merupakan beberapa contoh organisasi wanita yang bergerak dibidang pendidikan oleh dan untuk wanita.³

Dapat diduga bahwa awal keberadaan organisasi-organisasi perempuan semacam ini di Hindia Belanda (tahun 1910-an) berkaitan erat dengan dipromosikannya politik “Hutang Budi” (Politik Etik) oleh pemerintah kolonial

²Ryadi Gunawan, *“Dimensi-Dimensi Perjuangan Kaum Perempuan Indonesia dalam Persepektif Sejarah”*, Yogyakarta: tahun 1991. Dipetik dalam Fauzi Ridjal, dkk, *“Dinamika Gerakan Perempuan di Indonesia”*, Yogyakarta: PT Tiara Wacana, 1993, hlm. 100.

³Nana Nurliana 1986, *op.cit.*, hlm. 7-8.

pada waktu itu.⁴ Pemerintah Kolonial dan para pejabatnya masa itu percaya bahwa modernisme (ala Barat) mampu mengantar ke “pencerahan akal budi”. Pencerahan akal seperti itulah yang dipercayai akan menghasilkan kebaikan karena “kepandaian adalah pangkal keselarasan, dan kebodohan adalah pertanda kekacauan”.⁵

Pada saat gerakan wanita dalam berbagai wadah organisasi semakin berkembang, kemudian digelar Kongres Wanita Indonesia Pertama yang diselenggarakan pada tanggal 22-25 Desember 1928 di Dalem Joyodipuran Yogyakarta.⁶ Salah satu hasil kongres adalah membentuk Perikatan Perempuan Indonesia (PPI). Sejak saat itulah tanggal 22 Desember dijadikan perayaan hari bersejarah dan disepakati sebagai lahirnya “Hari Ibu”. Untuk mengenangnya, kemudian diperingati setiap tahun sebagai Hari Nasional.⁷ Perikatan Perempuan Indonesia (PPI) diubah namanya menjadi Perikatan Perhimpunan Istri Indonesia (PPII) pada Kongres Wanita Kedua yang diadakan di Jakarta pada tahun 1929.

⁴Dalam arti tertentu, penyebaran surat-surat Kartini berbahasa Belanda yaitu *Door Duisternis tot Licht* (terbitan Den Haag, Semarang dan Surabaya pada tahun 1911) adalah juga bagian dari strategi politik kolonial tersebut. Buku “Kartini” tersebut baru diindonesiakan oleh Armijn Pane pada tahun 1938 (terbitan Balai Pustaka, Batavia) dengan judul *Habis Gelap Terbitlah Terang*. Dikutip dari Primariantari, dkk, *Perempuan dan Politik Tubuh Fantastis* (Yogyakarta: Kanisius, 1998), hlm. 32.

⁵*Ibid.*, hlm. 32.

⁶Suratmin, dkk, *Biografi Tokoh Perempuan Indonesia Pertama* (Jakarta: Depdikbud Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional, 1991), hlm. 1.

⁷Vrede-De Steurs, *The Indonesian Woman Struggles and Achievements* (The Hague: Mouton & Co, Cora. 1960), hlm. 89-90. Dikutip dari Primariantari, dkk, *Perempuan dan Politik Tubuh Fantastis* (Yogyakarta: Kanisius, 1998), hlm. 34.

Dalam gerakan politik praktis yang legal formal, kaum wanita untuk pertama kalinya menyatakan beroposisi dengan kekuasaan pemerintah pada tahun 1935 ketika pemerintah kolonial menolak permintaan kaum wanita untuk memilih wanita pribumi sebagai wakil dalam Dewan Rakyat. Akhirnya, pada 8 Agustus 1938 wanita Indonesia mengorganisasi lagi pertemuan untuk mengadakan protes terhadap pemerintah yang diikuti oleh 18 organisasi wanita. Mereka memprotes pemerintah yang tetap saja memilih wanita Belanda sebagai anggota Dewan Rakyat.⁸ Organisasi wanita di Hindia Belanda boleh dikatakan tidak begitu aktif lagi setelah aksi protes tersebut hingga berakhirnya kekuasaan Belanda di Indonesia. Baru kemudian marak kembali pada zaman pendudukan Jepang ketika kaum wanita diorganisasi oleh berbagai wadah perjuangan untuk melakukan perlawanan terhadap kekuasaan Jepang. Demikian juga pada periode Revolusi Kemerdekaan Indonesia 1945-1949, kaum wanita aktif dalam berbagai gerakan perjuangan baik di PMI (Palang Merah Indonesia), dapur umum, spionase/intelijen maupun di front pertempuran sebagai lasykar putri.

Setelah berakhirnya Perang Kemerdekaan, semua organisasi wanita tersebut diafiliasikan ke dalam suatu organisasi yang lebih besar dan merupakan induk dari seluruh organisasi wanita di Indonesia yang diberi nama Kongres Wanita Indonesia (KOWANI). KOWANI didirikan di Surabaya pada awal bulan Juni tahun 1950, ketuanya adalah Nyi Puger, wakil ketua Ny. Dr. Angka Nitisastra, penulis Ny. Irang, dan anggota luar biasa Ny. Samadikun. Dalam rapat pembentukan itu juga dibentuk Panitia Pembantu Sosial yang anggotanya terdiri

⁸*Ibid.*, hlm. 35.

dari perhimpunan yang punya usaha kesosialan guna mendampingi dan membantu melaksanakan pekerjaan pemerintah di lapangan sosial.⁹ Sejak saat itu organisasi wanita menjadi tersentralisasi dan kegiatannya lebih ditentukan oleh induk organisasinya, sehingga tidak dapat lagi semerdeka seperti sebelumnya.

Akhirnya pada tanggal 24-26 Nopember 1950 dalam kongresnya yang ke-5, KOWANI dibubarkan dan diganti dengan nama Kongres Wanita Indonesia (tanpa singkatan).¹⁰ Dalam perjalanan selanjutnya, Kongres Wanita Indonesia hanyalah sebagai alat administrasi birokrasi yang lebih mengutamakan kepentingan pemerintah daripada kepentingan wanita sendiri sebagai pelaku sejarah.

Sementara itu, hampir bersamaan dengan pembentukan KOWANI, pada 4 Juni 1950 para wakil enam organisasi wanita berkumpul di Semarang, untuk melebur enam organisasi mereka masing-masing ke dalam satu wadah tunggal yang diberi nama Gerwis, yaitu kependekan dari Gerakan Wanita Indonesia Sedar. Enam organisasi tersebut ialah Rukun Putri Indonesia (Rupindo) dari Semarang, persatuan Wanita Sedar dari Surabaya, Isteri Sedar dari Bandung, Gerakan Wanita Indonesia (Gerwindo) dari Kediri, Wanita Madura dari Madura, dan Perjuangan Putri Republik Indonesia dari Pasuruan.¹¹ Koran Kantor Berita Antara yang terbit pada tanggal 9 Juni 1950 menyebutkan:

⁹ *Antara*, Dinas Dalam Negeri, 5 Juni 1950. hlm. 3.

¹⁰ Primantiari 1998, *op.cit.*, hlm. 36.

¹¹ Saskia E. Wierenga, *Penghancuran Gerakan Perempuan di Indonesia* (Jakarta: Garba Budaya, 1999), hlm. 283.

Gerwis yang diketuai oleh Tis Netty dari Semarang dan Nyonya Umi dari Surabaya, S.K. Trimurty dari Yogyakarta dan Nyonya Srie Kustijah dari Semarang masing-masing sebagai wakil ketua dan penulis, dalam rapatnya yang pertama itu telah memajukan tuntutan kepada pemerintah antara lain minta supaya fonds pembangunan negara ditujukan bagi kemakmuran rakyat dan mereka menghendaki negara kesatuan yang 100 % lepas dari “isme” penjajahan. Gerwis belum menggabungkan diri pada KOWANI.¹²

Dari berita tersebut dapat diketahui pandangan politik Gerwis sebagai organisasi wanita sangat progresif dan radikal dimana Indonesia harus merupakan NKRI yang 100 persen lepas dari “isme” penjajahan. Padahal seperti diketahui, bahwa negara Republik Indonesia pada waktu itu masih dalam bingkai negara Republik Indonesia Serikat (RIS) yang berarti negara RI hanya merupakan bagian dari negara RIS.

Jika mencermati latar belakang sosial dari para tokoh wanita yang menjadi pelopor Gerwis tersebut tampak berbeda-beda, tapi ternyata hal tersebut tidak menghalangi langkah mereka untuk bersama-sama terjun di tengah kancah perjuangan nasional. Bahkan beberapa dari mereka sudah berjuang dalam satuan gerilya melawan Jepang dan Belanda. Sejak awal berdirinya Gerwis merupakan organisasi perempuan yang paling aktif di bidang politik nasional. Sesuai dengan keputusan yang diambil dalam kongres I pada Desember 1951, Gerwis kemudian diubah menjadi Gerwani.¹³ Gerwani memiliki hubungan yang kuat dengan Partai Komunis Indonesia (PKI), namun sebenarnya merupakan organisasi independen yang memperhatikan masalah-masalah sosialisme dan feminisme.

Pada akhirnya, setelah terjadi peristiwa pembunuhan para Jendral 30

¹² Antara, Dinas Dalam Negeri, 9 Juni 1950, hlm. 9.

¹³ Wierenga 1999, *op.cit.*, hlm. 299.

September - 1 oktober 1965 (Gestapu/Gestok), Gerwani dianggap oleh pemerintah Orde Baru sebagai salah satu organisasi yang terlibat dalam peristiwa Gerakan 30 September, dan dalam film karya Arifin C. Noer yang berjudul Penghianatan G 30 S/PKI digambarkan menyiksa jendral-jendral yang ditangkap sebelum mereka dibunuh di Lubang Buaya. Selain itu juga digambarkan adegan-adegan dimana anggota-anggota Gerwani menari telanjang, memotong alat kelamin tawanan mereka dan melakukan perbuatan amoral lainnya. Namun demikian sebagian ahli sejarah meragukan bahwa tampilan dalam film tersebut merupakan fakta dari kebenaran suatu sejarah dan bagian keterlibatan Gerwani sebagai organisasi wanita dalam peristiwa tersebut masih merupakan misteri sejarah yang belum terungkap.

Aktivitas Gerwani di kota Semarang pada kurun waktu 1950 hingga 1965 sangat masif. Mereka melakukan aktivitas dalam bidang politik, ekonomi, sosial dan budaya. Geliat aktivitas Gerwani di kota Semarang dapat menyita perhatian kaum wanita di Semarang, oleh karena itu jumlah mereka pun cukup banyak. Kegairahan Gerwani dalam melaksanakan program-program mereka serta adanya keterkaitan mereka dengan PKI akhirnya membawa mereka pada kehancuran pada tahun 1965.

Terkait dengan hal itu adalah sangat menarik untuk mengkaji eksistensi, dinamika dan perkembangan Gerwani sebagai sebuah organisasi wanita yang telah ikut memberi kontribusi pada perjalanan sejarah perjuangan bangsa Indonesia secara nasional maupun lokal. Skripsi ini akan mengkaji permasalahan Gerwani sebagai organisasi sosial politik pada tingkat lokal di kota Semarang

dengan rumusan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pembentukan Gerwani di kota Semarang dan pihak-pihak yang berperan dalam pembentukan tersebut.
2. Bagaimana aktivitas Gerwani di kota Semarang pada tahun 1950-1965.
3. Bagaimana kehancuran Gerwani di kota Semarang pada tahun 1965.

B. Ruang Lingkup

Penulisan sejarah akan menjadi lebih mudah dan terarah jika dilengkapi dengan perangkat pembatas, baik temporal maupun spasial serta keilmuan. Hal itu sangat diperlukan, karena dengan batasan tersebut, sejarawan dapat terhindar dari hal-hal yang tidak ada relevansinya dengan permasalahan yang ditulis. Jika piranti ini tidak digunakan, akibatnya analisis yang dihasilkan akan bersifat lemah.¹⁴ Penulis memakai tiga ruang lingkup yaitu lingkup temporal, spasial dan keilmuan.

1. Lingkup temporal.

Gerakan Wanita Indonesia (Gerwani) adalah suatu organisasi wanita yang muncul pada awal tahun 1950 dan akhirnya dibubarkan setelah terjadi peristiwa Gerakan 30 September (Gestapu) atau Gerakan Satu Oktober (Gestok). Oleh karena itu dalam pembahasannya diambil batasan waktu antara tahun 1950 hingga tahun 1965. Pembatasan ini didasarkan pada asumsi bahwa sejak awal berdirinya tahun 1950, partisipasi politik dari Gerwani seringkali diwarnai konflik yang akhirnya melahirkan berbagai pergolakan yang saling berkaitan. Kondisi ini ada

¹⁴Taufik Abdullah, Abdurrahman Surjomihardjo, ed. *Ilmu Sejarah dan Historiografi: Arah dan Perspektif* (Jakarta: Gramedia, 1985), hlm. xii.

kaitannya dengan banyaknya organisasi wanita yang muncul di kota Semarang pada khususnya dan di Indonesia pada umumnya. Adapun batasan tahun 1965 merupakan akhir dari kiprah gerwani di kancah politik Indonesia terkait dengan dampak dari adanya peristiwa 30 September 1965.

2. Lingkup spasial

Lingkup spasial penelitian ini adalah kota Semarang. Dipilihnya kota Semarang sebagai batasan spasial, tidak terlepas dari hasil temuan, baik sumber-sumber koran, arsip maupun wawancara yang mengarah pada tempat berdirinya Gerwis sebagai cikal bakal dari Gerwani. Kota Semarang sendiri pada waktu itu merupakan salah satu kota yang sangat berpengaruh dalam perkembangan gerakan wanita di Indonesia.

3. Lingkup keilmuan

Skripsi ini dapat digolongkan ke dalam disiplin ilmu sejarah, karena disiplin ilmu sejarah ini mempelajari dinamika dan perkembangan kehidupan manusia pada masa lampau.¹⁵ Demikian pula ilmu sejarah mempunyai beberapa lapangan khusus atau tematis dalam mendekati obyek sejarah, seperti sejarah sosial, sejarah militer, sejarah politik, dan sebagainya. Mengingat isu yang dikaji dalam skripsi ini terkait dengan eksistensi, dinamika, dan perkembangan Gerwani sebagai organisasi wanita yang bergerak di bidang sosial politik, maka lingkup keilmuan skripsi ini termasuk dalam kategori sejarah sosial politik.

¹⁵Taufik Abdullah, *Sejarah lokal di Indonesia* (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1985), hlm. 321.

C. Tinjauan Pustaka

Sebagai usaha untuk menghindari kerancuan objek studi dan juga untuk memperkaya materi penulisan, maka dilakukan tinjauan pustaka terhadap beberapa buku yang relevan. Buku pertama berjudul *Sejarah Setengah Abad Pergerakan Wanita Indonesia*.¹⁶ Buku ini memuat sejarah pergerakan wanita di Indonesia secara kronologi dari mulai abad 19 sampai awal abad 20, baik yang dilakukan secara perseorangan atau berkelompok dalam wadah organisasi tertentu. Perkembangan dan peranan berbagai organisasi wanita yang ada pada pra kemerdekaan sampai Indonesia mencapai kemerdekaan dibahas secara lengkap dalam buku ini. Buku ini dapat dijadikan sumber keterangan awal mengenai pergerakan wanita di Indonesia termasuk Gerakan Wanita Indonesia (sebelumnya bernama Gerwis) dalam aktivitasnya sebagai organisasi wanita di masa perjuangan.

Sumber yang digunakan sebagai bahan penyusunan buku ini cukup akurat, banyak didukung sumber-sumber primer seperti wawancara dengan bekas tokoh-tokoh wanita yang terlibat langsung. Sumber lain yang digunakan adalah surat kabar sejamin, autobiografi, dan pendukung lain yang mempunyai relevansi dengan isi buku. Penulisan dalam buku ini menggunakan tata kalimat secara lugas agar mudah dipahami. Kelemahan buku ini antara lain secara substansial hanya merupakan deskripsi umum yang bersifat makro, karena begitu panjang rentang waktu/periode yang dicakup dengan tema umum dan luas. Secara kuantitas terlalu tebal karena memuat semua hasil Kongres Wanita Indonesia sampai tahun 1978.

¹⁶Kongres Wanita Indonesia, *Sejarah Setengah Abad Pergerakan Wanita Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1978).

Buku Setengah Abad Pergerakan Wanita Indonesia ini tidak banyak memuat faktor sosiologis dan politik yang melatarbelakangi lahirnya suatu organisasi atau perkumpulan wanita pada zamannya. Relevansi buku ini dengan permasalahan yang ditulis adalah sebagai bahan pembanding bagi peranan organisasi-organisasi wanita di Indonesia dari pra kemerdekaan sampai pada masa kemerdekaan.

Buku kedua berjudul *Kedudukan Wanita Indonesia dalam Hukum dan Masyarakat*.¹⁷ Buku ini membahas mengenai wanita dan kedudukannya di dalam hukum adat maupun hukum negara. Membahas masalah hukum dalam perkawinan, perceraian, hak dan kewajibannya sebagai ibu serta istri. Buku ini berisi pula tahap-tahap perjuangan para wanita dalam memperoleh kedudukannya di dalam hukum dari masa penjajahan Belanda sampai Negara Republik Indonesia. Perjuangan perintis wanita di Indonesia sebagai dasar pemikiran dalam memperoleh kedudukan dalam masyarakat dibahas secara jelas dalam buku ini.

Relevansi buku ini dengan permasalahan yang ditulis dapat dijadikan sebagai bahan pembanding bagi kedudukan wanita di Indonesia dari jaman kolonial Belanda sampai masa kemerdekaan. Teknik pengumpulan data dilakukan secara cermat dan teliti melalui analisa-analisa yang akurat. Didukung dengan gambar-gambar aktivitas dan keberhasilan kaum wanita yang diukur dengan data-data statistik dari berbagai komposisi. Secara detil buku ini menggambarkan usaha kaum wanita dalam masyarakat dari jaman penjajahan sampai masa pembangunan dewasa ini. Buku ini mempunyai sedikit kelemahan, yaitu digunakan istilah-istilah

¹⁷Nani Suwondo, *Kedudukan Wanita Indonesia Dalam Hukum dan Masyarakat* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1981).

yang spesifik hukum, sehingga kalangan di luar bidang itu agak menemui kesulitan untuk memahaminya. Hal ini menimbulkan kesulitan bagi pembaca yang bukan dari kalangan praktisi hukum.

Buku ketiga berjudul *Penghancuran Gerakan Perempuan di Indonesia*.¹⁸

Buku ini membahas mengenai proses restrukturalisasi hubungan gender dalam sejarah gerakan perempuan Indonesia. Secara umum buku ini membahas mengenai penelitian tentang gender dan gerakan perempuan Indonesia menjelang abad 20 sampai tahun 1965. Secara khusus membahas mengenai Gerwani mulai dari berdirinya, ideologi dan perkembangannya, sampai dengan peristiwa 30 September 1965. Buku ini dapat memberi sumbangan penting, khususnya pada saat ada keinginan dari kalangan sejarawan untuk mengkaji ulang sejarah formal yang telah dibakukan penguasa selama ini. Dengan paradigma gender, penulis buku ini bukan hanya berhasil melakukan penelusuran sejarah yang tersembunyi tentang gerakan perempuan di Indonesia, tapi juga mendekonstruksi bangunan berpikir sebuah masyarakat dari rejim yang mempresentasikan dominasi “berpikir laki-laki”.

Relevansi buku ini dengan permasalahan dalam skripsi ini adalah sebagai bahan pembanding bagi kedudukan wanita di Indonesia terutama Gerwani sebagai salah satu organisasi yang memperjuangkan hak-hak politik kaum perempuan di bidang politik nasional. Penulis buku ini berusaha untuk tidak hanya menyingkap kebohongan, tapi juga menyatakan sesuatu tentang latar belakang oposisi seksual, atas dasar konsepsi politik, dalam hal ini lahirnya “Orde Baru”. Dengan demikian

¹⁸Saskia E. Wierenga, *Penghancuran Gerakan Perempuan di Indonesia* (Jakarta: Garba Budaya, 1999).

dengan menelaah buku ini, permasalahan dalam skripsi ini dapat dikaji secara kritis dan lebih proporsional.

D. Kerangka Teoretis dan Pendekatan

Penggambaran mengenai suatu peristiwa sangat tergantung pada pendekatan yang digunakan, dari segi mana kita memandangnya, dimensi mana yang diperhatikan, unsur-unsur mana yang diungkapkan, dan lain sebagainya. Hasil pelukisannya akan sangat ditentukan oleh jenis pendekatan yang dipakai.¹⁹ Partisipasi politik adalah kegiatan seseorang atau sekelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, yaitu dengan jalan memilih pemimpin negara, dan secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kebijakan pemerintah (*public policy*).²⁰ Gerwani sebagai sebuah organisasi wanita mempunyai karakter sebagai organisasi yang sadar politik dan ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik Indonesia.

Menurut Samuel P. Huntington dan Joan M. Nelson, partisipasi politik adalah kegiatan warga negara yang bertindak sebagai pribadi-pribadi, yang dimaksud untuk mempengaruhi pembuatan keputusan oleh pemerintah. Partisipasi bisa bersifat individual atau kolektif, terorganisasi atau spontan, mantap atau sporadis, secara damai atau dengan kekerasan, legal atau ilegal, efektif atau tidak

¹⁹Sartono Kartodirdjo, *Pendekatan Ilmu Sosial Dalam Metodologi Sejarah* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1993), hlm. 4.

²⁰Miriam Budihardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik* (Jakarta: Gramedia, 2003), Bab X.

efektif.²¹ Jika dikaitkan dengan permasalahan yang dibahas dalam hal ini adalah pandangan politik Gerwani sebagai organisasi wanita sangatlah progresif dan radikal.

Dalam mengungkapkan permasalahan dan mencari faktor-faktor kausalitas, proses serta akibat dari gerakan massa ini, sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan sosial terutama sejarah yang pembahasannya meliputi masalah sosial, politik, ekonomi, dan kebudayaan. Dari cabang-cabang tersebut sekaligus dapat digunakan untuk menambah wawasan teori dan metode sejarah itu sendiri.

Kemunculan suatu gerakan sosial disebabkan oleh beberapa faktor yang kompleks. Pada pembahasan selanjutnya agar karya ini menjadi karya yang analitis, penulis menggunakan pendekatan sosiologi politik. Pendekatan ini digunakan berdasarkan pada kenyataan bahwa peristiwa yang akan dibahas menyangkut masalah sosial dan politik. Masalah sosial menyangkut masyarakat yang ikut serta dan berpartisipasi dalam sebuah organisasi dan masalah politik menyangkut kegiatan yang dilakukan oleh organisasi massa yang berkaitan dalam lingkup politik. Dalam hal ini organisasi tersebut adalah Gerwani.

E. Metode Penelitian dan Penggunaan Sumber

Metode penulisan sejarah ini adalah prosedur analitis yang ditempuh sejarawan untuk menganalisis kesaksian yang ada, yaitu faktor sejarah sebagai

²¹*Ibid.*, hlm. 2.

bukti yang dapat dipercaya mengenai masa lampau manusia.²² Dalam metode sejarah ada empat tahapan yang harus dilakukan yaitu heuristik, kritik, interpretasi dan historiografi.

Heuristik, yaitu proses pengumpulan data, baik primer maupun sekunder, berupa dokumen-dokumen tertulis maupun lisan dari peristiwa masa lampau sebagai sumber sejarah. Pada tahap pertama ini, sumber primer diperoleh melalui penelusuran terhadap dokumen yang tersimpan di Arsip Nasional, Perpustakaan Nasional di Jakarta, Arsip Daerah Jawa Tengah, Arsip Museum Mandhala Bhakti Semarang, dan dari beberapa pihak yang tidak dapat disebutkan dalam skripsi ini karena alasan pribadi. Ada juga beberapa harian yang terbit pada masa itu seperti *Harian Rakjat*, *Bintang Timur*, *Sinar Harapan*, *Api Kartini* dan lain-lain. Dari beberapa tempat itu diperoleh arsip-arsip dan dokumen-dokumen yang menyangkut Gerwani. Untuk melengkapi kelangkaan dokumen tertulis perlu dilakukan wawancara di lapangan terhadap orang-orang yang terlibat, diantaranya para anggota Gerwani dan para anggota PKI, khususnya di kota Semarang.

Sumber lain yang digunakan yaitu sumber sekunder, merupakan kesaksian dari siapapun yang bukan merupakan saksi pandang mata, yakni dari seseorang yang tidak hadir pada peristiwa yang dikisahkan.²³ Sumber sekunder ini diperoleh melalui riset kepustakaan berupa buku-buku dan majalah-majalah yang mempunyai hubungan dengan permasalahan. Riset kepustakaan ini penting karena

²²Louis Gottschalk, *Mengerti Sejarah* (Jakarta: Universitas Indonesia, 1986), hlm. 18-19

²³ Kartini Kartono. *Pengantar Metodologi Riset*. (Bandung: Alumni, 1980), hlm. 190.

dengan melalui penelusuran dan penelaahan kepustakaan dapat dipelajari bagaimana menggunakan kerangka teori untuk landasan pemikiran.²⁴

Kritik, proses melakukan pengujian terhadap kredibilitas dan otentisitas sumber. Kritik sumber dibagi menjadi dua. Pertama kritik ekstern yang dilakukan untuk mengetahui otentisitas sumber. Dalam tahapan ini, sumber-sumber yang telah didapat, diuji dan ditelaah lebih jauh sehingga sumber dapat dipastikan keotentisitasannya.. Kedua, kritik intern untuk mengetahui kredibilitas atau kebenaran isi sumber tersebut.

Interpretasi merupakan tahap ke tiga. Pada tahap ini fakta-fakta sejarah ditafsirkan dan dianalisis serta dihubungkan dalam rangkaian kronologis, sehingga didapatkan alur yang sistematis.

Historiografi ialah tahap terakhir. Dalam tahapan ini fakta yang terkumpul kemudian disintesis dan dituangkan dalam bentuk tulisan yang deskriptif-analitis dengan menggunakan bahasa yang baik dan benar sesuai kaidah tata bahasa agar komunikatif dan mudah dipahami pembaca. Hasilnya ialah tulisan sejarah yang bersifat deskriptif analitis.

F. Sistematika Penulisan

Skripsi yang berjudul “*Aktivitas Gerwani di Kota Semarang tahun 1950-1965*” ini penulisannya disusun dalam lima bab. Setiap bagian menitik beratkan pada permasalahan tertentu dan diantara bab-bab memiliki keterkaitan hubungan.

²⁴ Koentjaraningrat. *Metode-metode Penelitian Masyarakat*. (Jakarta: PT Gramedia, 1983), hlm. 19.

Bab I berisi Pendahuluan yang meliputi latar belakang dan permasalahan, ruang lingkup, tinjauan pustaka, kerangka teoritis dan pendekatan, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II merupakan Gambaran Umum yang membahas mengenai kondisi sosial politik di Kota Semarang pada tahun 1950-1965

Bab III menjelaskan mengenai Gerwani sebagai organisasi sosial politik di Indonesia dalam hal ini dibahas kelahiran Gerwani, program-program dan struktur kepengurusan gerwani, serta afiliasi Gerwani dengan PKI

Bab IV membahas mengenai aktivitas Gerwani di kota Semarang pada tahun 1950-1965, pergolakan politik menjelang 1965 dan penghancuran PKI dan Gerwani di kota Semarang pasca peristiwa G30S.

Bab V Penutup, berisi kesimpulan yang merupakan jawaban dari permasalahan yang dikaji dalam skripsi ini.

BAB II

GAMBARAN UMUM KOTA SEMARANG TAHUN 1950 – 1955

A. Keadaan Wilayah

1. Keadaan Geografi

Kota Semarang pada tahun 1950 terletak di pesisir pantai utara pulau Jawa dengan posisi 110°23'57" BT dan 110°27'70" BT, serta 6°55'6" LS dan 6°58'18" LS.²⁵

Dari laut Jawa membujur ke Selatan seluas 9.940 kilometer persegi dengan batasan wilayah di sebelah utara yaitu laut Jawa, sebelah timur adalah kabupaten Demak, sebelah barat berbatasan dengan kabupaten Kendal dan sebelah selatan yaitu kabupaten Semarang.²⁶ Letak kota Semarang yang demikian mempengaruhi perkembangan Gerwani di wilayah Kota Semarang maupun wilayah sekitarnya. Gelar Venezia dari timur diberikan pada kota Semarang oleh orang-orang "tempoe doeloe" karena keindahan dan keunikan geologisnya yang jarang dimiliki oleh kota lain.

Dari segi topografi, kota Semarang memiliki dua tipologi, yaitu wilayah perbukitan (kota atas) dan lembah atau daratan (kota bawah) yang berbatasan langsung dengan laut. Kota bawah memiliki ketinggian diukur dari permukaan

²⁵Pemerintah Daerah Kotamadya Dati II Semarang, *Sejarah Kota Semarang* (Semarang: Pemda Kotamadya Semarang, 1979), hlm. 5.

²⁶ Pemerintah Daerah Kotamadya Dati II Semarang, *Kotamadya Semarang Dalam Angka 1971* (Semarang: Pemda Kotamadya Semarang, 1971), hlm. 4.

laut 0,75 m.²⁷ Daerah bawah meliputi daerah sepanjang garis pantai utara melebar kearah pedalaman sampai di perbatasan daerah perbukitan. Di kota bawah inilah terdapat bangunan gaya modern.²⁸ Sama seperti daerah pantai lainnya, maka iklim daerah ini panas dengan rata-rata suhu udara 37° - 39° Celcius. Tingginya antara 0,75 – 3,49 meter diatas permukaan air laut. Tiap tahun dataran rendah ini semakin meluas, garis pantai semakin maju ke arah utara sebagai akibat endapan lumpur yang dibawa terus menerus oleh sungai Semarang, sehingga letak kota Semarang berada di sekitar daerah Bubakan di tepi sungai Semarang.²⁹ Kota atas mempunyai hawa yang segar, dengan ketinggian diukur dari permukaan laut sekitar 90,56 meter untuk daerah Candi, 136 meter untuk daerah Jatingaleh, dan 270 meter untuk daerah tertinggi yaitu Gombel.³⁰

Semarang merupakan salah satu kota yang terletak di pantai utara Jawa Tengah dan termasuk dalam wilayah eks karesidenan Semarang. Kota Semarang sangat strategis letaknya, karena merupakan wilayah yang dilewati jalur lalu lintas utara jawa, baik jalur kereta api maupun jalan raya, baik lalu lintas yang datang dari arah Jakarta, Semarang, Surabaya maupun sebaliknya.³¹

²⁷ *Ibid* .,

²⁸ Pemerintah Daerah Kotamadya Dati II Semarang, *Semarang Masa Lalu, Masa Sekarang, dan Masa Mendatang* (Semarang: Pemda Dati II Semarang, 1979), hlm. 5.

²⁹ Departemen P dan K, *Geografi Budaya Daerah Jawa Tengah* (Semarang: Proyek Pengembangan Media Kebudayaan Departemen P dan K, 1977), hlm. 84.

³⁰ *Ibid* ., hlm. 5.

³¹ Hasan Shadily, *Ensiklopedi Indonesia* (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1982), hlm. 1737.

Menilik sejarahnya, keberadaan kota Semarang sebagai daerah kotapraja sudah berlangsung sejak awal abad 20, yaitu dengan dikeluarkannya Staatsblad No. 120 Gemeente Van Semarang pada tanggal 1 April 1906 tentang penetapan Semarang sebagai sebuah “gemeente” (kotapraja).³² Staatgemeente Semarang memiliki kewenangan pemerintahan selaku kotapraja yang sejajar dengan wilayah kabupaten lain di lingkungan karesidenan Semarang.³³ Mula-mula wilayah ini terdiri dari lima kecamatan, yaitu kecamatan Semarang Barat, Semarang Timur, Semarang Utara, Semarang Selatan, dan Semarang Tengah dengan luas 391 km². Kecamatan Semarang Barat terdiri dari 37 desa, Semarang Timur 20 desa, Semarang Utara 15 desa, Semarang Selatan 25 desa, dan Semarang Tengah 16 desa.³⁴ Batas-batas kecamatan dan desa, pada waktu itu hanya berupa jalan-jalan kecil dan ada pula yang berupa tanah pekarangan. Batas-batas tersebut dulu ditetapkan oleh tuan-tuan tanah untuk pelaksanaan pemungutan sewa tanah. Ada desa yang mempunyai wilayah di tengah-tengah desa yang lain dan ini mengakibatkan sulitnya pelaksanaan tugas-tugas pemerintah desa.³⁵

Pada periode tahun 1950 – 1965 wilayah kota Semarang terdiri dari lima kecamatan, yaitu kecamatan Semarang Barat, Semarang Timur, Semarang Utara,

³² Anonim, *Republik Indonesia: Propinsi Jawa Tengah* (Semarang: Kementrian Penerangan RI, 1953), hlm. 67.

³³ Anonim, 1984., *op.cit.*, hlm. 21.

³⁴ Soekirno, *Semarang* (Semarang: Departemen Penerangan Kota Besar Semarang, 1956), hlm. 60.

³⁵ Desa yang mempunyai wilayah di tengah-tengah desa yang lain yaitu Desa Genuk terletak di tengah-tengah Desa Lempongsari, lihat R. Soenaryo, et al. *Mengenal Kotamadya Semarang II*. (Semarang: Pemerintah Daerah, 1972), hlm. 7.

Semarang Selatan, dan Semarang Tengah. Dengan demikian wilayah kerja Gerwani pada waktu itu juga meliputi semua wilayah kecamatan yang ada di kota Semarang tersebut.

2. Keadaan Demografi

Mayoritas penduduk Semarang adalah pribumi suku Jawa, sedangkan yang lain adalah pendatang, terdiri dari orang luar Jawa, etnis Cina, dan sebagian keturunan Arab. Sampai pada akhir bulan April tahun 1950, jumlah penduduk dalam lingkungan kota Semarang ada 284.279 jiwa, yaitu orang pribumi 220.332 jiwa; etnis Tionghoa/Cina 55.602 jiwa; orang Eropa 5.454 jiwa; orang Arab 2.314 jiwa; dan orang Timur asing 577 jiwa. Memang semenjak Januari 1949 pertambahan angka penduduk Indonesia/pribumi dan etnis Tionghoa yang memegang “rekor”, yaitu setiap hari rata-rata 60 jiwa bagi orang Indonesia/pribumi dan 30 jiwa bagi etnis Tionghoa. Dapat dicatat bahwa diantara jumlah penduduk Eropa terdapat 300 lebih banyak kaum wanitanya sedangkan etnis Tionghoa menunjukkan kebalikannya. Diantara 26.468 jiwa anak-anak Tionghoa terdapat 17.584 laki-laki. Mengenai angka kelahiran dan kematian selama periode ini tidak menunjukkan perubahan yang signifikan, yaitu selama bulan April ada 472 jiwa yang lahir dan 355 jiwa yang mati, sedangkan pada bulan April tahun 1949 masing-masing ada 450 jiwa yang lahir dan 341 jiwa yang mati. Satu hal yang patut dicatat adalah angka kelahiran bayi kembar, dimana terdapat informasi dari pihak yang berkompeten, bahwa ada fenomena menarik dari kelahiran bayi kembar. Di kecamatan Semarang Timur misalnya, di salah satu kampung, diantara ibu yang melahirkan terdapat 75 persen yang melahirkan

dengan bayi kembar. Mengenai angka perkawinan juga dapat dicatat di Masjid Djami' sampai akhir April tahun 1949, yaitu ada 2.216. Sepanjang tahun itu jumlah orang kawin ada 4.645, sedangkan yang bercerai ada 1.559 dan yang akur kembali hanya 64.³⁶

B. Keadaan Sosial Ekonomi

Jumlah penduduk kota Semarang pada tahun 1965 sekitar 576.977 jiwa.³⁷ Mata pencaharian orang-orang pribumi baik yang asli maupun pendatang sebagai petani, nelayan, buruh pabrik, buruh bangunan, pegawai sipil, maupun ABRI. Untuk etnis Cina dan Arab sebagian besar sebagai pedagang dan pengusaha yang memiliki toko-toko, pabrik-pabrik, atau perusahaan-perusahaan.

Kota yang berperan sebagai kota perdagangan, ditambah dengan pesatnya jumlah penduduk menumbuhkan pusat-pusat perbelanjaan, pasar-pasar, dan toko-toko yang mutlak dibutuhkan. Kebijaksanaan Pemerintah Kotamadya Semarang dalam masalah ini diarahkan pada penyediaan pusat-pusat atau tempat-tempat perbelanjaan yang menyebar lokasinya, melalui cara pembangunan berdikari. Maksud dari pembangunan berdikari bahwa biaya pembangunan dibebankan kepada calon pemakai, dengan hak pakai selama jangka waktu sekitar 20 tahun. Selebihnya para pemakai diberi hak sewa. Pemerintah hanya terbatas pada penyediaan tanah atau tempat serta memberi fasilitas-fasilitas dalam hubungannya

³⁶ *Antara*, Dinas Dalam Negeri. No. 155/A-B. 4 Juni 1950.

³⁷ Anonim, *Perkembangan Penduduk Kota Semarang dalam Master-Plan*, (Semarang: Pemerintah Daerah, 1970), hlm. 1.

dengan pelaksanaan pembangunan tersebut.³⁸ Adapun pasar-pasar di Kotamadya Semarang yaitu Pasar Johar, Pasar Bulu, Pasar Karangayu, pasar Peterongan, dan Pasar Dargo. Sedangkan pusat-pusat perbelanjaan dapat dilihat pada tabel 1 di bawah ini.

Tabel 1. Jenis dan Corak Pasar Tradisional di Kota Semarang Tahun 1965.

No.	Jenis Pasar	Tempat
1	Pasar hewan/kambing	Mrican
2	Pasar unggas	Sendowo dan Jl. Kartini
3	Pusat perbelanjaan emas	Kranggan dan Gang Pinggir
4	Pasar alat-alat bangunan ringan	Pasar Mambo di Jl. Kokroso
5	Pasar serba ada waktu malam	Pasar Yaik
6	Penjualan onderdil kendaraan bermotor	Jl. Mataram
7	Pasar beras	Pasar Dargo
8	Pasar ikan laut	Pontjol
9	Pusat penjualan tekstil	Gang Warung
10	Pasar penjualan alat-alat bekas, onderdil-onderdil bekas sepeda	Tawang
11	Pusat perbelanjaan serba ada siang dan malam	Pasar Johar dan Peterongan

Sumber: R. Soenaryo, et al. *Mengenal Kotamadya Semarang II* (1972), hlm. 7.

³⁸ Soenaryo. *op.cit.*, hlm. 45.

Kota Semarang lebih mengarah pada kota industri. Hal ini disebabkan lahan pertanian semakin menyempit dan kesuburannya berkurang. Dalam rangka menuju kota industri, Pemerintah Daerah Semarang telah aktif membantu penyediaan tanah-tanah dan penyelesaian pemindahan hak tanah. Disamping itu pemerintah telah berusaha memelihara iklim yang baik serta aman bagi pendirian dan pertumbuhan industri baik fisik maupun politis. Bagi industri kecil dan home industri, Pemerintah Daerah telah membina dengan kegiatan-kegiatan bimbingan teknik dari Dinas Perindustrian.³⁹

Dalam bidang pertanian, akibat perkembangan kota dan bertambahnya jumlah penduduk serta timbulnya wilayah industri, dengan sendirinya banyak areal pertanian yang digunakan untuk perumahan dan wilayah industri. Dari tahun ke tahun areal pertanian semakin menyempit, sehingga harus ada usaha-usaha lain di sektor pertanian untuk menyediakan bahan makanan bagi mereka yang pindah dan bekerja di sektor industri.⁴⁰ Mereka yang bertani biasanya semata-mata hanya untuk mencukupi kebutuhan hidup sendiri atau *subsistence farming*.⁴¹ Berkenaan dengan masalah ini Pemerintah Daerah berusaha membantu para petani. Misalnya dalam pengairan di samping swadaya dan gotong-royong masyarakat, pemerintah juga membantu lewat Anggaran Pembangunan Daerah.

³⁹ R. Soenaryo, et al. *ibid.*, hlm. 50.

⁴⁰ Irawan, et al. *Ekonomi Pembangunan*. (Yogyakarta: Liberty Offset, 1972), hlm. 107.

⁴¹ Soerjono Soekanto, *Sosiologi: Suatu Pengantar*. (Jakarta: Yayasan Penerbit UI, 1969), hlm. 120.

Wilayah kota Semarang berdekatan dengan pantai tentunya terdapat penduduk yang hidup sebagai nelayan. Cara hidup dan tradisi mereka sebagian besar telah masuk perangkap dan dominasi pemilik modal. Ditambah lagi banyaknya nelayan dari luar daerah yang datang untuk mengadu nasib, walaupun sementara namun hal ini dapat mengakibatkan turunnya hasil penangkapan nelayan dari dalam. Sehubungan dengan masalah ini Pemerintah Daerah telah mengadakan bimbingan aktif serta memberi fasilitas-fasilitas dalam rangka pemberantasan sistem ijon dan cengkeraman lintah darat. Dengan cara memberikan kredit sebagai biaya, berarti melengkapi alat-alat penangkapan ikan dalam rangka usaha meningkatkan produksi.⁴²

Kota Semarang mempunyai pelabuhan laut yang terletak pada posisi 7°,00 selatan dan 110°,25 timur, luas tanah yang diusahakan meliputi 398,1250 Ha. Pelabuhan tersebut untuk berlabuh kapal-kapal baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Di sekitar pelabuhan terdapat beberapa gudang untuk keperluan bongkar muat barang. Dalam kondisi yang demikian ini pelabuhan Semarang memegang peranan penting dalam hal bongkar muat dan keluar masuk barang-barang. Pekerjaan bongkar muat barang merupakan mata rantai kegiatan masyarakat pelabuhan.⁴³ Barang-barang yang diekspor lewat pelabuhan tersebut terutama hasil dari daerah Propinsi Jawa Tengah berupa hasil pertanian, perkebunan, dan kerajinan rakyat. Untuk barang-barang yang diimpor terutama

⁴² R. Soenaryo. *op.cit.*, hlm. 60.

⁴³ Anonim. *Mengenal Kotamadya Semarang*. (Semarang: Pemda Dati II Semarang, 1968), hlm. 101.

yang belum dapat diproduksi sendiri misalnya obat-obatan, tekstil, mesin, alat-alat elektronika, dan sebagainya.

Perkembangan perekonomian di kota Semarang tentunya tidak terlepas dari pengaruh perkembangan perekonomian tingkat pusat. Sekitar tahun enam-puluhan keadaan perekonomian semakin suram. Sistem ekonomi yang bersifat nasional demokratis yaitu dengan cara terpimpin, dalam pelaksanaannya lebih menonjolkan terpimpinnya daripada asas-asas demokrasi ekonomi. Pemerintah harus mengadakan pengeluaran-pengeluaran yang setiap tahun semakin besar, akibat inflasi semakin meluas dan barang-barang harganya semakin membumbung tinggi menyebabkan rakyat kecil semakin menderita.⁴⁴ Peraturan-peraturan pemerintah untuk menanggulangi sesuatu yang nyata selalu dijegal di tengah jalan. Sumber pokok kesulitan ekonomi justru ada pada tubuh pemerintah yang dihindangi kabir (kapitalis birokrat), pencoleng, koruptor, dan lain-lain.⁴⁵ Pada masa tersebut struktur ekonomi bangsa Indonesia hampir runtuh. Inflasi yang semakin meluas dan harga barang-barang naik sekitar 500 persen, sedangkan harga beras sedang naik sekitar 900 persen.⁴⁶

Sehubungan dengan adanya peristiwa G 30 S, Pemerintah Daerah menyerukan agar para pedagang membantu pemulihan keamanan. Di samping itu para pedagang kecil eceran tetap waspada dan jangan sekali-kali menaikkan

⁴⁴ Nugroho Notosusanto, et al. *Sejarah Nasional Indonesia VI*. (Jakarta: PN Balai Pustaka, 1984), hlm. 321.

⁴⁵ Anonim. *Ungkapan Fakta-Fakta Sekitar Peristiwa G30S di Jateng*. (Semarang: Peperda Jateng, 1965), hlm. 10.

⁴⁶ M.C. Ricklefs. *Sejarah Indonesia Modern*. (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1991), hlm. 426.

harga. Seruan ini ditujukan kepada pedagang di Semarang khususnya para pedagang di Pasar Johar, karena pasar tersebut merupakan barometer perekonomian Jawa Tengah.⁴⁷

C. Keadaan Sosial Budaya

Kedatangan bangsa asing ke Indonesia sejak jaman dahulu membawa pengaruh terhadap kebudayaan Indonesia. Mereka datang baik karena alasan perdagangan, politik, kunjungan, dan sebagainya. Salah satu unsur kebudayaan mereka adalah sistem religi baik Hinduisme, Budhisme, Islamisme, maupun Nasrani. Sebelum bangsa-bangsa asing datang ke Indonesia khususnya di Jawa, sistem religi orang Jawa adalah Sinkritisme. Dalam perkembangannya sistem religi asli masih tetap dan tidak ditinggalkan bahkan orang Jawa memproses sistem religinya manunggal dengan sistem religi bangsa asing.⁴⁸

Kedatangan agama Islam khususnya di Jawa tidak membawa akibat perubahan politik dan budaya yang menyolok.⁴⁹ Hal ini karena pada waktu itu kepercayaan Hindu dan Budha sudah mengakar, sehingga dalam perkembangannya agama Islam ada yang disebut santri dan Islam kejawen. Penganut agama Islam santri pada dasarnya taat menjalankan ajaran Islam.

⁴⁷ Anonim. "Seruan Ketua OPS-PKE Para Pedagang Jangan Sekali-kali Naikkan Harga", dalam *Suara Merdeka*. Tanggal 13 Oktober 1965.

⁴⁸ Soegeng Reksodihardjo, et al. *Arsitektur Tradisional Daerah Jawa Tengah*. (Semarang: P&K, 1984), hlm. 25.

⁴⁹ Hamid Abdullah. "Hinduisme, Islam dan Masyarakat Jawa", dalam *Lembaran Sastra*. No. 10. (Semarang: Fakultas Sastra Undip, 1986), hlm. 158.

Adapun golongan Islam kejawa, walaupun tidak menjalankan Shalat, puasa, serta tidak bercita-cita naik haji, tetapi mereka percaya ajaran keimanan agama Islam.⁵⁰

Di kalangan masyarakat Kotamadya Semarang, agama Islam umumnya berkembang dengan baik. Pusat peradaban Islam di kota Semarang terdapat pada pemukiman keturunan Arab di wilayah kelurahan Banjarsari dan sekitarnya, yang secara keseluruhan termasuk kecamatan Semarang Barat. Kelurahan Banjarsari dibatasi oleh kelurahan Melayu Darat di sebelah utara, jalan Layur dan sungai Semarang di sebelah timur, jalan Petek di sebelah barat, dan jalan Imam Bonjol di sebelah selatan.⁵¹ Sebagian besar masyarakat memeluk agama Islam, sedangkan yang lain memeluk agama Kristen Protestan, Katholik, Hindu Bali, Budha, dan Kong Hu Tju. Disamping keagamaan, di Semarang terdapat pula aliran-aliran kebatinan antara lain Pangestu atau Paguyuban Ngesti Tunggal, Soeboed atau Soesilo Boedi Dharmo, Tri Loehoer, P. Soemarah, BKI atau Badan Kebatinan Indonesia, Prabowo atau Paguyuban Rahayuning Bawono, perhimpunan Kamanungsan, Himpunan Kebatinan, Perhimpunan Perikemanusiaan, Sapto Dharmo, PAT atau Pangudi Amrih Tentrem, Kawruh Kodratollah Gauping Pangeran, Bayu atau Basuki Rahayu, perguruan Ilmu Sejati, dan Wahyu. Aliran-aliran kebatinan tersebut diawasi oleh Pakem.⁵²

⁵⁰ Kodiran. "Kebudayaan Jawa", dalam Koentjaraningrat. *Manusia dan Kebudayaan Indonesia*. (Jakarta: Jambatan, 1971), hlm. 339-340.

⁵¹ Badan Perencanaan Daerah Tingkat II Semarang, 1976, hlm. 17.

⁵² R. Soenaryo. *op.cit.*, hlm. 123.

Pada tahun sekitar tahun enam puluhan di Kotamadya Semarang terdapat tempat-tempat ibadah yang terdiri dari 106 Masjid, 314 Langgar, 62 Musholla, 21 Gereja Katholik, 35 Gereja Protestan, 4 Gereja Kapel, 21 Klenteng, 6 Vihara, dan 8 Cetiya.⁵³ Dilihat dari jumlahnya bahwa tempat-tempat beribadah agama Islam lebih banyak bila dibandingkan dengan tempat-tempat beribadah agama lain. Hal ini disebabkan karena mayoritas penduduk kota Semarang beragama Islam dengan perbandingan pemeluk agama Islam 85 persen, Katholik Roma 8 persen, Kristen Protestan 6 persen, Hindu, budha, Kong Hu Tju dan Kepercayaan lain hanya sekitar 1 persen.⁵⁴

Akibat banyaknya pengaruh dari luar terutama masalah kebudayaan, masyarakat Semarang dalam hal ini pemuda dan pemudinya diharapkan oleh pemerintah agar mempunyai rasa tanggung jawab dan cinta kepada tanah air dan bangsa. Pemerintah telah berusaha mengadakan penanggulangan dan pencegahan terhadap merosotnya bidang kesenian dan kebudayaan yaitu dengan usaha pembinaan dan pengembangan melalui kelompok-kelompok kesenian dan kebudayaan. Di Semarang terdapat kelompok-kelompok kesenian antara lain Karawitan, Tari Jawa, Wayang Orang, Ketoprak, orkes Keroncong, Band, Gambus, Orkes Melayu, Samproh, Drama atau Sastra, Dalang, Waranggono, Biduan Keroncong, an lain-lain.⁵⁵ Untuk tempat-tempat atau gedung-gedung yang digunakan untuk acara pementasan dapat dilihat pada tabel 2 di bawah ini.

⁵³ *Ibid.*, hlm. 125.

⁵⁴ *Ibid.*, hlm. 122.

⁵⁵ *Ibid.*, hlm. 100.

Tabel 2. Macam-macam Gedung Kesenian.

No.	Nama Gedung	Alamat
1	Gedung Kesenian Ngesti Pandawa	Jl. Pemuda
2	GRIS	Jl. Pemuda
3	Auditorium UNDIP	Jl. Pleburan
4	Wisma Candra Wulan	Jl. Beringin
5	Sasana Suka	Jl. Pemuda
6	Gedung Tri Dharma	Jl. Mataram
7	Sri Wanita	Jl. Dr. Cipto
8	Panggung Terbuka THR	Jl. Tegal Wareng
9	Balai Polisi	Jl. Pemuda
10	Panti Mandala	Jl. Atmodiriono
11	Sekolah Pelayaran Menengah	Jl. Siwalan
12	Wisma Manggala	Jl. Gajah Mada
13	Bar Dibia Puri	Jl. Pemuda
14	Shinta Room Sarinah	Jl. Pemuda
15	Troycana	Jl. Pemuda
16	Aula Kodim 0733	Jl. Pemuda
17	Aula Perhutani	Jl. Gajah Mada
18	APDN	Jl. Pemuda / Imam Bonjol

Sumber: R. Soenaryo, et al. *Mengenal Kotamadya Semarang II*. (1972). Hlm. 101.

Tempat-tempat tersebut sering digunakan untuk acara pementasan berbagai acara kesenian yang ada di Semarang, dengan tujuan untuk memperkenalkan kesenian tradisional yang cocok dengan selera masyarakat. Mereka diharapkan mendapat hiburan yang sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia. Disamping itu juga sebagai sarana rekreasi, pendidikan, dan sekaligus sebagai sarana memupuk cinta kepada kebudayaan sendiri.

Dalam bidang pendidikan khususnya pendidikan dasar, gedung-gedung sekolah yang sudah ada tidak mampu menampung lagi. Belum lagi ditambah kondisi dari beberapa gedung yang sudah tidak memenuhi syarat. Kebijakan Pemerintah Daerah dalam menangani masalah pendidikan khususnya Sekolah

Dasar ditekankan pada pembangunan gedung-gedung sekolah. Kebijakan ini berdasarkan pada realitas bahwa kebutuhan pendidikan, terutama pada prasarana gedung sekolah memang mendesak. Hal ini tidak terlepas dari meningkatnya jumlah penduduk termasuk anak-anak yang memerlukan pendidikan. Penambahan jumlah sarana gedung Sekolah Dasar secara cepat merupakan satu-satunya langkah yang harus ditempuh. Kemunduran dalam fasilitas prasarana Sekolah Dasar akan membawa pengaruh terhadap tingkat pendidikan lanjutan dan hasilnya juga akan berpengaruh terhadap kualitas budaya bangsa.

Di samping masalah penambahan bangunan Sekolah Dasar, Pemerintah Daerah telah menaruh perhatian terhadap pendidikan Taman Kanak-kanak. Khususnya terhadap pembentukan dan pertumbuhan Taman Kanak-kanak Teladan. Dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan, Pemerintah memberikan bantuan baik materi maupun fasilitas-fasilitas yang diperlukan. Kota Semarang sebagai ibukota Propinsi Jawa Tengah, disamping terdapat sekolah-sekolah TK, SD, SMP, dan sekolah-sekolah lanjutan baik umum maupun kejuruan, juga terdapat beberapa akademi dan perguruan tinggi baik negeri maupun swasta.⁵⁶ Khususnya untuk sekolah lanjutan dan perguruan tinggi, pemerintah Daerah memberikan bimbingan dalam rangka menanggulangi masalah kenakalan remaja. Gejala-gejala merosotnya moral serta perselisihan politik antara organisasi massa yang satu dengan yang lain selalu timbul dalam lingkungan pendidikan.

⁵⁶ *Ibid.*, hlm. 101-109.

Pada masa Demokrasi terpimpin segala sesuatu yang menyangkut masalah kenegaraan telah diatur oleh pemerintah baik masalah politik, ekonomi, sosial, dan budaya yang menyangkut kreasi seni dan selera hiburan.⁵⁷ Sementara itu PKI melalui organisasi-organisasi massanya yang berada di bawah naungannya selalu meningkatkan pertentangan dalam masyarakat. Mereka mencari kesempatan terhadap kondisi budaya yang ada dengan memperkeruh suasana. Aksi-aksi mereka dengan cara mengkampanyekan anti terhadap segala unsur kebudayaan yang datang dari barat.⁵⁸ Misalnya adanya kesenangan anak-anak muda terhadap musik barat khususnya gaya musik The Beatles dilarang. Demikian juga terhadap kelompok Band Bersaudara yang pernah ditahan gara-gara kelompok band tersebut menyanyikan lagu-lagu yang berorientasi ke barat. Mereka juga dituduh telah ikut menyebarkan budaya Nekolin.⁵⁹

Untuk meningkatkan kampanye anti budaya barat, PKI mendirikan organisasi yaitu “Lekra” atau Lembaga Kebudayaan Rakyat yang didirikan pada tanggal 17 Agustus 1950.⁶⁰ melalui Lekra ini sasarannya dengan menyusupkan atau menginfiltrasikan mental Komunis ke dalam jiwa bangsa Indonesia. Sebagai contoh dari kreasi seniman-seniman Komunis yang tergabung dalam Lekra, setiap orang yang membaca dan mendengar bahwa keasi mereka itu menimbulkan rasa

⁵⁷ Sartono Kartodirdjo, et al. *Sejarah Nasional Indonesia IV*. (Jakarta: P&K, 1977), hlm. 104.

⁵⁸ Cristianto Wibisono, et al. *Pemuda Indonesia dalam Dimensi Sejarah Perjuangan Bangsa*. (Jakarta: Kurnia Era, 1982), hlm. 46.

⁵⁹ *Ibid.*, hlm. 46.

⁶⁰ Bakri Siregar. “Telah Lahir Suatu Angkatan: Sebuah Tinjauan Sastra”, dalam *Prisma*. No. 2. Februari 1980. hlm. 40.

benci yang ditujukan kepada alat-alat negara dan revolusi.⁶¹ Lembaga ini mempunyai pandangan “seni untuk rakyat”. Menurut Pramoedya adalah mempraktekkan sosialisme di bidang kreasi sastra. Humanisme adalah humanisme proletar, sebagai lawan humanisme barat atau humanisme universal.⁶² Dalam bidang pendidikan sesuai dengan semboyan PKI “Politik adalah panglima”, sebab tanpa politik kebudayaan dan sastra tidak dapat menentukan haluan yang besar.⁶³ Seluruh kehidupan masyarakat diusahakan untuk berada di bawah dominasi politiknya. Usaha PKI untuk memasukkan pengaruhnya di bidang pendidikan dimulai dari Taman Kanak-kanak sampai dengan perguruan tinggi.⁶⁴

D. Keadaan Sosial Politik

Perubahan sistem politik dari satu partai menjadi multi partai adalah usul yang diajukan oleh Badan Pekerja Komite Nasional Pusat. Perubahan ini didasarkan pada kondisi masyarakat yang majemuk. Kemajemukan masyarakat dapat dilihat dengan adanya bermacam-macam perbedaan sosial seperti ras, suku,

⁶¹ Lihat sajak “Bojolali” yang merupakan corak dan watak khas kreasi-kreasi dari para seniman-seniman yang tergabung dalam Lekra, dalam Anonim. *Ungkapan Fakta-fakta Sekitar G 30 S di Jateng*. (Semarang: Angkatan Darat Kodam VII/Diponegoro, 1965), hlm. 13-17.

⁶² Anonim. *Rangkaian Peristiwa Pemberontakan Komunis di Indonesia 1926-1948-1965*. (Jakarta: Lembaga Studi Ilmu-ilmu Kemasyarakatan, 1988), hlm. 46.

⁶³ *Ibid.*, hlm. 47.

⁶⁴ Hal ini dapat dilihat bahwa setelah terjadinya pemberontakan G 30 S / PKI 1965, berdasarkan instruksi dari Perwakilan Departemen PDK/Inspeksi Daerah Pendidikan Dasar/Persekolahan Dati I Jateng yang merealisir Instruksi Papehrada Dati I Jateng tentang pembekuan SD/TK yang diasuh Baperki. Di samping itu adanya seruan dari menteri PTIP Brigjen. Dr. Syarif Thayeb untuk menutup sementara Lembaga Perguruan Tinggi Swasta antara lain Universitas Res Publika.

agama, atau status. Dengan adanya kemajemukan masyarakat seperti ini, maka golongan-golongan dalam masyarakat akan lebih cenderung untuk menyalurkan loyalitasnya ke organisasi yang sesuai dengan ikatan primordialnya dari pada bergabung dengan kelompok-kelompok lain yang berbeda orientasinya.⁶⁵ Adanya perbedaan seperti itu mendorong berdirinya berbagai partai politik.

Berdasarkan UU No. 7 tahun 1953 bahwa pemilihan umum yang diadakan pada tanggal 22 Agustus 1955, untuk memilih anggota-anggota konstituante, sedangkan pada tanggal 29 September 1955 untuk memilih anggota-anggota DPR.⁶⁶ Partai-partai politik yang ada pada waktu itu telah mempersiapkan agar partainya menang dalam pemilihan umum 1955. suasana dalam rangka kampanye partai-partai politik selalu menonjolkan jasa-jasanya sendiri dan mengagungkan pimpinan mereka. Ini mengakibatkan timbulnya peruncingan dan pertentangan dalam masyarakat dan keadaan seperti ini terus bertahan hingga masa sesudah pemilihan umum.⁶⁷

Ternyata dari hasil pemilihan umum yang dilaksanakan pada tahun 1955, tidak ada satu partai politik yang dapat menguasai suara mayoritas dalam DPR. Di samping itu dari pemilihan umum yang telah diselenggarakan mempunyai akibat tetap berlakunya sistem banyak partai. Memang ada perubahan imbang wakil

⁶⁵ Miriam Budiardjo (ed). *Partisipasi dan Partai Politik, sebuah Bunga Rampai*. (Jakarta: PT Gramedia, 1981), hlm. 25-26.

⁶⁶ R. Wiyono. *Organisasi Kekuatan Sosial Politik di Indonesia*. (Bandung: Alumni, 1982), hlm. 24-25.

⁶⁷ Miriam Budiardjo. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. (Jakarta: PT Gramedia, 1981), hlm. 205.

dalam DPR dengan tampilnya empat partai yaitu PNI, Masyumi, NU, dan PKI.⁶⁸ Pada perkembangannya ternyata masih banyak terjadi konflik-konflik antar partai, sehingga pada masa Demokrasi liberal membuktikan seperti terlihat pada jatuh bangunnya kabinet.

Pada pelaksanaan Demokrasi Terpimpin dalam rangka kembali ke UUD 1945 yaitu penyederhanaan keadaan kepartaian, dengan tujuan untuk mengurangi jumlah partai politik, kemudian dikeluarkannya Penpres No. 7 tahun 1959 tentang syarat-syarat dan penyederhanaan kepartaian. Dalam Penpres tersebut ditentukan bahwa Maklumat Pemerintah tanggal 3 Nopember 1945 dinyatakan tidak berlaku. Hal ini disebabkan dengan berdirinya banyak partai politik ternyata tidak berhasil mencapai stabilitas politik, sehingga membahayakan persatuan dan kesatuan bangsa.⁶⁹ Berdasarkan Penpres No. 7 tahun 1959 dan Penpres No. 13 tahun 1959, pemerintah telah mengambil keputusan. Keputusan tersebut adalah Keppres No. 200 tahun 1960 telah dibubarkan Partai Masyumi. Keppres No. 201 tahun 1960 telah dibubarkan Partai sosialis Indonesia atau PSI, sedangkan partai-partai yang diakui, berdasarkan Keppres no 128 tahun 1961 yaitu Partai Nasional Indonesia atau PNI, Nahdhatul Ulama atau NU, Partai Komunis Indonesia atau PKI, Partai Katholik, Partai Indonesia atau Partindo, Partai Murba, Partai Syarikat Islam Indonesia atau PSII Arudji, dan ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia atau IPKI. Dengan Keppres No. 440 tahun 1961 telah diakui pula sebagai partai politik

⁶⁸ R. Wiyono. *op.cit.*, hlm. 25.

⁶⁹ *Ibid.*

yaitu Partai Kristen Indonesia atau Parkindo dan Partai Persatuan Tarbiyah Islamiyah atau Perti.⁷⁰

Perkembangan politik di Semarang tentunya tidak jauh berbeda dengan perkembangan politik pada tingkat nasional. Setelah diadakan pemilihan umum yang pertama tahun 1955 susunan DPRD Tingkat I Jawa Tengah, dengan menempatkan H. Imam Sofwan dan Soemarjo sebagai ketua dan wakil ketua. Pada masa timbulnya Nasakom ditambah lagi dengan seorang wakil ketua yaitu Musajib Adiwinoto.⁷¹ Pada tanggal 6 Nopember 1960 terjadi perubahan keanggotaan DPRD yaitu dengan terbentuknya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong Royong maka jumlah anggotanya ada 35 orang. Terdiri dari wakil-wakil partai politik, wakil tani, wakil kerohaniawan, wakil dari gabungan pembangunan dan ABRI. Sebagai walikotanya yaitu RMS. Tjondro Koesoemo yang mengakhiri masa tugas tanggal 10 juni 1964, kemudian diganti Wuryanto SH yang menjabat sampai dengan 1 Juni 1966. dengan meletusnya peristiwa G 30 S, maka anggota-anggota DPRD Gotong Royong dan sebagian anggota Badan Pemerintah Harian mengalami perubahan-perubahan. Anggota-anggota yang berasal dari organisasi politik PKI dan organisasi massanya diganti.⁷²

Setelah berlangsungnya Pemilihan Umum pada tanggal 29 September 1955 dan tanggal 15 Desember 1955, maka pada tanggal 1 Maret 1956 Panitia

⁷⁰ *Ibid.*, hlm. 29-30.

⁷¹ Ismail. *Wawasan Jatidiri dalam Pembangunan Daerah*. (Semarang: Effhar dan Dhahara Prize, 1989), hlm. 25.

⁷² R. Soenaryo. *loc.cit.*,

Pemilihan Indonesia mengumumkan hasil pemilihan umum. Bagi wilayah kota Semarang hasil pemilu dapat dilihat dari tabel berikut ini.

Tabel 3. Hasil Pemungutan Suara Tahun 1955 Untuk Anggota DPR Di Tiap-tiap Kecamatan Kota Semarang

No.	Partai	Semarang					Jumlah
		Barat	Selatan	Timur	Utara	Tengah	
1	PKI	20.529	11.268	23.713	25.030	16.549	97.152
2	PNI	4.669	4.050	5.049	4.734	2.983	21.485
3	NU	4.734	1.433	4.193	4.641	3.912	18.913
4	Baperki	999	199	1.308	4.437	4.536	11.399
5	Masyumi	1.939	579	825	1.798	1.266	6.407
6	Partai Katholik	639	1.157	785	428	629	3.638
7	Persatuan Pegawai Polisi RI.	756	615	629	478	903	3.383

(Sumber: Jawatan Penerangan Kota Semarang tahun 1956)

Pada tabel di atas nampak bahwa suara yang diperoleh Partai Komunis Indonesia (PKI) di wilayah Kecamatan Semarang Utara lebih unggul dibandingkan dengan wilayah di kecamatan-kecamatan lain. Hal ini bisa disebabkan karena letak kecamatan ini di sepanjang pesisir pantai utara Jawa dan dekat dengan pelabuhan yang mayoritas penduduknya bermata pencaharian sebagai nelayan dan buruh pelabuhan.⁷³ Dua golongan inilah yang merupakan pendukung terbesar bagi kemenangan PKI pada pemilihan umum untuk anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Sementara itu hasil pemilu untuk anggota konstituante lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini.

⁷³ *Suara Merdeka*, tanggal 1 Maret 1956.

Tabel 4. Hasil Pemungutan Suara Tahun 1955 Untuk Konstituante Di Tiap-Tiap Kecamatan Kota Semarang.

No.	Partai	Semarang					Jumlah
		Barat	Selatan	Timur	Utara	Tengah	
1	PKI	19.298	10.830	22.557	24.101	15.386	92.172
2	PNI	6.001	5.140	6.530	5.964	3.984	27.619
3	NU	4.798	1.607	4.182	4.681	4.024	19.292
4	Baperki	969	125	1.234	4.189	4.126	10.543
5	Masyumi	1.878	590	773	1.784	1.202	6.227
6	Partai Katholik	1.112	633	392	615	-	3.479
7	Parkindo	983	353	336	492	723	2.887
8	Persatuan Pegawai Polisi RI.	617	663	361	596	487	2.724

(Sumber: Jawatan Penerangan Kota Semarang tahun 1956)

Suara yang diperoleh Partai Komunis Indonesia (PKI) pada pemilu untuk anggota Konstituante mengalami penurunan, tapi secara mayoritas dibandingkan dengan partai-partai yang lain PKI tetap menang mutlak. Perbandingan hasil pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Konstituante antar parpol dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 5. Tabel Perbandingan Hasil Pemungutan Suara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dengan Konstituante Di Kota Semarang.

No.	Partai	DPR	Konstituante
1	PKI	97.152	92.172
2	PNI	21.485	27.619
3	NU	18.913	19.292
4	Baperki	11.399	10.543
5	Masyumi	6.407	6.227

(Sumber: Jawatan Penerangan Kota Semarang tahun 1956)

Dari tabel di atas nampak hasil pemilu secara keseluruhan baik untuk DPR maupun Konstituante, PKI lebih unggul dibandingkan dengan partai lainnya. Setelah meletus peristiwa Madiun, kebangkitan PKI mengalami puncaknya pada pemilihan umum 1955. Berdasarkan hasil pemilihan umum yang diumumkan oleh Panitia Pemilihan Indonesia, PKI ternyata menjadi partai politik yang mendominasi pemilu dan menjadi pilihan utama bagi sebagian besar masyarakat kota Semarang.

Jumlah kursi keseluruhan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Peralihan dalam wilayah kota Semarang dua puluh lima kursi. Partai Komunis Indonesia (PKI) mendapat 14 (empat belas) kursi, Partai Nasional Indonesia (PNI) mendapat 3 (tiga) kursi, Nahdatul Ulama (NU) mendapat 3 (tiga) kursi, Badan Permusyawaratan Kewarganegaraan Indonesia (Baperki) memperoleh 2 (dua) kursi. Sementara itu Majelis Syuro Muslimin Indonesia (Masyumi), Partai Katholik, dan Persatuan Pegawai Polisi Republik Indonesia (PP3RI) memperoleh jatah kursi dalam Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Peralihan masing-masing memperoleh 1 (satu) kursi.⁷⁴

Pada akhirnya pemilu tahun 1955 menunjukkan bahwa Partai Komunis Indonesia (PKI) di wilayah kota Semarang memperoleh kemenangan mutlak dan berakibat pada kuatnya kedudukan Partai Komunis Indonesia pada parlemen daerah (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Peralihan Kota Semarang).

⁷⁴ Agar lebih jelasnya lihat Lampiran C tentang jumlah kursi DPRD peralihan di kota Semarang.

Setelah pemilihan umum, Gerwani sebagai salah satu organisasi berbasis massa yang mempunyai hubungan erat dengan PKI mengalami perkembangan yang signifikan. Pimpinan pusat Gerwani dapat mencurahkan tenaganya lebih besar kepada masalah pendidikan aktivis organisasi. Gerwani makin teguh mengambil posisi yang hakikatnya humanistik, yang dirumuskannya secara sosialis konstruktivis, yaitu bahwa kita semua manusia, sebagai buruh dan tani, mempunyai masalah sosial politik yang sama. Gerwani juga semakin teguh mengambil pendirian yang hakikatnya keperempuanan, yaitu bahwa kita semua adalah ibu dan istri. Dengan demikian terkait dengan soal-soal susila, anak, dan pangan. Pada kedua pendirian itulah, antara pimpinan pusat dan kader daerah dapat berbeda dalam menentukan prioritas. Gerwani memandang kombinasi antara dua pendirian itu sebagai keunggulannya terhadap ideologi organisasi perempuan lainnya.⁷⁵

Pada tahun 1964 pemerintah menginstruksikan semua ormas agar mencari *gandulan* masing-masing pada suatu partai politik. Ketika suasana politik semakin tegang, pimpinan Gerwani telah menyatakan posisi organisasi yang ada dalam kubu Komunis. Pernyataan yang dimaksud baru akan dirumuskan pada Kongres V. Sementara itu, pada bulan September 1965, saat persiapan Kongres V terus berjalan, di Surabaya dilancarkan demonstrasi besar-besaran menuntut penurunan harga yang diikuti ribuan kaum perempuan.⁷⁶ Kemudian pada malam hari tanggal 30 September 1965 atau dini hari tanggal 1 Oktober 1965 terjadilah peristiwa kup

⁷⁵ Saskia E. Wierenga, *Penghancuran Gerakan Perempuan di Indonesia* (Jakarta: Garba Budaya, 1999), hlm. 345.

⁷⁶ *Ibid.*, hlm. 342.

yang lebih dikenal dengan Gerakan September Tiga Puluh (Gestapu) atau Gerakan Satu Oktober (Gestok) atau G 30 S/ PKI (menurut versi pemerintah orde baru), yang sampai sekarang masih menjadi teka-teki dan kontroversi. Akhirnya, dengan terjadinya peristiwa tersebut maka berakhir pula kisah perjuangan Gerwani.

BAB III

GERWANI SEBAGAI ORGANISASI SOSIAL POLITIK DI INDONESIA

A. Perkembangan Pergerakan Wanita di Indonesia

Dalam perjalanan sejarah, wanita pernah menjadi aktor yang vokal ditengah gelanggang politik dan sekaligus menjadi ibu dan istri yang “baik” selama perjuangan anti kolonial. Dua peranan ini dapat berpadu dalam praktiknya, karena wanita harus memainkan peranan politik justru agar supaya menjadi ibu yang baik (dari rakyat dan bangsa Indonesia), dan istri yang baik (sebagai pembantu laki-laki dalam perjuangannya). Hubungan politik antara wanita dan laki-laki menjadi berubah secara mendasar ketika Indonesia telah merdeka. Hal itu antara lain karena tidak adanya lagi musuh bersama, sehingga laki-laki cenderung mengklaim bidang politik sebagai bidang mereka sendiri, dan wanita lebih diposisikan untuk berperan di bidang sosial.⁷⁷ Berikut ini akan dibahas perkembangan pergerakan wanita di Indonesia, terutama peranan politik mereka dalam menghadapi kekuatan kolonial dan menegakkan kedaulatan negara Republik Indonesia sebagai negara merdeka.

⁷⁷ Saskia E. Wierenga, *Penghancuran Gerakan Perempuan di Indonesia* (Jakarta: Garba Budaya, 1999), hlm. 222-223.

1. Periode Kolonial: Dari Sosial Budaya Menuju Politik

Dalam sejarah Indonesia, perjuangan wanita sudah muncul sejak abad ke – 19, seiring dengan berkembangnya gerakan-gerakan politik masyarakat dalam menghadapi kekangan kolonial. Sebut saja dalam gerakan itu seperti Christina Martha Tiahahu dari Maluku pada tahun 1817-1819; Nyi Ageng Serang dari Jawa Tengah pada sekitar pertengahan abad XIX; Cut Nyak Dien dan Cut Meutia di dalam perang Aceh tahun 1873-1904; dan juga RA Kartini tahun 1879-1904; Dewi Sartika 1884-1947; Maria Walenda Maramis tahun 1872-1924, Nyi Ahmad Dahlan tahun 1872-1936, Rasuna Said 1901-1965.⁷⁸ Namun masa yang amat penting dan menjadi titik balik dari perjuangan gerakan wanita tersebut adalah pada tahun 1928. Saat ketika diadakan Kongres Perempuan yang pertama di Yogyakarta, dan Soekarno yang kemudian menjadi presiden Republik Indonesia, memberikan kata sambutan.⁷⁹

RA. Kartini umumnya disebut-sebut sebagai salah seorang di antara tokoh-tokoh terkemuka wanita feminis dari zamannya, dan ia memang tokoh feminis dari masa awal yang paling terkenal. Kartini (1879-1904) adalah anak kedua (wanita) dari Bupati Jepara, sebuah daerah di pantai utara Jawa. Ayahnya seorang yang berpikiran maju, karenanya mengizinkan anak-anak wanitanya mengikuti pendidikan sekolah dasar bersama-sama dengan kakak-kakak mereka. Suatu hal

⁷⁸ Ryadi Gunawan, *“Dimensi-Dimensi Perjuangan Kaum Perempuan Indonesia dalam Persepektif Sejarah”*, Yogyakarta: tahun 1991. Dipetik dalam Fauzi Ridjal, dkk, *“Dinamika Gerakan Perempuan di Indonesia”*, Yoyakarta: PT Tiara Wacana, 1993, hlm. 100.

⁷⁹ <http://acehmarxist.wordpress.com/2007/12/13/%e2%80%9cSepintas gerakan wanita Indonesia dalam perkembangan sejarah/html>. Dikunjungi pada tanggal 27 Agustus 2008 pukul 03.00.

yang luar biasa untuk zaman itu. Walaupun Kartini sangat ingin meneruskan sekolahnya sesudah memasuki masa remajanya, seperti halnya kakak-kakaknya, yang salah seorang di antaranya bahkan belajar di Universitas Leiden, Negeri Belanda, ia justru dimasukkan ke pingitan “kurungan emas,” demikian ia menyebut istana ayahnya di dalam salah satu suratnya. Begitulah adat-istiadat bagi gadis-gadis bangsawan zaman itu. Di dalam pingitan itu, sambil menunggu saat dikawinkan dengan laki-laki yang mungkin belum pernah dilihat sebelumnya.⁸⁰

Kartini memulai surat-menyuratnya yang luar biasa dengan beberapa tokoh, termasuk seorang feminis Belanda yaitu Stella Zeehandelaar. Di dalam surat-suratnya ini yang sering merupakan luapan amarah terhadap segala keadaan yang mengungkung kebebasan geraknya, dan yang menghalangi dirinya dari perjuangan sepenuhnya untuk kepentingan dan emansipasi rakyat Jawa pada umumnya, dan wanita Jawa pada khususnya. Bahkan dari surat-suratnya dapat diketahui bahwa ia pernah berangan-angan untuk tidak kawin, mandiri, dan ingin meruntuhkan tembok feodalisme. Ia merumuskan gagasan-gagasannya, yang unsur-unsur pokoknya adalah sebagai berikut: ia memandang pendidikan bagi kaum wanita sebagai salah satu syarat penting untuk memajukan rakyatnya. Dalam pandangannya, ibu yang terpelajar bisa diharapkan kemampuannya dalam mendidik anak-anak lebih baik, tidak hanya wanita kalangan miskin, wanita kalangan atas pun harus diberi kesempatan menjadi pencari nafkah sendiri, dan mencari pekerjaan yang cocok bagi mereka, misalnya menjadi perawat, bidan, dan

⁸⁰ Armijn Pane, *Habis Gelap Terbitlah Terang* (Jakarta: Balai Pustaka, 1949), hlm. 9.

guru. Poligami harus dihapuskan karena merendahkan martabat kaum wanita. Buah pikiran Kartini sangat terkenal juga di luar negeri. “*Van Duisternis tot Licht*” (Habis Gelap terbitlah Terang) memuat surat-surat Kartini yang berisi cita-citanya untuk kemajuan dan memajukan kaumnya. Kartini berpendapat bahwa untuk mengatasi keterbelakangan kaum wanita terutama ialah melalui jalur pendidikan, karena hal itu memungkinkan tumbuhnya kesadaran masyarakat akan adanya ketimpangan-ketimpangan, keterbelakangan, ketidakadilan dan penghisapan. Pendidikan yang diberikan kepada kaum wanita pada waktu itu cukup pengetahuan dasar berhitung, baca-tulis, ketrampilan kerumahtanggaan dan pendidikan guru. Pendidikan bagi pribumi mengakibatkan terbukanya fikiran dan wawasan yang menumbuhkan kesadaran untuk makin maju, dan dengan demikian mendorong untuk bergerak berjuang demi kemajuan kaum dan bangsanya.⁸¹

Kartini bukanlah satu-satunya wanita yang berjuang untuk pendidikan kaum wanita pada zamannya. Beberapa butir dari cita-cita wanita yang dinamis, dan dalam banyak hal juga berjiwa pemberontak ini, diikuti oleh tokoh-tokoh wanita lainnya, terutama cita-citanya tentang pendidikan bagi kaum wanita. Di Jawa Barat, Dewi Sartika menyebarkan pandangan yang sama, dan di daerah Minangkabau, Sumatra Barat, Rohana Kudus berbuat serupa pula. Meskipun demikian Kartini yang menjadi simbol gerakan wanita Indonesia. Bahkan dapat dikatakan bahwa Kartini merupakan tokoh perintis pergerakan nasional. Dapat dilihat dalam banyak suratnya kepada para sahabatnya, ia berkali-kali mengajak

⁸¹ Yety Rochwulaningsih, et al. *Peranan Wanita Jawa Tengah Dalam Perjuangan Bangsa Indonesia Abad XX* (Museum Negeri Provinsi Jawa Tengah “Ronggowarsito”, 1996), hlm. 48-84.

seluruh bangsa bumiputera untuk bangun dan memasuki “jaman baru”. Oleh karena itu tidak mengherankan jika hari lahirnya, 21 April, selalu dirayakan oleh organisasi-organisasi wanita dewasa ini. Adanya kaum wanita di sekolah-sekolah, universitas-universitas, atau angkatan bersenjata, biasanya disebut-sebut sebagai bukti tentang taraf emansipasi yang telah dicapai oleh wanita Indonesia. Pada tahun 1964 Kartini dinyatakan sebagai “Pahlawan Nasional”. Dalam kenyataannya kepahlawanan Kartini tersebut juga diakui oleh bangsa-bangsa lain.⁸²

Para tokoh Perintis gerakan wanita belum mempunyai perkumpulan atau organisasi wanita, dengan kata lain berjuang orang perorangan; tetapi dalam kenyataan bahwa mereka mengangkat senjata bahu membahu dengan kaum laki-laki melawan penjajah Belanda, tidak dapat dipungkiri bahwa mereka merupakan sumber inspirasi bagi generasi wanita berikutnya untuk berjuang melawan penindasan dan ketidakadilan. Juga para tokoh Perintis dalam masa sesudah diterapkannya Politik etis Belanda di Indonesia, memberikan teladan dan dorongan kepada kaumnya untuk meneruskan jejak langkah mereka. Mereka berjuang untuk emansipasi dan partisipasi untuk membangun kemandirian kaumnya, kemajuan bangsa dan kemerdekaan tanah airnya.

Unsur lain gerakan wanita Indonesia yang sedang tumbuh ialah hasrat untuk “emansipasi nasional.” Dalam pada itu pengaruh warisan cita-cita Kartini untuk emansipasi wanita berkumandang menembus batas-batas kamar

⁸² Sitisoemandari Soeroto, *Kartini: Sebuah Biografi* (Jakarta: Gunung Agung, 1979), hlm. 477.

pingitannya, dan perhatian kaumnya pada periode kebangkitan dan kesadaran nasional ini mulai juga untuk meningkatkan perjuangan wanita.

Pada tahun 1912 muncul organisasi wanita yang pertama di Jakarta "Putri Mardika" atas bantuan Budi Utomo. Kemudian di Jawa Tengah seperti "Pawiyatan Wanito" di Magelang yang berdiri tahun 1915, "Wanito Hadi" di Jepara tahun 1915, "Purborini" di Tegal tahun 1917, "Wanito Susilo" di Pemalang tahun 1918, "Darmo Laksmi" di Salatiga, "Karti Woro" dan "Budi Wanito" di Solo, "Wanito Kencono" di Banjarnegara, "Panti Krido Wanito" di Pekalongan, dan "Kesumo Rini" di Kudus. Selain itu juga berdiri organisasi "Wanito Rukun Santoso" di Malang, "Putri Budi Sejati" di Surabaya tahun 1919, "Wanito Mulyo" di Yogyakarta tahun 1920, "Wanito Utomo" di Yogyakarta tahun 1921, "Wanita Taman Siswa" tahun 1922, "Aisyiyah" di Yogyakarta tahun 1917, "Wanita Katholik" di Yogyakarta tahun 1924, "Jong Islamiten Bond Dames Afdeeling" di Jakarta tahun 1925.

Di pulau Sumatera berdiri organisasi pergerakan wanita antara lain "KAS" (Kerajinan Amai Setia) yang didirikan tahun 1914, "keutamaan Istri" di Medan, "Istri Sumatera", "PARMI" (Partai Muslimin Indonesia) Bagian Istri, "Persatuan Istri Andalas", dan sebagainya. Di Sulawesi berdiri organisasi-organisasi wanita antara lain "PIKAT" (Percintaan Ibu Kepada Anak Temurunnya) di Manado tahun 1917, "Sarekat Rukun Istri" di Makasar, dan sebagainya. Di Kalimantan

berdiri organisasi “Wanita Kencono”. Di Bali berdiri organisasi “Perukunan Istri Den Pasar”.⁸³

Kesemuanya, baik organisasi-organisasi bagian wanita dari organisasi partai umum, maupun organisasi-organisasi lokal kesukuan/kedaerahan bertujuan menggalakkan pendidikan dan pengajaran bagi wanita, dan perbaikan kedudukan sosial dalam perkawinan dan keluarga serta meningkatkan kecakapan sebagai ibu dan pemegang rumah tangga. Gerak kemajuan pada tahun-tahun sebelum 1920 dapat dikatakan lamban. Sebab-sebabnya ialah sangat kurangnya sekolah-sekolah untuk wanita pribumi, lagi pula kadang-kadang juga tiadanya izin dari orang tua (dikalangan atas) atau diperlukan tenaga mereka untuk membantu orang tua (dikalangan bawah). Disamping itu adat dan tradisi sangat menghambat kemajuan wanita.

Sesudah tahun 1920 jumlah organisasi wanita bertambah banyak. Kesediaan mereka untuk terlibat dalam kegiatan organisasi makin meningkat dan kecakapan berorganisasipun bertambah maju. Hal ini disebabkan karena kesempatan belajar makin meluas dan berkembang ke lapisan bawah. Dengan demikian jumlah wanita yang mampu bergerak di bidang sosial politik juga bertambah luas dan tidak lagi terbatas kepada lapisan atas saja. Oleh sebab semuanya itu, maka sesudah tahun 1920 dapat dilihat jumlah perkumpulan wanita bertambah banyak sekali, bahkan organisasi-organisasi sosial politik seperti P.K.I., S.I., Muhammadiyah dan Sarekat Ambon mempunyai bagian wanita. Bagian wanita tersebut dalam penyebaran cita-cita tentu saja mempertinggi hal-

⁸³ KOWANI, *Sejarah Setengah Abad Pergerakan Wanita Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1978), hlm. 16-24.

hal yang khusus mengenai kewanitaan.⁸⁴

Kemajuan gerakan wanita sesudah tahun 1920, terlihat juga dengan makin banyaknya perkumpulan-perkumpulan wanita kecil-kecil yang berdiri sendiri. Hampir di semua tempat terutama kota-kota terdapat perkumpulan wanita. Seperti pada masa sebelum 1920, perkumpulan-perkumpulan itu mempunyai tujuan yang sama, ialah untuk belajar masalah kepandaian putri yang khusus dan berperan dalam kehidupan sosial kemasyarakatan.

Menjelang tahun 1928, organisasi wanita berkembang lebih pesat. Sikap yang dinyatakan oleh organisasi-organisasi wanita pada waktu itu, umumnya lebih tegas, berani dan terbuka. Perkembangan kearah politik makin tampak, terutama yang menjadi bagian dari S.I. (Sarekat- Islam), P.K.I. (Partai Komunis Indonesia), P.N.I. (Partai Nasional Indonesia) dan PERMI (Persatuan Muslimin Indonesia).

Walaupun masing-masing organisasi yang bersifat kedaerahan dan keagamaan ini mempunyai masalah dan kegiatan sendiri-sendiri, juga ada beberapa kesamaan kepentingan yang didukung kebanyakan organisasi. Peranan seorang istri dan ibu “yang baik” sangat diutamakan, dan agar bisa mengemban tugasnya dengan baik kaum wanita dianjurkan untuk memperoleh pendidikan yang baik, dan mempelajari keterampilan yang sangat diperlukan seperti menjahit pakaian dan mengasuh anak. Akan tetapi organisasi-organisasi wanita Kristen dan “non-agama” di satu pihak, dan organisasi-organisasi wanita Islam di pihak lain, dipisahkan sangat dalam dan menentukan oleh masalah sentral: poligami.

⁸⁴ <http://acehmarxist.wordpress.com/2007/12/13/%e2%80%9cSepintas gerakan wanita Indonesia dalam perkembangan sejarah/html>. Dikunjungi pada tanggal 27 Agustus 2008 pukul 03.00.

Organisasi wanita Kristen dan non-agama memandang poligini sebagai penghinaan terhadap kaum wanita yang tidak bisa dimaafkan, dan justru karena itulah mereka aktif berjuang melawannya, sementara organisasi-organisasi wanita Islam hanya menginginkan perbaikan kondisi di dalam poligami, bukan menghapuskan lembaga poligami itu sendiri.⁸⁵ Upaya-upaya untuk menyatukan gerakan wanita pun dilakukan dan hal itu antara lain tercermin dari adanya penyelenggaraan musyawarah, kongres, dan lain-lain.

2. Kongres Perempuan Indonesia

Kongres Perempuan Indonesia pertama diselenggarakan di Yogyakarta pada tanggal 22-25 Desember 1928, puncak kegiatan yang terjadi pada periode ini, dua bulan setelah Kongres Pemuda yang mengikrarkan Sumpah Pemuda. Kongres ini merupakan lembaran sejarah baru bagi gerakan wanita Indonesia, dimana organisasi wanita menggalang kerjasama untuk kemajuan wanita khususnya dan masyarakat pada umumnya. Ciri utama kesatuan pergerakan wanita Indonesia pada masa ini ialah berazaskan kebangsaan dan menjadi bagian dari pergerakan kebangsaan Indonesia. Pokok-pokok permasalahan yang dibicarakan diantaranya ialah kedudukan wanita dalam perkawinan, poligami dan koedukasi.⁸⁶

Hampir tiga puluh organisasi wanita hadir pada kongres ini. Mosi mengenai reformasi perkawinan dan pendidikan diterima. Tetapi, lagi-lagi

⁸⁵ *Ibid.*

⁸⁶ Wierenga, *op.cit.*, hlm. 129-130.

ketegangan timbul antara organisasi-organisasi wanita Islam yang menentang koedukasi (lelaki dan wanita bersekolah bersama-sama, dalam satu kelas) dan penghapusan poligami dengan organisasi-organisasi wanita nasional dan Kristen. Sebagai jalan keluar kemudian dibentuk Persatoean Perempoean Indonesia (PPI), yang merupakan federasi organisasi-organisasi wanita Indonesia. Pada tahun berikutnya di Jakarta, nama federasi ini diubah menjadi Perikatan Perhimpoean Istri Indonesia (PPII). PPII menerbitkan majalah sendiri, sangat giat di bidang pendidikan, dan membentuk panitia penghapusan perdagangan wanita dan anak-anak. Satu-satunya organisasi wanita yang tidak hadir pada sidang-sidang nasional organisasi-organisasi wanita yang tergabung dalam PPII ialah Isteri Sedar. Isteri Sedar adalah organisasi wanita yang paling radikal pada zaman itu. Organisasi ini tidak mau berkompromi mengenai masalah-masalah poligami dan perceraian, yang menimbulkan perbedaan mendalam di antara organisasi-organisasi wanita Islam dan lain-lainnya.⁸⁷

Kongres Perempuan Indonesia berikutnya diadakan di Jakarta (1935), Bandung (1938), dan Semarang (1941), dalam mana perjuangan nasional berangsur-angsur semakin menonjol. Dalam kongres 1935 terbentuklah Kongres Perempuan Indonesia (KPI), dan dengan demikian PPII dibubarkan. Perhatian tertentu ditujukan kepada kaum wanita dan golongan miskin, tetapi keanggotaan masih berasal dari lapisan atas, dan tuntutan yang disuarakan pun sebagian besar masih diarahkan pada kepentingan kaum wanita golongan atas. Pada saat pelaksanaan KPI III di Bandung pada tanggal 23-27 Juli 1938, diantaranya

⁸⁷ *Ibid.*, hlm. 131.

berhasil diputuskan bahwa tanggal 22 Desember ditetapkan sebagai Hari Ibu bagi bangsa Indonesia.⁸⁸

Walaupun sejak 1930 gerakan nasional berkembang pesat, dan terlihat pula tanda-tanda tumbuhnya nasionalisme di dalam gerakan wanita, namun sampai awal pendudukan Jepang tahun 1942, selain kaum wanita Serikat Rakyat, Isteri Sedar adalah satu-satunya organisasi yang secara terbuka dan sistematis mengecam politik pemerintah kolonial Belanda, dan memberi perhatian pada perjuangan anti-kapitalisme. Misalnya, pada kongresnya tahun 1932, dalam mana Sukarno yang di kemudian hari menjadi presiden mengucapkan pidatonya yang berjudul “Gerakan Politik dan Emansipasi Wanita,” Isteri Sedar menyatakan bahwa wanita Indonesia harus memainkan peranan aktif di bidang politik. Hal itu didasarkan pemikiran, bahwa “hanya Indonesia yang merdeka oleh usaha besar-besaran kaum laki-laki dan wanita yang bersatu padu yang akan sanggup memberikan persamaan hak dan tindakan kepada rakyat Indonesia”. Selain itu Isteri Sedar juga menyatakan bahwa nasib kaum wanita proletar harus diperbaiki.⁸⁹ Istri Sedar berjuang untuk kemerdekaan Indonesia di mana penghargaan dan kedudukan wanita dan laki-laki sama dan sejajar. Organisasi ini juga bersikap kritis terhadap norma-norma adat, tradisi dan agama yang pada prakteknya merugikan kaum wanita. Istri Sedar bersikap anti dan selalu dengan pedas menyerang imperialisme dan kolonialisme.

⁸⁸ KOWANI, *Sejarah Setengah Abad Pergerakan Wanita Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1978), hlm. 45-55.

⁸⁹ A.K. Pringgodigdo, *Sejarah Pergerakan Rakyat Indonesia* (Jakarta: PT. Dian Rakyat, 1967), hlm. 167.

Pada bulan Juni 1932 beberapa organisasi yang tidak berazaskan agama bergabung menjadi satu dengan nama Istri Indonesia (II) yang memperjuangkan Indonesia merdeka dengan dasar demokrasi. Organisasi baru ini giat berusaha agar wanita bisa duduk dalam dewan-dewan kota, selain juga memperhatikan masalah perkawinan dan perceraian yang pada waktu itu pengaturannya banyak merugikan kaum wanita.⁹⁰

Selain organisasi-organisasi tersebut diatas, mulai muncul juga organisasi yang anggotanya terdiri atas para wanita yang bekerja di luar rumah. Demikianlah untuk pertama kali dibentuk di Jakarta pada tahun 1940 "Perkumpulan Pekerja Perempuan Indonesia" yang beranggotakan para wanita yang bekerja di kantor baik pemerintah ataupun swasta sebagai guru, perawat, pegawai kantor, dan sebagainya. Namun, dilihat dari kegiatannya, organisasi organisasi tersebut belum dapat dikatakan sebagai organisasi profesi, karena pada umumnya kegiatan mereka ditekankan pada pendidikan ketrampilan kewanitaan dan pemupukan kesadaran kebangsaan, tidak beda dengan kegiatan yang dilakukan oleh organisasi-organisasi wanita lainnya.⁹¹

Dalam rangka menyelesaikan masalah reformasi perkawinan yang pelik itu pada tahun 1939 dibentuk sebuah badan yang bertugas meneliti hak-hak wanita dalam perkawinan, baik menurut adat, hukum Islam (*fiqh*), maupun hukum Eropa. Namun sebelum badan ini berhasil membuahkan sesuatu dalam rangka pembuatan

⁹⁰ Yety Rochwulaningsih, et al., *Peranan Wanita Jawa Tengah Dalam Perjuangan Bangsa Indonesia Abad XX* (Museum Negeri Provinsi Jawa Tengah "Ronggowarsito", 1996), hlm. 43.

⁹¹ Wierenga, *op.cit*, hlm. 141.

kompromi antara golongan Islam dan bukan Islam, pada 1942 Indonesia diduduki oleh Jepang. Semasa pendudukan Jepang semua organisasi wanita Indonesia dilarang.

Taktik Jepang dalam merangkul bangsa Indonesia dapat dikemukakan sebagai berikut:

1. Bahasa Belanda dilarang dan bahasa Indonesia secara resmi digunakan sebagai bahasa komunikasi umum.
2. Sistem sekolah Belanda seperti ELS, HIS, HCS dan lainnya dibubarkan, dan diganti dengan sekolah Rakyat 6 tahun, SMP, SMA dan sekolah Guru dan kejuruan.

Penguasa baru mendirikan organisasi umum yang bernama “Tiga A” pada bulan April 1942, dengan bagian wanita yang sudah menikah bernama “Gerakan Istri Tiga A”, sedangkan bagian wanita yang belum menikah disebut “Barisan Putri Asia Raya”. Gerakan Tiga A tidak berumur panjang, karena pada bulan Maret 1943 digantikan oleh organisasi “PUTERA” (Pusat Tenaga Rakyat) yang bagian wanitanya Barisan Pekerja Perempuan Putera.⁹²

Hanya satu organisasi wanita di bawah kekuasaan Jepang yang diizinkan hidup, yaitu Fujinkai yang dibentuk di daerah-daerah dengan ketuanya istri masing-masing kepala daerah. Kegiatan organisasi ini adalah di bidang pemberantasan buta huruf dan berbagai pekerjaan sosial. Mereka yang giat di dalam Fujinkai ini terutama adalah para istri pegawai negeri. Seperti halnya organisasi-organisasi wanita sekarang, Dharma Wanita dan Dharma Pertiwi,

⁹² Wierenga, *op.cit.*, hlm. 145-148.

Fujinkai melakukan kegiatan dalam hirarki yang sejalan dengan hirarki suami. Di kalangan kaum wanita, para anggota Fujinkai harus mempropagandakan cita-cita Jepang tentang “Asia Raya” di bawah pimpinan Dai Nippon. Fujinkai adalah salah satu di antara organ-organ yang digunakan Jepang untuk mengarahkan rakyat Indonesia bekerja “suka-rela” demi kemenangan “perang suci” mereka.

Ketika Putera akhirnya dilebur dalam organisasi baru “Jawa HOKOKAI” (Himpunan Kebaktian Rakyat Jawa), maka Fujinkai dijadikan bagian wanitanya dengan cabang-cabang di daerah-daerah. Kegiatan Fujinkai dibatasi hanya pada urusan-urusan kewanitaan dan peningkatan ketrampilan domestik selain kegiatan menghibur tentara yang sakit dan kursus buta huruf. Bagi para wanita yang mempunyai wawasan luas, pembatasan ini merisaukan dan mereka tidak ikut masuk Fujinkai. Kenyataan ini menjadikan adanya dua jenis orientasi di kalangan aktivis wanita yaitu mereka yang berkooperasi dengan pemerintah Balatentara *Dai Nippon* dan yang non-kooperatif serta memilih bergerak diam-diam dibawah tanah. Gerakan nasional, termasuk beberapa organisasi wanita, antara lain Gerakan Wanita Sosialis (GWS), sebagian bergerak di bawah tanah. Banyak kaum nasionalis, termasuk yang wanita, ditangkap dan dibunuh.⁹³

Tentara pendudukan Jepang juga membentuk pasukan tempur wanita yang disebut “Barisan Srikandi” yang anggotanya terdiri atas anak-anak gadis berumur antara 15-20 tahun dan belum menikah. Mereka dilatih pelatihan kemiliteran untuk dapat maju ke medan perang membela Jepang, sewaktu-waktu bilamana dibutuhkan. Kemudian masih ada latihan-latihan militer bagi para gadis Indonesia

⁹³ *Ibid.*, hlm. 149-150.

bernama “*Sementai*”. Untuk pemudanya bernama “*Seizendang*”. Gerak badan atau “*Taigo*” sangat digalakkan. Latihan kemiliteran di “*Seisendo*” juga diajarkan untuk menggunakan senjata.⁹⁴ Latihan –latihan kemiliteran yang diberikan Jepang ternyata dikemudian hari ada manfaatnya dalam perjuangan rakyat Indonesia merebut kemerdekaan tanah air. Pada pokoknya, seluruh kehidupan masyarakat Indonesia dimiliterisir untuk kepentingan ekonomi perang Jepang dan untuk memperkuat angkatan perangnya dengan melatih tenaga-tenaga cadangan untuk dimobilisasi sewaktu-waktu dibutuhkan. Pada periode ini, sifat gerakan wanita mengalami kemunduran, karena organisasi wanita hanya boleh berdiri bila ada komando dari penguasa. Sesudah Jepang kalah, dan proklamasi kemerdekaan Indonesia tahun 1945, Belanda berusaha merebut kembali kepulauan Indonesia.

3. Setelah proklamasi (1946) sampai tahun 1950

Perang kemerdekaan yang sengit terjadi, yang berkesudahan dengan kekalahan Belanda pada tahun 1949. Seperti dalam kebanyakan perjuangan kemerdekaan nasional, para laki-laki pemimpin nasional giat mencari dukungan dari kalangan wanita. Lalu timbullah perhatian pada masalah-masalah wanita yang belum pernah terjadi sebelumnya. Di dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia yang baru lahir itu (1945); kaum wanita dijamin hak-hak hukum dan politiknya sama seperti kaum laki-laki. Kaum wanita pun berhimpun menyokong cita-cita perjuangan nasional. Dalam bulan Desember 1945 Kongres Perempuan nasional diadakan di Klaten, dengan maksud menggalang persatuan

⁹⁴ Wawancara, Endang Mardiningsih (mantan Wakil Ketua Gerwani Cabang Purwodadi), Semarang, tanggal 1 Mei dan 8 Juni 2009.

dan membentuk badan persatuan. Persatuan Wanita Indonesia (Perwani) dan Wanita Negara Indonesia (Wani) dilebur menjadi badan fusi dengan nama Persatuan Wanita Republik Indonesia (Perwari).

Kongres berikutnya di Solo Pada bulan Februari tahun 1946. Dalam kesibukan revolusi fisik maupun dalam bidang sosial politik, pergerakan wanita berbenah diri untuk menggalang persatuan yang kuat pada waktu itu lahirlah badan Kongres Wanita Indonesia (Kowani). Kongres Wanita Indonesia (Kowani) didirikan di Surabaya pada awal bulan Juni tahun 1950, diketuai oleh Nyi Puger, wakil ketua Ny. Dr. Angka Nitisastra, penulis Ny. Irang, dan anggota luar biasa Ny. Samadikun. Dalam rapat pembentukan tersebut juga dibentuk Panitia Pembantu Sosial yang anggotanya terdiri dari perhimpunan yang punya usaha kesosialan guna menyampingi dan membantu melaksanakan pekerjaan pemerintah di lapangan sosial.⁹⁵ Kowani dibentuk sebagai suatu federasi dari semua organisasi wanita yang menyokong kemerdekaan bangsa Indonesia. Dapur umum dibentuk oleh berbagai organisasi wanita, dan kaum wanita memainkan peranan penting dalam membangun jalur komunikasi antara berbagai satuan gerilya. Banyak wanita yang bahkan memanggul senjata. Sementara itu, kaum wanita menyuarakan tuntutan mereka: upah yang sama dan hak yang sama atas kerja, perbaikan hukum perkawinan, pendidikan untuk kaum wanita, dan lain-lain.

Sekedar lukisan suasana untuk menggambarkan perjuangan para wanita pada waktu permulaan Zaman Kemerdekaan, perlu dibuat paparan mengenai hal itu. Revolusi Agustus 1945 mendobrak ikatan-ikatan adat dan tradisi yang

⁹⁵ *Antara*, Dinas Dalam Negeri. No. 156/B. 5 Juni 1950.

sebelumnya menghambat gerak maju wanita. Penderitaan dan penghinaan selama penjajahan sudah cukup berat, dan kini, sewaktu revolusi urusan-urusan yang tidak pokok tidak dihiraukan lagi. Seluruh rakyat merasa terpanggil untuk ikut berjuang membela dan mempertahankan kemerdekaan. Organisasi-organisasi wanita pada umumnya di waktu itu mengutamakan usaha-usaha perjuangan, baik di garis belakang dengan mengadakan dapur umum dan pos-pos Palang Merah, maupun di garis depan dengan nama suatu badan perjuangan maupun tergabung dengan organisasi-organisasi lain. Timbul laskar-laskar wanita; tugas-tugas mereka sangat luas: di garis depan, di medan pertempuran, melakukan kegiatan intel, jadi kurir, menyediakan dan mengirimkan makanan ke garis depan, membawa kaum pengungsi, memberi penerangan.⁹⁶

Pada bulan juni 1946 diselenggarakan Kongres Wanita Indonesia di Madiun, yang merupakan Kongres Wanita Indonesia ke-V. Sesuai dengan kebijaksanaan pemerintah untuk menembus blokade ekonomi dan politik, Kongres memutuskan antara lain mulai mengadakan hubungan dengan luar negeri dan dari hal inilah Kongres Wanita Indonesia menjadi anggota WIDF (Women's International Democratic Federation). Dijiwai oleh tekad untuk ikut serta dalam pembangunan jaringan kerjasama Internasional, mendukung pergerakan wanita selanjutnya menyusun program-program kerja, yang tidak hanya meliputi bidang pembelaan negara, tetapi juga bidang-bidang sosial, politik, pendidikan, dan lain-

lain sesuai dengan derap perjuangan untuk mempertahankan kemerdekaan RI pada waktu itu.

Secara umum arah perkembangan gerakan wanita sampai tahun 1950 telah mencakup paling tidak hal-hal berikut:⁹⁷

1. Sebagai kelanjutan dari kecenderungan pada masa sebelumnya, wawasan dan lingkup perhatian organisasi wanita telah meluas tidak hanya pada masalah dan isu wanita saja, tetapi juga ke bidang-bidang lain seperti politik dan pemerintahan.
2. Muncul jenis organisasi wanita yang semakin beragam. Selain organisasi-organisasi yang sudah ada sebelumnya seperti organisasi yang berafiliasi pada partai politik dan organisasi yang berazaskan agama, muncul pula organisasi khusus pada kelompok sosial tertentu seperti dikalangan istri Angkatan Bersenjata, dan organisasi profesi. Selain itu, azas demokrasi yang dipercaya sebagai dasar negara yang baru merdeka juga telah mendorong kaum wanita untuk membentuk partai politik agar kepentingan kaum wanita juga terwakili dan tersalur.
3. Ruang gerak organisasi wanita juga semakin meluas, tidak hanya lokal dan nasional tetapi juga internasional, dengan bergabungnya organisasi-organisasi dalam Kowani dengan WIDF.
4. Sebagai akibat orientasi gerakan yang diambil, kegiatan organisasi-organisasi wanita juga beragam. Hal yang terakhir ini paling tidak dapat dipisahkan menjadi dua kelompok besar, pertama organisasi-organisasi yang mendasarkan

⁹⁷ *Ibid.*

kegiatannya pada kesejahteraan (*welfare*) yaitu masalah pendidikan, sosial ekonomi, kewanitaan dan kegiatan karitatif; dan kedua organisasi yang berkonsentrasi pada masalah-masalah politik. Kelompok yang disebut pertama jumlahnya lebih besar dari yang kedua, dan mencakup diantaranya organisasi-organisasi yang tergabung dalam Kowani, organisasi-organisasi yang berazaskan agama, organisasi khusus dan organisasi profesi. Adapun yang termasuk kategori kedua yaitu berfokus pada kegiatan politik tidak lebih dari tiga organisasi saja. Di sini terlihat bahwa ciri domestik dan karitatif memang sejak awal telah melekat pada organisasi wanita dan tetap bertahan sebagai ciri utama yang membedakannya dari organisasi massa umum yang didominasi laki-laki.

Sesudah tahun 1950 masalah-masalah politik makin banyak minta perhatian. Berbagai persoalan yang berkaitan dengan masalah penyusunan kekuatan partai-partai politik. Perhatian masyarakat mulai disita oleh persiapan penyelenggaraan pemilihan umum pertama yang akan diadakan pada tahun 1955. Makin banyak kegiatan kaum wanita yang ditujukan kepada masalah-masalah politik, mengingat usaha masing-masing aliran politik untuk tampil sebagai pemenang dalam pemilihan umum. Akan tetapi tidak dilupakan juga, masalah rutin sebelumnya seperti memperjuangkan peraturan perkawinan yang tidak merugikan kaum wanita. Organisasi-organisasi yang berafiliasi pada partai politik sibuk membantu partai induknya mempersiapkan diri menghadapi pemilu.

Perjuangan untuk penghapusan poligami tetap merupakan masalah penting sampai ketika Presiden Sukarno memadu istri pertamanya pada tahun 1954, suatu tindakan yang merupakan pukulan besar bagi gerakan wanita. Timbullah dilema:

apakah harus mengesampingkan masalah ini, ataukah harus mengecam sang pahlawan bangsa, dengan risiko dicap sebagai anti-nasionalis. Persatuan gerakan wanita menjadi sangat lemah, karena sementara golongan tetap meneruskan perjuangan anti-poligami; dalam hal ini terutama Persatuan Wanita Republik Indonesia (PERWARI), sedangkan golongan-golongan lain mengabaikan masalah tersebut. Baru pada tahun 1974 undang-undang perkawinan baru disahkan, tetapi karena tekanan golongan Islam poligami masih tetap dipertahankan walaupun agak dibatasi.⁹⁸

B. Kelahiran Gerwani dalam Pergulatan dengan Ideologi Komunis

Sesudah tahun 1950 persatuan gerakan wanita Indonesia, yang telah dibangun pada masa perjuangan nasional sebelumnya, berangsur-angsur hancur. Dalam menghadapi pemilihan umum 1955 berbagai partai politik membentuk bagian wanita masing-masing. Ketegangan antara golongan wanita Islam dan nasionalis pun timbul. Berkembang bermacam-macam kegiatan; balai-balai wanita, bank-bank wanita, bahkan surau wanita didirikan; bermunculan berbagai macam organisasi dan majalah wanita, tetapi hampir semua kegiatan ini semakin terikat pada partai politik (laki-laki), gerakan keagamaan (laki-laki), ataupun pada organisasi pejabat laki-laki. Pada sebagian besar organisasi ini pandangan elitis tetap bertahan, walaupun pendudukan Jepang dan perjuangan pembebasan nasional telah agak mengaburkan tajamnya garis pemisah antara golongan kaya

⁹⁸ Wierenga, *op.cit.*, hlm. 222-226.

dan miskin dalam masyarakat Indonesia.⁹⁹

1. Berdirinya Gerwis

Para wakil enam organisasi wanita berkumpul di Semarang pada 4 Juni 1950 untuk melebur enam organisasi mereka masing-masing ke dalam satu wadah tunggal, yaitu Gerwis. Enam organisasi tersebut ialah Rukun Putri Indonesia (Rupindo) dari Semarang, Persatuan Wanita Sedar dari Surabaya, Isteri Sedar dari Bandung, Gerakan Wanita Indonesia (Gerwindo) dari Kediri, Wanita Madura dari Madura, dan Perjuangan Putri Republik Indonesia dari Pasuruan.

Tokoh-tokoh wanita tersebut memiliki latar belakang sosial yang berbeda-beda, tapi semuanya bersama-sama terjun di tengah pergerakan nasional. Diantaranya S.K. Trimurti Menteri Perburuhan R.I. pertama. Beliau anggota Partindo, giat dalam Wanita Partindo, dan juga anggota Gerindo. Kemudian Salawati Daud, Walikota Makasar (sekarang Ujung Pandang). Di antara mereka banyak wanita muda, seperti Sudjinah dan Sulami, sebelumnya sudah giat di dalam PPI (Pemuda Puteri Indonesia), organisasi pemuda semasa perjuangan kemerdekaan yang berjiwa sosialis. Para anggota pendiri lainnya termasuk Tris Metty, Sri Panggihan (anggota PKI terkemuka dari Madiun), Sri Kusnapsiyah, Umi Sarjono (pendiri Gerwindo), dan Suharti (ketua departemen wanita CC PKI, ketua cabang Yogya), dan lain-lainnya.

Ketua Gerwis yang pertama adalah Tris Metty. Sebelumnya beliau adalah Ketua Rukun Putri Indonesia yang berpolitik mandiri, dan juga anggota Lasykar

⁹⁹ Wawancara, Heryani Busono (mantan Anggota HSI /Himpunan Sarjana Indonesia), Semarang, tanggal 1 Mei 2009.

Wanita Jawa Tengah. S.K. Trimurty dari Jogjakarta sebagai wakil ketua dan Srie Kustijah dari Semarang sebagai penulis. Dalam rapatnya yang pertama, Gerwis telah mengajukan tuntutan kepada pemerintah, antara lain minta supaya “fonds” pembangunan negara ditujukan bagi kemakmuran rakyat dan menghendaki negara kesatuan yang 100 persen lepas dari “isme” penjajahan.¹⁰⁰ Kedudukan Tris Metty tersisihkan dalam konferensi di Yogya, untuk mempersiapkan kongres I Gerwis, dan digantikan oleh S.K. Trimurti. Dalam periode ini Umi Sarjono, Suharti, dan Mudigdio, ibu mertua D.N. Aidit, sudah menjadi anggota atau mempunyai ikatan erat dengan PKI. Hal ini merupakan petunjuk jelas, bahwa kaum Komunis mempunyai suara penting dalam pendirian Gerwis. Meskipun Gerwis selalu menegaskan sebagai non-politik dan tidak mempunyai kaitan dengan parpol mana pun, seperti dinyatakan dalam anggaran dasarnya, namun pengaruh PKI tampak tertanam sangat mendalam pada organisasi tersebut. Keinginan Komunis untuk membangun organisasi wanita yang bisa dipimpinnya, tentu saja bukan merupakan satu-satunya faktor bagi berdirinya Gerwis. Para pendiri Gerwis itu sendiri mempunyai hasrat bersama yang sungguh-sungguh, baik demi perjuangan kemerdekaan nasional maupun mengakhiri berbagai politik feodalisme.

Hampir semua sejarah hidup para tokoh dan anggota Gerwani bercerita tentang kawin paksa, perceraian sepihak, larangan bersekolah, atau penghinaan-penghinaan lain yang terasa sangat menusuk hati mereka, maka mungkin sekali hal-hal tersebut itulah yang berperan sangat besar dalam meradikalkan para wanita tersebut. Beberapa dari mereka tertarik kepada PKI, karena hanya partai

¹⁰⁰ Antara, Dinas Dalam Negeri. No. 160/A. 9 Juni 1950.

inilah yang dilihat bersungguh-sungguh melawan berbagai praktik demikian.

Kota Semarang dipilih sebagai basis Gerwis, karena secara historis merupakan “Kota Merah”. Di kota inilah lahirnya PKI. Pemimpin Gerwis yang sangat terkemuka, Ibu Munasiah, yang berbicara dengan garangnya dalam Kongres PKI 1924 dan dibuang ke Digul, berasal dari kota ini. Dialah yang mengorganisasi “Aksi Caping Keropak”, yang terkenal semasa perjuangan kemerdekaan itu. Ketika organisasi yang masih muda ini sedang sibuk membenahi dirinya, dan membangun cabang-cabangnya di seluruh Jawa dan di luar Jawa, memperketat pengawasannya terhadap “keresahan sosial”, pada Agustus 1951 terjadi penangkapan terhadap tokoh-tokoh Gerwis, termasuk ibu Mudigdio dan Ibu Trimurti. Keduanya diperiksa selama satu minggu dan oleh karena itu para anggota Gerwis giat dalam panitia “Pembelaan Korban Razzia Agustus”.¹⁰¹

2. Metamorfosa Gerwis menjadi Gerwani: Kongres-kongres Gerwani

a. Kongres pertama tahun 1951

Kongres Gerwis pertama kali diselenggarakan pada 17-22 Desember 1951 di Surabaya. Pada waktu itu keadaan sangat sulit, banyak utusan yang harus menghadiri kongres masih ada di penjara. Jika dilihat dari nama Gerwis, Gerakan Wanita Indonesia Sedar berarti bahwa anggota organisasi ini bersifat terbatas. Hanya kaum wanita yang telah sadar yang akan diterima sebagai anggota, sedangkan jutaan massa wanita masih belum sadar akan arti politik. Mereka seharusnya ditarik untuk masuk ke dalam organisasi ini agar bisa terlibat dalam

¹⁰¹ Wierenga, *op.cit.*, hlm. 283-289.

perjuangan. Oleh karena itu, Gerwis dikecam oleh anggota PKI. Sejalan dengan sejumlah perubahan yang terjadi pada PKI, dengan terpilihnya D.N. Aidit sebagai pimpinan baru (Januari 1951), terjadi tekanan di dalam Gerwis agar menghentikan agitasi perlawanannya terhadap pemerintah dan sebaliknya agar membangun “front dari bawah”.¹⁰²

Tindakan penting yang diambil pada Kongres I ialah mengecilkan sayap feminis di dalam organisasi dan berusaha mengkonsolidasi pengaruh PKI terhadap pimpinan organisasi. Akan tetapi Suharti, salah satu calon dari PKI, dipandang terlalu “komunis” oleh mayoritas kongres, hingga PKI di satu pihak terpaksa harus menarik pencalonannya, di lain pihak menghalangi kepemimpinan S.K. Trimurti. Semasa perjuangan kemerdekaan S.K. Trimurti telah melatih banyak tokoh Gerwis, melalui berbagai kursus kader yang diselenggarakannya selaku Ketua Barisan Buruh Wanita. Umi Sarjono menang dalam pemilihan untuk kedudukan pertama, Trimurti di tempat ke dua, dan Suwarti tempat ke tiga. Karena Trimurti tidak bisa diterima PKI, Umi Sarjono mengundurkan diri, dan memberikan kursinya kepada Suwarti. Mereka berdua, Trimurti dan Umi Sarjono, lalu menjadi wakil-wakil ketua. Pada tahun 1957 Trimurti mengundurkan diri dari kepemimpinan, dan pada tahun 1965 dari keanggotaan.

Mencermati sejarah Gerwis dapat diketahui, bahwa pada tahun 1952 pernah bergabung Isteri Buruh Kereta Api, berikut dengan 10 cabang-cabang serta 4000 anggotanya. Kemudian pada tahun 1953 masuk pula yang terakhir organisasi Perwin, persatuan Wanita Indonesia dari Manado. Organisasi ini sudah tampil di

¹⁰² Hikmah Diniah, *Gerwani Bukan PKI, Sebuah Gerakan Feminisme Terbesar di Indonesia* (Yogyakarta: Carasvati Books, 2007), hlm. 91-93.

depan dalam perang kemerdekaan. Mereka aktif melawan upaya Belanda untuk kembali menguasai bagian mana pun dari Indonesia, dan menentang KMB yang dalam pandangan mereka akan mendorong kembalinya modal asing ke Indonesia. Antara Kongres I dan Kongres II, Gerwis aktif dalam tiga front, yaitu politik, feminisme, dan sosial ekonomi. Pada front politik, melawan “unsur-unsur reaksioner”, terhadap gerakan untuk kemajuan wanita. Pada front feminisme, melawan PP 19 (mengenai pemberian pensiun kepada janda dan tunjangan kepada anak yatim-piatu pegawai negeri sipil) dan menyokong perjuangan umum untuk undang-undang perkawinan yang demokratis, dengan sepandai mungkin menghindari konfrontasi dengan Sukarno. Front sosial ekonomi lebih ditekankan pada level *grassroot* dimana anggota Gerwis aktif dalam gerakan tani melawan usaha pemerintah mengusir mereka dari bekas tanah perkebunan yang telah mereka garap.

Gerwis aktif menempuh politik anti imperialisme sejak awal sejarahnya. Menurut Gerwis, pemerintah yang dikangkangi PNI, Masyumi, dan PSI, dengan membiarkan kembalinya para pemilik perkebunan asing, menjadi terlalu bersikap lunak terhadap modal asing dan imperialisme. Oleh karena itu, kaum wanita sebagai ibu rumah tangga menjadi sangat menderita. Sejak awal mula Gerwis merupakan organisasi wanita yang paling aktif di bidang politik nasional.¹⁰³ Gerwis mengeluarkan pernyataan menentang “unsur-unsur reaksioner” yang telah mengorganisasi “Peristiwa 17 Oktober” 1952¹⁰⁴, dan masuk dalam Front Nasional

¹⁰³ Wierenga, *op.cit.*, hlm. 290-296.

¹⁰⁴ *Harian Rakjat*, 7 November 1952.

yang dibentuk dalam rangka perkembangan tersebut.¹⁰⁵ Gerwis juga ikut memprotes PP 19, dan mendukung tuntutan *reform* perkawinan yang diajukan Kongres II Kongres Wanita Indonesia tahun 1952.¹⁰⁶

Konferensi kerja Gerwis tahun 1952 di Semarang membahas sekitar permasalahan perdamaian, hak-hak anak dan wanita.¹⁰⁷ Gerwis juga banyak mencurahkan perhatiannya pada masalah pendidikan melek huruf, pembukaan sekolah, dan kursus-kursus PBH (seperti juga organisasi-organisasi wanita lainnya), sampai 1965. Pada pada awal 1952 Gerwani mengajak organisasi wanita Indonesia lainnya untuk ikut merayakan tanggal 8 Maret sebagai hari Solidaritas Perempuan Internasional.¹⁰⁸

b. Kongres kedua tahun 1954

Dalam usahanya untuk menjadi organisasi massa wanita, Gerwis memberi perhatian juga pada sejumlah masalah yang sangat dirasakan kaum wanita, yaitu soal penurunan harga bahan kebutuhan pokok. Ini menyebabkan Gerwis menjadi berbeda dari berbagai organisasi wanita lain saat itu pada umumnya. Pada Kongres II bulan Maret 1954 di Jakarta bertema hak-hak wanita dan anak-anak, kemerdekaan dan perdamaian. Tuntutan tentang perdamaian mencakup baik pendirian anti-imperialisme pada umumnya, dengan mengutuk keras percobaan

¹⁰⁵ *Harian Rakjat*, 20 November 1952.

¹⁰⁶ *Harian Rakjat*, 25 November 1952.

¹⁰⁷ *Harian Rakjat*, 1 Desember 1952.

¹⁰⁸ Wierenga, *op.cit.*, hlm. 299.

nuklir, maupun tuntutananya menumpas gerakan Darul Islam, yang sangat anti komunis dan melakukan teror di desa-desa, khususnya di Jawa Barat.¹⁰⁹

Sesuai dengan keputusan yang diambil dalam Kongres I, Gerwis diubah menjadi Gerwani. Dengan terpilihnya Umi Sarjono sebagai ketua, berarti sayap feminis berhasil menahan PKI. Dewan pimpinan pusat yang baru juga mendudukan Suharti sebagai wakil ketua pertama, Ny. Mudigdiyo sebagai wakil ketua kedua; Asiyah dan Darmini sebagai sekretaris; Kartinah, Mawarni, Paryani, dan Suwarti sebagai anggota. Trimurti sudah tidak lagi menjadi anggota dewan ini, melainkan tinggal sebagai anggota pleno yang terdiri dari 35 anggota.¹¹⁰

Organisasi ini telah mengalami perkembangan luar biasa selama tahun-tahun antara Kongres I dan Kongres II. Di surabaya Gerwis mempunyai 40 cabang dengan 6000 anggota. Pada tahun 1954 jumlah anggota telah naik menjadi sekitar 80.000. Pimpinan Gerwis menekankan arti penting kerja sama dengan berbagai organisasi wanita lain atas dasar menghormati perbedaan yang ada. Organisasi ini menyelenggarakan kursus PBH dan membuka sejumlah tempat penitipan anak. Selain itu juga berusaha mengadakan berbagai kursus kader, tapi rencana ini tertunda karena alasan keuangan, hingga cabang-cabang dibiarkan menatar para kader mereka tanpa menunggu pedoman dari pusat. Kesulitan keuangan juga mengharuskan organisasi menghentikan penerbitan buletin internnya. Buletin ini semula bernama Wanita Sedar, tetapi belakangan diganti

¹⁰⁹ *Harian Rakjat*, 27 Maret 1954.

¹¹⁰ *Harian Rakjat*, 2 April 1954.

Berita Gerwani. Buletin lainnya, Berita Berkala, juga terbit dalam waktu pendek saja.¹¹¹

Dari berbagai laporan dalam periode Kongres II maka dapat disimpulkan posisi ideologi Gerwani pada 1954. Dalam hal ini keputusannya untuk menjadi organisasi massa jelas terbaca dalam anggaran dasarnya yang baru, yang menyatakan bahwa: (a) Gerwani adalah organisasi untuk pendidikan dan perjuangan, yang tidak menjadi bagian dari partai politik apa pun; (b) keanggotaan Gerwani terbuka untuk semua wanita Indonesia umur 16 tahun atau lebih (atau kurang jika sudah bersuami), dan mengingat sangat banyaknya wanita yang buta huruf, maka untuk menjadi anggota tidak diperlukan tanda tangan atau mengisi formulir; dan (c) keanggotaan rangkap diperbolehkan, misalnya dengan SOBSI atau organisasi wanita lain apa saja.

Resolusi paling penting yang diterima Kongres II ialah tuntutan akan undang-undang perkawinan yang demokratis. Sejumlah resolusi lain berkenaan dengan pemilihan umum yang akan datang, keamanan nasional, dan protes terhadap percobaan nuklir. Dengan demikian Gerwani menggabungkan antara alasan-alasan esensialisme (sebagai ibu) dan konstruktivisme (sebagai buruh dan warga negara), dengan memberi tekanan pada persaudaraan kaum wanita. Tetapi sekalipun Gerwani mengaku menghormati adanya perbedaan di kalangan kaum wanita, namun hasrat hegemoninya yang berhaluan Komunis terhadap organisasi

¹¹¹ Wierenga, *op.cit.*, hlm. 300-302.

wanita lainnya, menyebabkannya menghubungkan antara “ibu” dengan “buruh”, suatu kombinasi yang tidak begitu langsung dan jelas bagus.¹¹²

c. Menuju Kongres Konsolidasi tahun 1954-1957

Hasil Kongres II disebarluaskan para aktivis Gerwani kepada semua anggota organisasi mereka dan juga pada semua wanita Indonesia pada umumnya.¹¹³ Salah satu tujuan utamanya ialah untuk menjadi suatu gerakan massa yang sebenar-benarnya dengan jumlah anggota yang signifikan. Untuk mewujudkan hal itu, sosialisasi ide dan program kerja dilakukan secara intensif oleh para kader, sehingga dalam waktu relatif singkat keanggotaan mencapai satu juta pada akhir 1955.¹¹⁴

Sebagaimana tampak pada April 1955, keanggotaan baru tercatat sebanyak 400.000 orang, ketika berlangsung Kongres III pada bulan Desember, anggota Gerwani mencapai 663.740 orang.¹¹⁵ Angka-angka tersebut mencerminkan keberhasilan strategi Gerwani. Dalam hal ini para kader diwajibkan untuk mempelajari kondisi daerah dan kebudayaan penduduk di wilayah masing-masing. Jika simpati dari para calon anggota sudah didapat, harus dibentuk kelompok-kelompok kecil, dan dari sinilah kaum wanita didorong agar menjadi lebih aktif dan disadarkan tentang hak-hak mereka. Soal perkawinan harus mendapat perhatian utama dari para kader, karena soal ini selalu menarik perhatian wanita.

¹¹² *Ibid.*, hlm. 303.

¹¹³ *Harian Rakjat*, 9 Juni 1954.

¹¹⁴ *Harian Rakjat*, 22 Juni 1956.

¹¹⁵ *Harian Rakjat*, 18 Desember 1957.

Memperhatikan benar pekerjaan membangun kepercayaan di kalangan wanita, karena jika tidak umumnya mereka mempunyai perasaan rendah diri. Selanjutnya organisasi harus dikonsolidasi, dan dicari jalan bekerjasama dengan laki-laki (walau mungkin mereka berpendirian feodal). Jika ada kemungkinan bekerja di kalangan buruh wanita, pekerjaan ini harus dimulai, dan kaum wanita didorong agar giat dalam organisasi serikat buruh.

Sesudah kampanye pemilihan umum, pimpinan pusat dapat mencurahkan tenaganya lebih besar pada masalah pendidikan aktivis organisasi. Bagi kader yang bekerja di tengah masyarakat, yang tidak senang terhadap wanita yang melepaskan diri dari apa yang mereka anggap sebagai kodrat, atau “sifat kewanitaan”, maka kewajiban rumah tangga mereka tidak boleh dikalahkan oleh pekerjaan di dalam organisasi. Wanita Gerwani menghadapi baik kendala ideologis (agama, kebudayaan, sikap “feodal” pada umumnya dan ketidakpercayaan karena hubungan mereka dengan politik “komunis”), maupun sejumlah hambatan praktis (bagaimana membagi waktu).¹¹⁶

Untuk mengatasi kendala ini mereka mendapatkan petunjuk dari *Harian Rakyat*, khususnya melalui “Ruangan Wanita”; karangan-karangan tentang petunjuk pemeliharaan anggota baru (“dengan kesungguhan”)¹¹⁷; tentang mengkombinasikan berbagai tugas organisasi dan rumah tangga¹¹⁸; tentang

¹¹⁶ Wierenga, *op.cit.*, hlm. 304-306.

¹¹⁷ *Harian Rakjat*, 1 September 1954.

¹¹⁸ *Harian Rakjat*, 17 November 1954.

pentingnya kerja keras¹¹⁹; dan tentang anjongsana¹²⁰; dorongan kepada kader agar “setia, cinta kerja, dan bertanggungjawab”¹²¹. Kepada mereka dinasihati agar berusaha tidak cekcok dengan suami, dengan mengatur berimbang antara peranan rangkap mereka dan, apabila mungkin, mengajak suami agar ikut melibatkan dirinya dalam pekerjaan istri. Pokok alasannya ialah, karena suami yang tidak mau melibatkan diri dengan pekerjaan istri, justru akan menimbulkan lebih banyak soal daripada mengimbangkan dua peranan tersebut.¹²²

Pada pertengahan 1950-an Gerwani menitik beratkan perhatiannya pada dua masalah: Pemilihan Umum tahun 1955, dan kepentingan “feminis” seperti perkosaan dan *reform* perkawinan. Ketika kampanye pemilu dimulai, Gerwani memutuskan mendukung kampanye untuk para calon dari PKI dan tidak mengajukan daftar calon-calonnya sendiri. Tetapi Gerwani mendapat kebebasan politik tertentu, yaitu bahwa anggota Gerwani yang terpilih hendaknya tidak dengan sendirinya harus masuk fraksi PKI. Oleh karena wanita Indonesia sebelumnya belum pernah mendapat hak suara, maka para aktivis Gerwani giat memberikan penerangan tentang hak-hak politik dan jalannya Pemilu. Sekitar 23.480 anggota Gerwani ikut dalam kegiatan kampanye. Kampanye lainnya yang dilakukan Gerwani ialah menuntut pencabutan Undang-Undang IGO/B, yaitu Undang-Undang pemerintah kolonial tentang pemerintahan desa.

¹¹⁹ *Harian Rakjat*, 22 Juni 1954.

¹²⁰ *Harian Rakjat*, 12 Oktober 1955.

¹²¹ *Harian Rakjat*, 11 April 1956.

¹²² *Harian Rakjat*, 24 April 1957.

Disadari oleh pimpinan Gerwani bahwa mengurus masalah feminis, seperti perkosaan dan *reform* perkawinan, justru merupakan perjuangan yang lebih berat dibanding dengan perjuangan untuk kemerdekaan nasional. Para aktivis Gerwani di tingkat daerah benar-benar prihatin mengenai banyaknya masalah perkawinan yang harus mereka hadapi. Umi Sarjono melaporkan, pada 1956, bahwa di Jawa dan Jakarta saja para kader Gerwani menghadapi beratus-ratus kasus tentang diabaikannya hak-hak wanita dalam perkawinan, seperti misalnya meninggalkan keluarga tanpa alasan, pergundikan, dan perselisihan harta waris. Suami meninggalkan istri dan anak-anak tanpa memberi makan atau syarat hidup apapun lainnya, dan pergi mencari wanita lain.¹²³

Para anggota Gerwani berusaha turun tangan pada permasalahan seperti ini, pertama-tama dengan mengajak sejumlah pihak yang terkait untuk berunding. Jika cara ini ternyata gagal, mereka mencari bantuan pejabat agama dalam usaha mendapat jaminan jika terjadi perceraian bagi istri dan anak-anak mereka. Dalam hal ini tidak semua perkara berhasil diselesaikan dengan kepuasan di pihak wanita, baik karena miskinnya pengetahuan hukum di kalangan wanita, maupun karena “keras kepalanya si laki-laki”.

Walau periode antara Kongres II dan III merupakan periode Gerwani yang paling feminis, dengan kemungkinan pengecualian tahun pertamanya, namun tidak berarti bahwa perhatiannya terhadap masalah politik umum diabaikan. Perayaan Hari Wanita Internasional pada 1955 diwarnai sejumlah aksi perdamaian, antara lain protes menentang percobaan nuklir, serta “pembebasan”

¹²³ Wierenga, *op.cit.*, hlm. 309.

Irian Barat dari Belanda. Pada awal Januari 1957 pimpinan pusat Gerwani menyelenggarakan konferensi kerja, yang menghasilkan berbagai tuntutan sosial-ekonomi kepada pemerintah, termasuk penurunan harga bahan pokok. Pada Maret 1957 Gerwani melancarkan kampanye besar-besaran, menyokong pidato “Konsepsi Presiden”, yang di dalamnya pertama-tama Sukarno menguraikan pokok-pokok perubahan undang-undang dasar, yang selanjutnya akan melahirkan Demokrasi Terpimpin. Selama periode ini Gerwani tetap berusaha menjadi juru bicara petani miskin.¹²⁴ Beberapa bulan terakhir 1957 dilakukan kegiatan besar-besaran mempersiapkan kongres III, termasuk aksi bersama mengumpulkan dana kongres.¹²⁵

d. Kongres ketiga tahun 1957

Kongres III Gerwani dinamakan oleh Umi Sarjono dalam pidato pembukaannya sebagai “Kongres Konsolidasi”. Dua puluh tujuh butir program perjuangannya yang baru, dimulai dengan sembilan butir tentang hak-hak sama bagi wanita dalam perkawinan, hukum adat dan perburuan. Beberapa butir

¹²⁴ Membantu kegiatan kerumahtanggaan, misalnya membantu distribusi beras bagi warga miskin, mengunjungi kelahiran dan kematian, mengadakan arisan untuk tetangga sekitar, mengadakan penitipan anak di kampung, membantu anak-anak cacat, dsb. Kemudian berusaha menyelesaikan permasalahan perkawinan, dengan cara mengajak berbicara dengan pihak terkait. Misalnya jika terjadi kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan suami terhadap istrinya, maka anggota Gerwani mendatangi dan berbicara dengan suami tersebut. Jika suami itu tidak mau menghentikan perbuatannya, maka anggota Gerwani membantu istri untuk perceraian dengan suaminya. Wawancara dengan Ibu Tumini Khadim (mantan pengurus Gerwani Cabang Semarang), Semarang, tanggal 8 Juni 2009.

¹²⁵ Wierenga, *op.cit.*, hlm. 308-313.

berikutnya mengenai pelayanan sosial, seperti sekolah, penitipan anak, dan layanan kesehatan. Butir-butir lainnya lebih beragam antara lain; larangan film porno, pencabutan IGO/B, masalah pedesaan yang menyangkut bagi hasil dan riba, pajak tinggi, dan kenaikan harga bahan pokok, pembasmian gerombolan-gerombolan subversif seperti gerakan Darul Islam, dan menuntut agar percobaan nuklir semata-mata demi tujuan-tujuan perdamaian. Selain itu kongres menetapkan resolusi-resolusi seperti: “pembebasan” Irian Barat, dan tuntutan untuk undang-undang perkawinan yang demokratis, buku-buku sekolah dengan harga murah, kesetiaan pada Pancasila, hukuman berat untuk pemerkosa, usaha mengatasi kenakalan anak-anak (misalnya dengan menyediakan fasilitas rekreasi dan pelarangan film porno), dan mengubah berbagai peraturan yang diskriminatif dalam IGO/B, untuk disesuaikan dengan Undang-Undang Dasar¹²⁶.

e. Kongres keempat tahun 1961

Resolusi Kongres III menunjukkan bahwa Gerwani semakin tenggelam ke dalam persoalan politik nasional terkait dengan praktik Demokrasi Terpimpin. Keadaan seperti ini terus berjalan sampai pada Kongres IV dan terakhir. Pendirian Gerwani tentang politik nasional semakin sesuai dengan retorika populis Sukarno. Walau pada Oktober 1958 konferensi kerja Gerwani menyatakan keprihatinannya terhadap penundaan Pemilihan Umum 1959¹²⁷, namun hanya sebulan berikutnya pimpinan menyatakan bahwa Gerwani menyokong Demokrasi Terpimpin dan

¹²⁶ *Harian Rakjat*, 8 Januari 1958.

¹²⁷ *Harian Rakjat*, 1 oktober 1958.

menentang “persaingan bebas liberalisme”¹²⁸. Akhir tahun 1959 Gerwani menyatakan dukungan kepada Manipol, dan tuntutan untuk pemilihan umum tidak lagi terdengar. Sejak itu Gerwani mulai mengutip kata-kata presiden untuk merumuskan setiap tuntutannya. Misalnya, tuntutan untuk kesekian kali tentang undang-undang perkawinan yang demokratis, sekarang diawali dengan menyebut Presiden Sukarno yang “menegaskan bahwa revolusi belum selesai”¹²⁹.

Sehubungan dengan situasi politik nasional, sikap Gerwani secara garis besar diuraikan dalam suatu pidato bulan Mei 1961, yang melaporkan tentang diskusi Pleno Gerwani mengenai rencana 8 tahun yang baru ditetapkan pemerintah. Gerwani menyatakan partisipasinya dalam usaha meningkatkan produksi pangan dan sandang, serta pembentukan koperasi. Tapi Gerwani menegaskan, bahwa rencana itu hanya akan terwujud jika pemerintah “diritul”, seperti telah ditetapkan Manipol, dan jika rakyat diberi pengertian, harga distabilkan, dan korupsi diberantas.¹³⁰

Pada tahun 1961 Pernyataan Tahun Baru Gerwani dititikberatkan pada masalah harga dan perdamaian, dan tidak bicara tentang masalah perkawinan. Gerwani sebagai organisasi sosial politik wanita dalam keluarga kiri dipandang bertanggungjawab dalam mengorganisasi menentang kenaikan harga. Wanita dianggap sebagai ahli, yang bagaimana pun pandai menutupi kekurangan. Dianggap lazim bahwa laki-laki tidak mampu dan bodoh tentang ekonomi rumah

¹²⁸ *Harian Rakjat*, 14 November 1958.

¹²⁹ *Harian Rakjat*, 30 Desember 1959.

¹³⁰ Wierenga, *op.cit.*, hlm. 315.

tangga. PKI hampir tidak menaruh perhatian pada persoalan harga, sedangkan Gerwani terus menerus menuntut diakhirinya kenaikan harga pangan dan sandang yang cepat. Dalam hal ini presiden ikut memberi perhatian. Ketika demonstrasi mencapai puncaknya (Januari 1960), ia menjanjikan penurunan harga-harga sampai tingkat yang layak dalam dua atau tiga tahun¹³¹. Gerwani tidak berhasil membuat presiden memenuhi janji itu, walau sepanjang tahun 1961 terus menerus dilancarkan berbagai demonstrasi dan rapat umum melawan kenaikan harga.¹³²

Usaha Gerwani untuk mempengaruhi gerakan wanita dilandasi tiga tujuan yang saling terkait. Pertama, Gerwani ingin memimpin gerakan yang lebih luas. Mereka yakin, bahwa sikap pengutamaannya pada kepentingan wanita Indonesia merupakan pendirian yang “benar”, dan karenanya Gerwani harus mengawasi persatuan yang diperlukan untuk mencapai tujuan itu. Kedua, Gerwani ingin menjadi gerakan massa. Mereka mengikuti haluan PKI tentang emansipasi wanita, yang menggariskan bahwa pertama-tama sosialisme harus dicapai lebih dahulu, dan bahwa strategi terbaik untuk itu ialah dengan penggalangan front dari bawah, untuk menekan pemerintah agar berjalan ke arah yang diinginkan. Ketiga, Gerwani menghendaki agar gerakan wanita memainkan peranannya di dalam politik nasional. Mereka dipengaruhi sejumlah ide Sukarno tentang gerakan wanita pada umumnya, dan gerakan wanita Indonesia pada khususnya.¹³³

¹³¹ *Harian Rakjat*, 30 Januari 1960.

¹³² Wierenga, *op.cit.*, hlm. 317.

¹³³ *Ibid.*, hlm. 317-320

Sidang Pleno DPP Gerwani pada April 1961 mencatat sejumlah sukses: (a) terselenggaranya Seminar Nasional Wanita Tani di Jakarta pada tanggal 17-20 Januari 1961¹³⁴ dan intensifikasi pekerjaan dikalangan wanita tani pada umumnya; (b) Gerwani telah berusaha keras menunaikan tugas nasionalnya dalam perjuangan untuk Irian Barat, dan membentuk Front Persatuan Perempuan; (c) dengan diterimanya manipol oleh MPRS sebagai garis haluan Negara, Gerwani telah bekerja keras “untuk tidak ketinggalan dalam usaha ini”, dan telah meningkatkan usahanya untuk menaikkan produksi dan pembentukan koperasi-koperasi; dan (d) telah mengadakan berbagai tempat penitipan anak, karena tanpa ini wanita tidak mungkin ikut serta dalam semua tugas nasional itu.

Sidang Pleno mengemukakan dua kegiatan mendesak: (a) menyelenggarakan pendidikan lebih lanjut, dan (b) biro konsultasi nasional untuk membantu para kader di luar Jawa, juga kader-kader yang giat dalam masalah perkawinan dan perceraian; serta (c) menarik lebih banyak lagi kaum ibu rumah tangga. Dikemukakan dalam program Gerwani yang diputuskan dalam Kongres IV pada Desember 1961, bahwa program kerja yang baru memerlukan sedikit perubahan saja; karena masyarakat masih tetap setengah feodal, peraturan IGO/B masih belum dicabut, dan Parlemen masih belum memutuskan undang-undang perkawinan. Satu-satunya pasal dari program kerja 1957 yang dapat dicoret hanyalah tentang bagi hasil, karena sudah berlebihan dengan adanya

¹³⁴ Seminar tersebut bertujuan untuk meningkatkan sumbangan kaum wanita tani dalam perjuangan menciptakan masyarakat yang adil dan makmur, melaksanakan Manipol, meningkatkan taraf hidup kaum wanita tani, melaksanakan Undang-undang Bagi Hasil dan *Landreform*. *Harian Rakjat*, 19 Januari 1961.

undang-undang baru. Gerwani merasa bahwa dukungan dari Presiden Sukarno sangat penting artinya untuk keluarga PKI, yang di dalamnya termasuk Gerwani. Karena itu pimpinan Gerwani berusaha mengundang Presiden agar bersedia memberikan amanatnya pada pembukaan Kongres IV.¹³⁵

Pidato pembukaan Presiden Sukarno di depan Kongres IV tahun 1964 di Jakarta mengulangi masalah tentang peranan Gerwani dalam melaksanakan persatuan mutlak seluruh bangsa berdasarkan Nasakom, dan tentang ketidaksukaannya pada “*ladies movement*”. Sukarno, yang dalam bukunya Sarinah begitu fasih membela emansipasi wanita dan perlunya reform perkawinan, sekarang hampir tidak berbicara tentang kepentingan gender yang diperjuangkan Gerwani¹³⁶. Resolusi yang ditetapkan Kongres IV diurutkan sebagai berikut: Irian Barat, membantu pelaksanaan *land reform*, undang-undang perkawinan yang demokratis, keamanan nasional, penurunan harga, dan perdamaian¹³⁷. Tidak terjadi perubahan penting dalam pimpinan, walau terjadi amandemen peraturan dasar. Perubahan penting di sini menambahi dengan pernyataan kesetiaan pada manipol di dalam mukadimah.

Program perjuangan meliputi masalah hak-hak wanita, hak-hak anak-anak, demokrasi dan keamanan, kemerdekaan penuh dan perdamaian, dengan yang tersebut pertama paling dirinci. “Hak-hak wanita” dalam program perjuangan, yang pertama-tama ialah kesamaan hak dalam perkawinan dan pekerjaan, hak

¹³⁵ Wierenga, *op.cit.*, hlm. 325-326.

¹³⁶ *Harian Rakjat*, 15 Desember 1961.

¹³⁷ *Api Kartini*, Januari 1962.

mengabdikan untuk jabatan terpilih dan dalam lembaga politik, dan kesamaan hak atas tanah. Ke dua, Gerwani ikut bersama wanita tani mengatasi masalah-masalah mereka. Terakhir, mencantumkan perjuangan untuk penurunan harga-harga dan diperbanyaknya balai kesehatan. Dengan demikian, walau ada garis kesetiaan pada tujuan, seperti yang dirumuskan Sukarno dan Aidit, namun Gerwani masih memberikan prioritas perjuangannya pada hak-hak wanita di dalam kegiatan praktis, seperti yang telah ditetapkan dalam program perjuangannya itu.¹³⁸

C. Afiliasi Gerwani dengan PKI

Salah satu di antara masalah-masalah paling mendesak yang dihadapi Gerwani dan yang juga menimbulkan diskusi-diskusi hangat terutama di kalangan pimpinan pusatnya adalah persoalan “otonomi” organisasi dalam hubungannya dengan pimpinan PKI. Khususnya karena kejadian-kejadian dramatis sesudah Oktober 1965, masalah ini perlu dianalisis dengan lebih cermat.

Pada awal dasawarsa 1950-an terjadi perdebatan sengit antara anggota-anggota organisasi (ketika itu masih Gerwis) yang menginginkan organisasinya menjadi organisasi dari orang-orang yang berkesadaran sangat tinggi mengenai soal-soal organisasi, khususnya soal-soal yang lebih “feminis” seperti poligami, dengan di lain pihak anggota-anggota yang menginginkan masuknya juga orang-orang yang tidak begitu sadar tentang soal-soal feminis, dan tidak begitu tertarik pada debat-debat berat dan kegiatan-kegiatan peningkatan kesadaran. Golongan kedua ini berpendapat bahwa organisasi akan lebih efektif jika memperluas

¹³⁸ Wierenga, *op.cit.*, hlm. 326-328.

keanggotaannya di kalangan massa, yang berangsur-angsur dan dengan kerja keras akan ditingkatkan kesadarannya. Dalam jangka panjang khalayak yang lebih besar akan dijangkau, meskipun soal-soal yang diangkat tidak seluruhnya dibahas secara ideologis (baik dari sudut feminis maupun kiri) secara murni seperti yang diinginkan. Golongan “murni” kalah dalam pertarungan ini, dan golongan yang menghendaki Gerwis/Gerwani lebih mendekat ke PKI dengan pendekatan garis massanya mendapatkan kemenangan. Meskipun demikian secara resmi Gerwani tidak pernah berafiliasi dengan PKI. Pada bulan Desember 1965 rencananya akan diselenggarakan kongres yang akan membahas masalah afiliasi ini. Mungkin sekali gagasan afiliasi dengan PKI akan diterima kongres, tetapi peristiwa bulan Oktober 1965 menggagalkannya.

Implikasi lain ialah bahwa organisasi sebenarnya belum pernah membahas secara terbuka masalah-masalah seperti pembagian kerja seksual tradisional, walaupun sejumlah kader telah berjuang menentang ketidakadilan yang cukup nyata pada tingkat perorangan. Beberapa kader dengan tegas menyebutkan usaha mereka untuk mendidik anak-anak laki-laki agar mau mengerjakan tugas-tugas rumah-tangga bersama-sama, dan suami juga diharapkan mengerjakan pekerjaan rumah-tangga yang umumnya dipandang nyaris sebagai tugas wanita saja. Pada tahun 1964 pemerintah menginstruksikan semua ormas agar mencari gandulan masing-masing pada suatu parpol. Ketika suasana politik semakin tegang, pimpinan Gerwani telah menyatakan posisi organisasi yang ada di dalam kubu komunis, pernyataan yang dimaksud baru akan dirumuskan pada Kongres V.¹³⁹

¹³⁹ *Ibid.*, hlm. 342.

Kemerosotan ekonomi, kampanye anti-Malaysia, dan polarisasi yang semakin runcing antara PKI dan kekuatan kanan sepanjang tahun 1962 sampai 1 Oktober 1965 mengakibatkan Gerwani (yang menempatkan diri di tengah keluarga PKI dan sisi Soekarno) menjadi terseret di dalamnya. Dalam konfigurasi yang kompleks ini pimpinan Gerwani berusaha mempertahankan identitasnya sendiri. Gerwani tidak pernah menukar perjuangannya untuk hak-hak wanita dengan partisipasi politik sepenuhnya di dalam poros Soekarno-PKI. Ideologi resmi Gerwani selama periode ini ialah: perjuangan demi hak-hak wanita tidak dapat dipisahkan dari perjuangan demi masyarakat sosialis, atau perjuangan melawan imperialisme, maka dari itu Gerwani harus ambil bagian dalam perjuangan untuk *land reform* dan konfrontasi dengan Malaysia.¹⁴⁰ Hal ini merupakan beberapa alasan utama terciptanya stigma Gerwani sama dengan PKI.

Jadi ringkasnya hubungan Gerwani dengan PKI adalah hubungan yang mendua dan rumit. Pada umumnya Gerwani menyokong kampanye-kampanye politik terpenting yang dilancarkan PKI, tetapi juga ada beberapa titik perselisihan di antara keduanya. Pada awal dasa-warsa 1950-an, ketika ketegangan politik meningkat dan masyarakat Indonesia semakin mengalami politisasi dan polarisasi, Gerwani bergeser semakin dekat dengan PKI. Perkembangan ini terbawa oleh mereka yang mempunyai keanggotaan rangkap, PKI dan Gerwani sekaligus. Tetapi sampai saat terakhir Gerwani tidak pernah secara resmi menjadi bagian wanita PKI.

¹⁴⁰ *Ibid.*, hlm. 329.

Pada tahun 1964, Gerwani mulai merancang program-program kerja guna mengembangkan dirinya dalam suasana politik yang semakin memanas. Program-program itu meliputi: Hak-hak Wanita; Hak-hak Anak; Hak-hak Demokrasi; Kemerdekaan Nasional yang Penuh; dan Perdamaian.

a. Hak-hak Wanita

Program kerja pertama dan utama dalam Gerwani adalah mengenai masalah hak-hak wanita. Hak-hak wanita yang menjadi program kerja Gerwani meliputi persamaan hak dengan laki-laki dalam politik, hak perlindungan perkawinan, hak memilih kewarganegaraan dalam perkawinan campuran, hak wanita jika menjadi janda, hak wanita kaum buruh, hak wanita dalam tata pemerintahan, hak kesehatan, hak untuk turut melaksanakan *land reform*. Paling tidak terdapat 22 program Gerwani yang memperhatikan masalah hak-hak wanita.¹⁴¹

b. Hak-hak Anak

Titik perhatian kedua dalam program kerja Gerwani adalah mengenai hak-hak anak. Kehidupan anak sangat erat dalam rangkaian peran wanita dan dalam hal ini adalah ibu. Gerwani memandang hak-hak anak tidak dapat dilepaskan dari hak-hak wanita. Hak-hak anak dalam program Gerwani misalnya hak anak untuk bebas dari buta huruf, hak anak untuk mendapat pendidikan, hak anak untuk mendapatkan hiburan yang tidak bersifat cabul dan propaganda perang.¹⁴²

¹⁴¹ Lihat Lampiran A

¹⁴² *Ibid.*

c. Hak Demokrasi; Kemerdekaan Nasional yang Penuh; dan Perdamaian.

Gerwani memperhatikan hak-hak wanita dalam demokrasi, perdamaian, dan kemerdekaan. Misalnya hak untuk turut serta dalam usaha pembebasan Irian Barat.¹⁴³

Pelaksanaan dari program-program kerja tersebut di atas akan dibahas pada bab selanjutnya.

¹⁴³ *Ibid.*

BAB IV

AKTIVITAS GERWANI DI KOTA SEMARANG TAHUN 1950-1965

Dalam perjalanan gerakan wanita, Gerwani sebetulnya memiliki peran yang cukup berarti dengan mengangkat isu-isu kontroversial pada masanya itu. Seperti isu hak pilih dan isu poligami. Kekritisan para wanita terhadap ketidakadilan dan penindasan kaumnya merupakan sesuatu yang bisa menjadi inspirasi dan semangat bagi gerakan wanita selanjutnya. Terdapat beberapa hal penting yang berpengaruh pada para wanita dalam organisasi Gerwani sehingga menjadi kritis dan terkesan radikal, antara lain karena adanya kawin paksa, perceraian sepihak, larangan bersekolah, dan penghinaan-penghinaan lain yang sangat menyudutkan kaum wanita. Hal-hal itu merupakan bagian dari praktik sistem budaya warisan feodal yang masih sangat melekat pada masyarakat Indonesia pada saat itu.

Gerwani memilih Semarang sebagai basis karena secara historis merupakan “Kota Merah”, kota kelahiran partai yang berideologi komunis yaitu PKI. Banyak anggota Gerwani yang juga merupakan anggota PKI karena hanya partai inilah yang dilihat bersungguh-sungguh dalam melawan penindasan terhadap rakyat. Aktivitas Gerwani di kota Semarang sesuai dengan hal-hal yang tercantum dalam Program-Program Kerja Gerwani.¹⁴⁴ Meskipun program-program kerja tersebut baru dibuat dan dikeluarkan pada tahun 1964, namun sebelumnya sudah diterapkan di daerah-daerah termasuk di kota Semarang.

¹⁴⁴ Lampiran A

A. Aktivitas Sosial Politik

Gerwani di Kota Semarang memiliki aktivitas yang telah disesuaikan dengan program-program kerja Gerwani Pusat. Beberapa aktivitas di bidang sosial politik antara lain:

1. Gerwani di Kota Semarang turut memberi dukungan dalam usaha menuntut penghapusan diskriminasi bagi kaum wanita dan dilaksanakannya Undang-Undang No. 68 tahun 1959 tentang persetujuan Konvensi Hak-hak Politik bagi Wanita. Dengan ini diharapkan adanya pengembalian hak-hak wanita, tidak hanya sebagai pendamping suami dan *konco wingking* laki-laki. Wanita adalah penyangga negara, jika wanita hancur maka hancur pula negara.¹⁴⁵
2. Menuntut penghapusan diskriminasi mengenai hak-hak wanita dalam jabatan Kepala Desa/Pamong Desa dan segera dihapuskannya berbagai macam kerja tanpa dibayar yang pada hakekatnya sama dengan *rodi* dan *pologoro* yang sangat memberatkan kaum tani. Pada waktu itu, sebagian besar kepengurusan bagian wanita tingkat Rukun Tetangga di kota Semarang dijabat oleh wakil-wakil dari Gerwani.¹⁴⁶
3. Keberadaan Irian Barat di bawah kekuasaan Belanda bagaikan nila setitik dalam susu sebelanga. Oleh karena itu Gerwani ikut serta aktif dalam perjuangan Pembebasan Irian Barat serta pengembalian ke

¹⁴⁵ Wawancara, Sumini, mantan ketua Ikatan Pemuda Pelajar Indonesia (IPPI) cabang Pati, (Pati, tanggal 26 Mei 2009).

¹⁴⁶ Wawancara, Tumini Khadim, mantan pengurus Gerwani Cabang Semarang, (Semarang, tanggal 8 Juni 2009).

dalam kekuasaan Republik Indonesia. Implementasi dari program ini, Gerwani kota Semarang mencoba menggalang para sukarelawati untuk turut dikirim merebut Irian Barat. Pendaftaran sukarelawati ini dilakukan di masing-masing anak cabang di tiap-tiap kecamatan di kota Semarang.¹⁴⁷

B. Aktivitas Sosial Ekonomi

Program perjuangan yang dampaknya sangat berhubungan langsung dengan kaum perempuan adalah bidang ekonomi, sehingga bidang ini sangat diperhatikan oleh Gerwani. Adapun program perjuangan yang telah dilaksanakan oleh Gerwani diantaranya mengenai masalah lintah darat, bantuan kredit yang murah, pajak negara, kesejahteraan nelayan, pengendalian harga barang pokok, dan anggaran kesehatan.

1. Menuntut segera dilaksanakan Undang-undang Perkawinan yang melindungi persamaan hak wanita dan laki-laki sesuai dengan prinsip-prinsip Pasal 16 Piagam PBB yang berisi adanya larangan kawin paksa, perkawinan anak-anak, perkosaan dan perceraian yang sewenang-wenang terhadap wanita, serta perlindungan terhadap hak anak-anak yang orang tuanya bercerai. Pada waktu itu di Kota Semarang. Oleh karena itu, Gerwani berusaha menyelesaikan permasalahan tersebut, dengan cara mengajak berbicara dengan pihak terkait. Misalnya jika terjadi kekerasan dalam rumah tangga yang

¹⁴⁷ Wawancara, Tumini Khadim, mantan pengurus Gerwani Cabang Semarang, (Semarang, tanggal 9 September 2009).

dilakukan suami terhadap istrinya, maka anggota Gerwani mendatangi dan berbicara dengan suami tersebut. Jika suami itu tidak mau menghentikan perbuatannya, maka anggota Gerwani membantu istri untuk mengajukan gugatan cerai pada suaminya.¹⁴⁸

2. Menuntut jaminan upah sama bagi buruh wanita dan laki-laki untuk pekerjaan yang sama nilainya; jaminan hak sama bagi buruh/pegawai wanita dengan buruh/pegawai laki-laki untuk naik pangkat dan menduduki semua jabatan; jaminan hak untuk mengikuti segala kursus kejuruan dengan syarat-syarat yang sama dan memasuki segala lapangan pekerjaan. Pada waktu itu banyak dari anggota Gerwani di kota Semarang yang ikut aktif dalam Serikat Buruh Kereta Api.¹⁴⁹
3. DPC Gerwani kota Semarang mendesak dilaksanakannya Peraturan Pemerintah yang mengatur cuti hamil bagi buruh atau pegawai wanita di lapangan swasta maupun pemerintah, sehingga menghilangkan pembatasan-pembatasan dan kesulitan-kesulitan serta birokrasi untuk memudahkan setiap buruh/pegawai wanita mendapatkan cuti dan bantuan selama hamil tua, melahirkan anak, menggugurkan kandungan, menyusui anak-anaknya serta cuti haid. Sebagian besar

¹⁴⁸ Wawancara, Tumini Khadim, mantan pengurus Gerwani Cabang Semarang, (Semarang, tanggal 8 Juni 2009).

¹⁴⁹ Wawancara, Tumini Khadim, mantan pengurus Gerwani Cabang Semarang, (Semarang, tanggal 8 Juni 2009).

anggota Gerwani di kota Semarang adalah buruh yang bekerja di pabrik-pabrik, maka pernyataan sikap ini sangat membantu mereka.¹⁵⁰

4. Menuntut penghapusan diskriminasi mengenai hak-hak wanita dalam jabatan Kepala Desa/Pamong Desa dan segera dihapuskannya berbagai macam kerja tanpa dibayar yang pada hakekatnya sama dengan *rodi* dan *pologoro* yang sangat memberatkan kaum tani. Pada waktu itu, sebagian besar kepengurusan bagian wanita tingkat Rukun Tetangga di kota Semarang dijabat oleh wakil-wakil dari Gerwani.¹⁵¹
5. Menuntut pemberian bantuan kredit murah, mudah, dan panjang oleh Pemerintah kepada kaum tani, kaum nelayan, tukang-tukang pekerja tangan, dan pedagang kecil. Serta diperbanyak jumlah pasar dan alat perhubungan yang mudah dan murah, terutama di luar Jawa. Mengusahakan berdirinya koperasi-koperasi tani dan nelayan sampai ke desa-desa. Gerwani kota Semarang membentuk koperasi-koperasi sampai ke tingkat desa dan membantu usaha-usaha rumah tangga (misalnya menjahit, memasak, kerajinan tangan, dan industri-industri kecil lainnya).¹⁵²
6. Gerwani kota Semarang sering melakukan demonstrasi menuntut penurunan harga barang-barang pokok. Hal ini adalah wujud dari

¹⁵⁰ Wawancara, Tumini Khadim, mantan pengurus Gerwani Cabang Semarang, (Semarang, tanggal 9 September 2009).

¹⁵¹ Wawancara, Tumini Khadim, mantan pengurus Gerwani Cabang Semarang, (Semarang, tanggal 8 Juni 2009).

¹⁵² Wawancara, Tumini Khadim, mantan pengurus Gerwani Cabang Semarang, (Semarang, tanggal 8 Juni 2009).

tuntutan dilaksanakannya Program Sandang-Pangan antara lain dengan adanya pengendalian harga barang-barang pokok kebutuhan hidup sehari-hari terutama bahan makanan dan pakaian; dan dengan adanya pengikutsertaan wakil-wakil organisasi, terutama Buruh, Tani dan Wanita dalam Dewan Pertimbangan Distribusi. Mendesak Pemerintah agar mengambil tindakan tegas dan keras terhadap orang-orang yang melakukan penimbunan dan spekulasi-spekulasi, kemudian dengan sungguh-sungguh berusaha untuk mencukupi persediaan bahan pokok serta melaksanakan distribusi secara mudah, murah, dan merata, dengan jalan melewati koperasi-koperasi, RK-RK, RT-RT.¹⁵³

7. Menuntut diperbesarnya anggaran belanja untuk kesehatan dan kesejahteraan ibu dan anak. Balai-balai pengobatan, klinik-klinik persalinan, biro-biro konsultasi dan BKIA-BKIA (Balai Kesejahteraan Ibu dan Anak) serta jumlah bidan-bidan supaya diperbanyak sampai ke kecamatan-kecamatan. Pendidikan bagi dukun-dukun bayi serta pendidikan kesehatan Rakyat supaya diperluas dan diadakan peraturan tarif dokter/Bidan yang ringan dan harga obat-obatan yang murah.

C. Aktivitas Sosial Budaya

1. Gerwani di kota Semarang bersama golongan Lekra mengadakan operasi “Gempa Langit III”. Markas dari operasi ini di sebuah gang sempit di sebelah pasar Johar Semarang. Operasi ini dipimpin oleh

¹⁵³ Wawancara, Sumaun Utomo, Ketua Umum DPP LPR-KROB (Semarang, tanggal 25 Maret 2009).

Martian, seorang pelukis. Daerah yang menjadi sasaran operasi ini adalah wilayah Tambaklorok dan gang-gang kumuh di kota Semarang. Operasi Gempa Langit II merupakan bentuk turba (turun ke bawah) para seniman bersama rakyat. Realitas sosial di masyarakat akan menjadi ilham dari karya mereka. Hasil akhir dari gerakan turba ini kemudian dipamerkan di Semarang dan dibuka oleh Kepala Daerah kota Semarang pada 14 Juni 1959. Para perupa yang turut dalam pameran ini antara lain Batara Lubis, Fadjar Sidik, Martian, Djuli Sutrisno, Tarmizi.¹⁵⁴

2. Gerwani kota Semarang membentuk beberapa Sekolah Rakyat (sekarang SD) untuk membantu program pemerintah mengenai pemberantasan buta huruf. Hal tersebut merupakan bentuk nyata dari program Gerwani mengenai Tuntutan penambahan anggaran belanja pendidikan dan kebudayaan; penambahan gedung-gedung sekolah yang memenuhi syarat kesehatan dan sekolah-sekolah kejuruan; perluasan usaha pemberantasan Buta Huruf; serta peningkatan taraf kebudayaan nasional.¹⁵⁵
3. Menuntut perluasan Taman Kanak-Kanak dan pemberian bantuan oleh Pemerintah. Saat itu Gerwani sudah banyak mendirikan Taman Kanak-

¹⁵⁴ Rhoma Dwi Aria Yuliantri dan Muhidin M Dahlan, *Lekra Tak Membakar Buku* (Yogyakarta: Merakesumba, 2008), hlm 316-317.

¹⁵⁵ Wawancara, Tumini Khadim, mantan pengurus Gerwani Cabang Semarang, (Semarang, tanggal 8 Juni 2009).

kanak (TK) Melati di berbagai daerah di Indonesia, termasuk kota Semarang. Kurang lebih terdapat 60 TK melati di kota Semarang.¹⁵⁶

4. Pada tanggal 14 Mei 1964, bertempat di Gedung GRIS, diadakan rapat bersama Sarbufi (Sarekat Buruh Film) kota Semarang dan 16 organisasi massa termasuk Gerwani kota Semarang. Dalam rapat itu diambil keputusan untuk melakukan aksi pemboikotan film-film dari Amerika. Aksi turun ke jalan dilakukan dua hari setelah acara rapat bersama itu. Hal tersebut merupakan implementasi dari program Gerwani mengenai tuntutan pelarangan peredaran film dan penerbitan cabul yang mempropagandakan kejahatan dan perang; dan jaminan perluasan film/penerbitan yang bersifat mendidik sesuai dengan perkembangan jiwa anak-anak.¹⁵⁷

D. Gerwani dalam Periode Menjelang G30S 1965

Pada tahun 1958 anggota-anggota Gerwani mendorong kerjasama yang lebih kuat dan erat dengan golongan kiri yang ada dalam Kowani, dengan maksud agar Kowani menjadi menjadi peka terhadap masalah-masalah yang berhubungan dengan berbagai perjuangan golongan kiri. Tujuannya adalah agar Kowani

¹⁵⁶ Ketua Seksi Taman Kanak-kanak kota Semarang saat itu adalah Ibu Is Karna. Wawancara, Tumini Khadim, mantan pengurus Gerwani Cabang Semarang, (Semarang, tanggal 8 Juni 2009).

¹⁵⁷ Rhoma Dwi Aria Yuliantri dan Muhidin M Dahlan, *op.cit.*, hlm 268.

menjadi lebih peduli untuk memperjuangkan masalah-masalah yang berhubungan dengan kaum perempuan miskin.¹⁵⁸

Menjelang tahun 1965 Indonesia mengalami masa-masa yang sangat sulit. Sistem Demokrasi Terpimpin yang diterapkan pada tahun 1959 merupakan sebuah usaha di pihak Soekarno dan beberapa pemimpin nasional lainnya untuk menyelesaikan instabilitas negara. Demokrasi Terpimpin berusaha mencari pemecahannya melalui kompromi, bahkan konsensus, yang diarahkan oleh sebuah Negara yang otoriter. Namun tampaknya untuk melakukan konsensus dan kompromi pun semakin tidak mungkin. Perpecahan-perpecahan politik diskursus nasionalis terus saja terjadi dalam memperebutkan konsolidasi kekuasaan negara.¹⁵⁹

Konflik dan perdebatan politik dalam sistem politik Demokrasi Terpimpin telah tersebar luas selama awal tahun 1960-an hingga ke desa-desa dan kota-kota kecil di Indonesia. Kebencian ideologis dan komunal mencapai tingkat emosional yang tinggi. Bersamaan dengan itu, muncul sebuah aliansi kekuatan-kekuatan politik yang kuat karena gelisah melihat akhir dari pergolakan politik yang tengah berlangsung itu, sebagian besar dari mereka adalah orang-orang yang sangat anti komunis. Pada pertengahan tahun 1965 ketegangan dalam masyarakat Indonesia

¹⁵⁸ Hikmah Diniah, *Gerwani Bukan PKI, Sebuah Gerakan Feminisme Terbesar di Indonesia* (Yogyakarta: Carasvati Books, 2007), hlm. 167.

¹⁵⁹ Usaha-usaha yang dilakukan Soekarno sejak 1960 untuk membuat Front Nasional maupun teori yang disodorkan PKI pada tahun 1964 tentang “Dua Aspek dalam Kekuasaan Negara Republik Indonesia” sama-sama tidak mampu memberikan pemecahan terhadap kelemahan struktural sistem negara ini. Lihat Robert Cribb, *Pembantaian PKI di Jawa dan Bali 1965-1966* (Yogyakarta: Mata Bangsa, 2004), hlm. 96-97.

mencapai puncaknya. Sejumlah aksi sepihak yang dilakukan oleh BTI (Barisan Tani Indonesia)¹⁶⁰ di pedesaan telah sangat mengacaukan berbagai hubungan sosial. Laju tingkat inflasi menyebabkan kemiskinan luar biasa. Hubungan antara pimpinan Angkatan Darat dengan PKI menjadi semakin tegang, sedangkan Soekarno lebih condong ke pihak PKI.

Di tengah ketegangan situasi ini, beberapa perwira menengah AD melancarkan *putsch* militer. Mereka bermaksud untuk melindungi presiden dari rencana Dewan Jendral¹⁶¹, yang konon hendak menggulingkan Soekarno pada peringatan Hari Angkatan Perang tanggal 5 Oktober 1965. Para perwira tersebut diantaranya adalah Letkol Untung bin Syamsuri, komandan salah satu dari tiga batalyon pasukan kawal Presiden Soekarno (Cakra Bhirawa); Kolonel Latief, komandan Brigade Infanteri I; dan Mayor Udara Suyono. Mereka mempersiapkan rencana bersama Kamarusjaman alias Syam, Kepala Biro Khusus PKI (yang keberadaannya dirahasiakan) dan Supono. Pada waktu antara tanggal 30 September malam sampai 1 Oktober 1965 dini hari, pasukan militer dibawah komando mereka, menculik para jendral yang dipercaya sebagai anggota Dewan Jendral. Enam jendral (tiga diantaranya dibunuh ditempat) dan seorang letnan kemudian dibawa ke Pangkalan Angkatan Udara Halim yang disebut Lubang buaya. Tempat tersebut juga merupakan tempat latihan militer para sukarelawan

¹⁶⁰ Salah satu organisasi massa *underbow* PKI.

¹⁶¹ Isu Dewan Jendral bersumber dari rencana pembentukan Angkatan Kelima. Kelompok perwira AD yang tidak setuju dengan rencana tersebut dan tidak puas dengan presiden itu disebut Dewan Jendral. Selanjutnya isu berkembang menjadi rencana kup yang akan dilakukan oleh Dewan Jendral terhadap presiden. Lihat Soebandrio, *Kesaksianku Tentang G-30-S* (Jakarta: Tanpa Penerbit), hlm. 29.

Ganyang Malaysia, diantaranya ada anggota Gerwani dan sebagian besar anggota Pemuda Rakyat. Para jendral yang masih hidup kemudian dibunuh, dan mayat mereka semua dilempar ke sebuah sumur kering yang dalam.¹⁶²

Pada bulan Januari 1965, Sidang Pleno DPP Gerwani menyatakan semboyan di antaranya tentang Dwikora, peningkatan produksi, menyokong program ekonomi presiden dan *land reform*.¹⁶³ Pada awalnya Gerwani merupakan organisasi yang tidak berpolitik kepartaian, tetapi berpandangan politik. Dalam kancah kehidupan politik Indonesia, atas instruksi dari pemerintah, semua ormas harus mencari gandulan masing-masing pada salah satu partai dalam Nasakom atau pada golongan-golongan karya. Gerwani yang sudah merasa sangat dekat dengan PKI berencana mengambil keputusan secara resmi untuk menyatukan diri dengan partai pada kongres bulan Desember 1965.¹⁶⁴ Berdasarkan pidato Umi Sardjono, pada sidang pleno tahunan bulan Januari 1965 memutuskan perubahan status organisasi, dari organisasi non-politik atas dasar pendidikan dan perjuangan, menjadi organisasi massa perempuan komunis dan non-komunis progresif.¹⁶⁵ Sidang pleno tersebut juga memutuskan untuk mendirikan lembaga yang bernama Sri Panggihan, yang bertujuan mempelajari marxisme, dan

¹⁶² Saskia E. Wierenga, *Penghancuran Gerakan Perempuan di Indonesia* (Jakarta: Garba Budaya, 1999), hlm. 475-476.

¹⁶³ *Harian Rakjat*, 14 Januari 1965.

¹⁶⁴ Rencana ini tidak terlaksana karena telah didahului meletusnya peristiwa G30S

¹⁶⁵ *Harian Rakjat*, 28 Januari 1965.

menjadikan marxisme sebagai pelajaran dasar dalam sejumlah sekolah Gerwani.¹⁶⁶

Gerakan revolusioner yang dilakukan Gerwani mendapat penolakan keras dari golongan agamis terutama organisasi wanita Islam seperti Aisyah. Organisasi Aisyah ini memandang bahwa gerakan yang dilakukan oleh Gerwani sangat bertentangan dengan kodrat wanita terutama dari sudut pandang Islam. Gaya revolusioner yang dilakukan Gerwani juga mendapat tentangan keras dari organisasi wanita yang masih menggunakan gaya hidup tradisional dan feodal.¹⁶⁷

E. Penghancuran PKI dan Berakhirnya Gerwani di Semarang Pasca Peristiwa G30S

Situasi di kota Semarang, berkaitan dengan kabar penculikan dan pembunuhan sejumlah jendral di Jakarta, pada umumnya dalam kondisi tenang, walaupun masyarakat merasakan suhu politik sangat tinggi. Bahkan masih banyak warga masyarakat yang tidak mengetahui berita tentang G 30 S karena beritanya masih simpang siur. Kondisi sosial politik pun masih relatif tenang, hanya muncul saling curiga antar anggota masyarakat, partai atau organisasi yang berbeda.¹⁶⁸ Meskipun berita-berita yang diterima masyarakat, melalui radio maupun dari mulut ke mulut, mengatakan bahwa penculik dan pembunuh para jendral adalah PKI,

¹⁶⁶ *Harian Rakjat*, 4 Maret 1965.

¹⁶⁷ Diniyah, *op.cit.*, hlm. 168-169.

¹⁶⁸ Wawancara, Indarsih, mantan anggota Gerwani cabang Semarang (Semarang, 8 Juni 2009).

namun tidak ada tindakan apa pun yang dilakukan oleh partai atau organisasi massa lain sebelum 17 Oktober 1965.

Situasi berubah drastis ketika Resimen Para Komando Angkatan Darat (RPKAD) mulai melakukan gerakan operasi pembersihan. Kekuatan satu batalyon yang terdiri dari beberapa kompi RPKAD langsung dikirim dari Jakarta pada 17 Oktober 1965, dan tiba di Semarang pada 18 Oktober 1965. Keesokan harinya, sekitar pukul 23.00, RPKAD langsung beraksi menangkap orang-orang yang disinyalir menjadi anggota atau simpatisan PKI dan diduga terlibat dalam peristiwa G 30 S, setelah sebelumnya melakukan unjuk kekuatan dengan berkeliling kota Semarang. Batalyon itu dipimpin langsung oleh komandan RPKAD, Kolonel Sarwo Edhie Wibowo.¹⁶⁹

Kondisi Indonesia setelah terjadi peristiwa itu benar-benar mencekam. Pembantaian terhadap PKI dan ormas-ormasnya, termasuk Gerwani, dimulai beberapa saat setelah Presiden Soekarno mengumumkan Panglima Komando Strategis Angkatan Darat (Pangkostrad) Mayjen Soeharto sebagai pelaksana Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban (Kopkamtib) pada 3 Oktober 1965.¹⁷⁰ Setelah pengangkatan jenazah para jendral, markas-markas PKI di Jakarta diserang, bangunannya dirusak dan dibakar oleh massa yang marah akibat provokasi yang dimunculkan kalangan militer AD dibawah komando Soeharto.

¹⁶⁹ John Roosa, et al., *Tahun yang Tak Pernah Berakhir: Memahami Pengalaman Korban 65* (Jakarta: Elsam, 2004) hlm. 27-29.

¹⁷⁰ Soebandrio, *op.cit.*, hlm.75.

Pada tanggal 16 Oktober 1965 Presiden Soekarno mengangkat Soeharto menjadi Menpangad, menggantikan Ahmad Yani. Kemudian pada akhir Oktober 1965, atas perintah Soeharto, dibentuklah Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia (KAMI). KAMI lantas sering berdemo dengan didukung oleh pasukan RPKAD dan Komando Strategis Angkatan Darat (Kostrad).¹⁷¹ Selama bulan Oktober dan November 1965 dimulailah sebuah kampanye propaganda yang sengaja ditujukan untuk meningkatkan iklim ketakutan, keinginan untuk balas dendam, dan kebencian rakyat terhadap PKI dan para pendukungnya. Foto-foto yang diambil dari pengangkatan jenazah ketujuh korban yang dibantai itu dipertontonkan secara terbuka di media cetak, disertai dengan tulisan-tulisan sensasional yang menyebutkan bahwa para jendral itu sudah mengalami kekerasan seksual dan dicincang oleh para anggota Gerwani.¹⁷² Rakyat didorong untuk tidak memberi ampun kepada para pelaku peristiwa G 30 S, yang dikenal sebagai orang-orang PKI dan ormas-ormasnya. Secara terang-terangan mereka disebut sebagai pengkhianat, setan, pembunuh anak-anak,¹⁷³ dan perempuan-perempuan sundal.

Isu yang beredar menyebar dengan cepat, menyebutkan bahwa bangsa ini baru saja terhindar dari pembersihan massal yang direncanakan oleh PKI

¹⁷¹ *Ibid.*, hlm.76.

¹⁷² Mulai tanggal 2 Oktober 1965 Soeharto melakukan pembredelan (larangan terbit) tanpa hak kepada semua surat kabar kecuali harian Berita Yudha dan Angkatan Bersenjata yang digunakan sebagai media propaganda. Lihat Forum Kerjasama LPR-KROB, LPKP 65, PAKORBA, *Ringkasan Fakta Kebenaran: Korban Tragedi 1965* (Jakarta: Forum Kerjasama LPR-KROB, LPKP 65, PAKORBA, 2005), hlm. 35.

¹⁷³ Terbunuhnya seorang putri Jendral Nasution yang masih kecil, Ade Irma Suryani, yang terluka parah hingga meninggal dalam usaha untuk menculik Nasution pada peristiwa G 30 S.

terhadap orang-orang antikomunis.¹⁷⁴ Komando militer yang dipimpin oleh Soeharto menyebut gerakan tersebut dengan akronim Gerakan September Tiga Puluh (Gestapu). Istilah ini diduga dilontarkan oleh direktur harian Angkatan Bersenjata, Brigjen Sugandhi¹⁷⁵, dengan tujuan untuk menanamkan aura jahat yang diasosiasikan dengan istilah *Gestapo*, singkatan dari *Geheime Staatspolizei*, yaitu nama suatu kesatuan polisi rahasia Jerman semasa Hitler berkuasa dan dikenal sangat kejam.¹⁷⁶ Propaganda yang disebarakan menyebutkan seolah-olah telah terjadi penyiksaan, penyiletan kemaluan para jendral, pencukilan mata sambil bertelanjang menari-nari (disebut tarian harum bunga) yang dilakukan oleh Pemuda Rakyat¹⁷⁷ dan Gerwani di Lubang Buaya.¹⁷⁸

Keterlibatan Gerwani dalam peristiwa di Lubang Buaya dianggap sebagai wanita-wanita “murtad, keji, dan bagian dari organisasi komunis gila, yang telah menjadi tangan utama dalam penyiksaan dan pembunuhan para jendral”. Pada saat itu memang sejumlah sukarelawan wanita Pemuda Rakyat dan Gerwani berada di pusat latihan di dekat pangkalan Angkatan Udara Halim dalam rangka membantu perjuangan menghadapi konfrontasi dengan Malaysia. Tidak terlalu aneh jika partai, dalam hal ini PKI, memerlukan beberapa tenaga untuk kepentingannya,

¹⁷⁴ Robert Cribb, *op.cit.*, hlm. 86.

¹⁷⁵ Sejak tahun 1970 istilah Gestapu pada umumnya diganti dengan G 30 S. *Ibid.*, hlm. 84.

¹⁷⁶ Sudjinah, *Terempas Gelombang Pasang* (Jakarta: Pustaka Utan Kayu, 2003), hlm. x.

¹⁷⁷ Salah satu organisasi massa *underbow* PKI.

¹⁷⁸ Wierenga, *op.cit.*, hlm. 498.

maka Gerwani selalu siap mengutus anggotanya.¹⁷⁹ Di sisi lain, pimpinan pusat Gerwani tidak pernah membahas, apalagi memberikan instruksi kepada anggota-anggota yang ada di daerah untuk ikut dalam gerakan tersebut.¹⁸⁰ Sukarelawati yang pernah melakukan latihan di Halim bukan hanya Gerwani, tetapi juga wanita dari organisasi lain yang tergabung dalam anggota Front Nasional (di antaranya Perwari, Wanita Marhaen, Wanita Islam, Aisyah, dan Muslimat), yang melakukan latihan-latihan kesenian dan tari-tarian untuk pertunjukan pada acara ASEAN Games. Saat peristiwa G 30 S tersebut terjadi, kebetulan yang berada di lokasi adalah sebagian besar dari anggota Pemuda Rakyat, selebihnya adalah beberapa orang anggota Gerwani, SOBSI, BTI, dan beberapa istri prajurit Cakrabhirawa.¹⁸¹ Berdasarkan cerita dari salah satu istri prajurit Cakrabhirawa, Gerwani dan sukarelawati yang ada di Lubang Buaya pada peristiwa itu tidak pernah melakukan apapun seperti yang telah dituduhkan pada mereka.¹⁸²

Menurut keterangan dari pihak militer AD, pada tanggal 1 Oktober 1965 melalui RRI Semarang, Asisten I Kodam VII/Diponegoro Kolonel Sahirman mengumumkan dukungan terhadap G 30 S/PKI pusat. Mereka telah menguasai Kodam VII/Diponegoro yang kemudian dijadikan sebagai pusat gerakannya.¹⁸³

¹⁷⁹ Diniyah, *op.cit.*, hlm. 175-176.

¹⁸⁰ Sulami, *Perempuan-Kebenaran dan Penjara: Kisah Nyata Wanita yang Dipenjara 20 Tahun Karena Tuduhan Makar dan Subversi* (Jakarta: Cipta Lestari, 1999), hlm. 2-3.

¹⁸¹ Diniyah, *op.cit.*, hlm. 178.

¹⁸² Wierenga, *op.cit.*, hlm. 504.

¹⁸³ Pihak militer AD menganggap bahwa PKI, yang memiliki simpatisan dalam tubuh AD, adalah dalang dari peristiwa G 30 S. Anonim, *Sirnaning Jekso*

Muncul banyak reaksi dari PKI dan ormas-ormasnya. Reaksi dari Dewan Pimpinan Daerah Gerwani Jawa Tengah antara lain dengan mengeluarkan Pengumuman No. 0151/DPD/65 tanggal 5 Oktober 1965, yang menyatakan bahwa Gerakan 30 September semata-mata masalah intern AD, yang penyelesaiannya dipercayakan kepada kebijaksanaan Presiden/Panglima Tertinggi/Pemimpin Besar Revolusi Bung Karno.¹⁸⁴

Kaum agama mengadakan rapat akbar dengan tema mensukseskan Konferensi Asia Afrika (KAA) II dan mengutuk G 30 S/PKI¹⁸⁵ pada tanggal 12 Oktober 1965 di Semarang. Rapat tersebut dihadiri oleh golongan Islam, Katholik, dan Sad Tunggal Jawa Tengah.¹⁸⁶ Setelah rapat selesai, kemudian dilanjutkan dengan pawai keliling kota Semarang. Di sepanjang jalan mereka mencabuti papan-papan nama PKI dan ormas-omasnya. Seusai pawai bubar terjadi insiden antara beberapa Pemuda Islam yang kebetulan lewat depan kantor Komite Daerah Besar - Partai Komunis Indonesia (CDB-PKI) kota Semarang dipanggil oleh anggota PKI dan dianiaya sehingga terluka dan dibawa ke rumah sakit.¹⁸⁷

Pada tanggal 12 Oktober 1965 di Semarang, juga diadakan pertemuan yang dihadiri oleh Pemuda Marhaen, Gerakan Pemuda Anshor (GP-Anshor),

Katon Gapuraning Ratu (Semarang: Sejarah TNI-AD Kodam VI/Diponegoro, 1971), hlm. 197.

¹⁸⁴ Anonim, *Ungkapan Fakta-Fakta Sekitar Peristiwa G 30 S di Jateng* (Semarang: Angkatan Darat Kodam VII/Diponegoro, 1965), hlm. 31-35.

¹⁸⁵ Akronim G 30 S/PKI merupakan versi dari pemerintahan Orde Baru dan golongan yang kontra terhadap PKI serta ormas-ormasnya.

¹⁸⁶ *Suara Merdeka*, tanggal 13 Oktober 1965.

¹⁸⁷ Anonim 1965, *op.cit.*, hlm. 42.

Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI), dan Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII). Dalam pertemuan tersebut telah disepakati adanya tekad bersama dalam rangka mengikis habis Gerakan 30 September yang kontra revolusioner. Di samping itu, juga membantu TNI AD dalam usaha penertiban dan pengamanan serta bertekad bulat untuk menyelesaikan revolusi nasional.¹⁸⁸

Pada hari Rabu dan Kamis tanggal 20 dan 21 Oktober 1965 terjadi demonstrasi yang dilakukan oleh massa disertai dengan pengrusakan dan pembakaran. Massa mendatangi gedung-gedung, kantor-kantor, dan sekolah-sekolah. Kemudian mereka mencari dokumen-dokumen yang dianggap perlu sebagai bahan bukti atas keterlibatan PKI dalam G 30 S. Massa yang tidak terkendali marahnya itu menyerbu gedung CDB-PKI yang terletak di jalan Imam Bonjol, menyita dokumen, dan selanjutnya membakar gedung tersebut. Di sepanjang jalan, massa yang semakin banyak meneriakkan Hidup Bung Karno, Hidup ABRI, Hidup RPKAD, Ganyang G 30 S, dan terdengar pula seruan Allahu Akbar. Mereka terus berjalan dan berbaris teratur menuju gedung Komite Kota – Partai Komunis Indonesia (CK-PKI) di jalan Pemuda, mengeluarkan isi kantor tersebut dan dibakar. Kemudian mereka menuju ke Universitas Res Publika di jalan Pemuda. Massa yang sudah habis kesabarannya mengeluarkan isi gedung dan dibakar di luar. Gerakan yang semula dilakukan oleh para pemuda, menjadi semakin besar dengan ikutnya anak-anak sekolah dan buruh-buruh yang hari itu semestinya mereka sekolah dan bekerja.¹⁸⁹

¹⁸⁸ *Suara Merdeka*, tanggal 16 Oktober 1965.

¹⁸⁹ *Suara Merdeka*, tanggal 21 Oktober 1965.

Selanjutnya gerakan massa mendatangi Serikat Buruh Kereta Api (SBKA) di jalan Tamrin, mengeluarkan isi kantor tersebut dan dibakar di tengah jalan. Kantor Serikat Organisasi Buruh Seluruh Indonesia (SOBSI) di Kebon Sayur juga dikeluarkan barang-barangnya kemudian dibakar. Di sepanjang jalan yang mereka lewati, gerakan massa telah mencabuti papan-papan nama PKI, Pemuda Rakyat, SOBSI, dan Gerwani. Papan-papan tersebut dikumpulkan dan dibakar di jalan Raden Patah. Selama massa melakukan demonstrasi, kemarahan mereka benar-benar tertuju pada tempat-tempat PKI. Para demonstran telah membakar buku-buku, majalah-majalah Tiongkok Rakyat, Peking News, dan lain-lain. Mereka beranggapan melalui media pers tersebut PKI dapat menyebarkan faham dan informasinya. Bendera merah putih dan gambar presiden diselamatkan. Sebuah gambar D.N. Aidit yang diketemukan di gedung CK-PKI jalan Pemuda telah digantung bersama-sama di tengah jalan yang terlebih dahulu dilubangi bagian mata dan telinganya. Foto-foto D.N. Aidit yang tergambar bersama tokoh-tokoh luar negeri kebanyakan diketemukan di gedung CDB-PKI jalan Imam Bonjol, oleh massa dirobek-robek di sepanjang jalan.¹⁹⁰

Sampai sore hari gerakan massa bertambah besar pengikutnya. Gedung-gedung, kantor-kantor, dan tempat-tempat yang digunakan sebagai kegiatan PKI yang berdekatan dengan rumah penduduk tidak dibakar, melainkan hanya dikeluarkan isinya, kemudian dibakar di luar. Rumah yang dirusak antara lain rumah Tio Sek Kee, pemilik perusahaan rokok Prau Layar, di jalan Dr. Cipto. Massa menganggap pemilik perusahaan tersebut adalah kaisar G 30 S dan

¹⁹⁰ *Ibid.*

penyokong kebutuhan ekonomi PKI. Massa mengeluarkan barang-barang mewah, antara lain dua buah mobil *pick up*, piringan hitam, *tape recorder*, mesin jahit, empat buah TV, dan lain-lain. Semua barang tersebut dibakar dengan mendapat sambutan meriah dari rakyat yang menyaksikan. Pada hari yang sama, massa yang bergerak juga menyerbu pabrik rokok Pak Tani yang kemudian dibakar. Disamping itu dua buah kendaraan *Humel* dan sebuah sepeda motor juga ikut dibakar. Kemudian mereka berbaris teratur menuju asrama CGMI di jalan Widoharjo dan selanjutnya ke gedung harian *Gerakan Massa* di jalan Taman Srigunting yang juga dibakar. Gedung-gedung yang hanya dirusak, selanjutnya oleh massa dinyatakan sebagai milik Front Pemuda. Sampai petang hari gerakan massa masih terus bergerak. Mereka mencari rumah-rumah pemimpin PKI Jawa Tengah dan Kota Semarang, yakni Musaji dan Hadi Susanto di jalan Erlangga, Rewang di jalan Sompok, serta Maspain dan Tjokro Harsojo di jalan Mangga. Begitu pula dengan rumah Tan Swie Tjam di Peterongan dan rumah RK Kampung Jeruk, Mustajab. Isi rumah para tokoh partai ini dikeluarkan kemudian dibakar di depan rumah mereka.¹⁹¹

Kejadian ini dilanjutkan keesokan harinya pada hari Kamis 21 Oktober 1965. Beberapa bangunan milik PKI maupun ormas-ormasnya yang masih utuh mendapat giliran untuk dirusak dan dibakar. Sasaran dari gerakan yang dilakukan golongan nasionalis dan agama ini adalah pabrik rokok Prau Layar di jalan Siliwangi. Empat buah truk milik pabrik tersebut yang berada di luar gedung telah digulingkan di pinggir jalan dan kemudian dibakar. Selain itu gedung sekolah di

¹⁹¹ *Ibid.*

jalan Gajah Mada, rumah makan Lido di jalan Pemuda, Toko Semarang di jalan Pemuda, toko sepeda, pengusaha becak Aroma di depan masjid besar Kauman Semarang, Taman Kanak-kanak Baperki di jalan Mawar, dan toko di Peterongan juga menjadi sasaran massa untuk dibakar.¹⁹²

Penangkapan dan penahanan sewenang-wenang juga dialami oleh kaum wanita. Setelah masuk tahanan sering kali kekerasan dalam bentuk pelecehan seksual dan pemerkosaan mereka alami. Bentuk represi yang dialami anggota-anggota Gerwani kota Semarang terjadi pada kurun waktu bulan Oktober tahun 1965. Mereka awalnya dibawa ke kecamatan masing-masing baru kemudian dibawa ke penjara wanita Bulu selama kurang lebih 5 tahun (1966-1971).¹⁹³

Pada tahun 1971 anggota-anggota Gerwani yang ditahan di penjara wanita Bulu dipindahkan ke Plantungan.¹⁹⁴ Aktivitas penangkapan bukan monopoli aparat keamanan, namun dilakukan juga oleh warga sipil anggota beberapa organisasi massa, seperti Ansor dan Pemuda Marhaen. Kelompok sipil ini bertindak atas kemauan sendiri karena terprovokasi oleh propaganda tentara yang disebarkan melalui media massa.¹⁹⁵ Kantor Gerwani kota Semarang yang berada

¹⁹² *Ibid*

¹⁹³ Wawancara, Tumini Khadim, mantan pengurus Gerwani Cabang Semarang, (Semarang, tanggal 8 Juni 2009).

¹⁹⁴ Tidak semua tahanan wanita dipindahkan ke Plantungan, hanya tokoh Gerwani berpengaruh yang dipindah ke sana. Sementara tahanan lainnya dibebaskan dengan syarat dikenai wajib lapor (ada yang seminggu sekali dan sebulan sekali). Wawancara, Tumini Khadim, mantan pengurus Gerwani Cabang Semarang, (Semarang, tanggal 8 Juni 2009).

¹⁹⁵ Roosa, *op.cit.*, hlm 34.

di jalan Pemuda menjadi sasaran amuk massa, antara lain dengan membakar dokumen-dokumen yang ada di dalam kantor.¹⁹⁶

Pada pertengahan bulan Oktober 1965, kelompok-kelompok pemuda antikomunis di Jawa Tengah dan Jawa Timur, yang kebanyakan berasal dari organisasi-organisasi Islam dan Kristen, didukung oleh pasukan RPKAD, mulai melakukan pembantaian terhadap orang-orang yang diduga menjadi simpatisan PKI dan ormas-ormasnya, dengan instruksi dari Jakarta untuk memulihkan ketertiban dan menghancurkan sisa-sisa G 30 S itu. RPKAD melatih dan mempersenjatai kelompok-kelompok pemuda antikomunis dengan tujuan khusus untuk menghancurkan PKI dan ormas-ormasnya. Kegiatan serupa juga terjadi di berbagai daerah di Indonesia, dibantu oleh kesatuan-kesatuan khusus Kostrad dan kesatuan-kesatuan lain dari komando militer regional.¹⁹⁷

Penangkapan-penangkapan atas anggota, pengurus ataupun simpatisan Gerwani di kota Semarang memiliki pola-pola yang hampir sama dengan daerah lain, yaitu para anggota Gerwani yang ditangkap ini pertama kali dikumpulkan di kantor kelurahan/kecamatan, kamp-kamp konsentrasi. Tempat-tempat yang dijadikan kamp ini ada yang semula adalah gedung sekolah milik Baperki (Badan Permusyawaratan Kewarganegaraan Indonesia). Dalam penahanan di kelurahan atau kecamatan juga dilakukan interograsi disertai penyiksaan. Lalu dari masing-

¹⁹⁶ Wawancara, Indarsih, mantan anggota Gerwani cabang Semarang (Semarang, 8 Juni 2009).

¹⁹⁷ Robert Cribb, *op.cit.*, hlm. 87-88.

masing kelurahan/kecamatan, para Gerwani ini dibawa ke kamp *Beteng* Ambarawa atau ke LP Bulu. Setelah itu baru dibawa ke Plantungan-Kendal.¹⁹⁸

Pada bulan Desember 1965 hingga bulan Maret 1966 cara penanganan dengan aksi kekerasan yang dilakukan oleh negara bergeser dari pembantaian-pembantaian yang didukung militer di tingkat lokal ke arah penangkapan dan penahanan yang lebih tersentralisasi terhadap sisa-sisa Orde Lama, yang dilakukan melalui aparat Kopkamtib. Peralihan kekuasaan negara dari Orde Lama ke Orde Baru berakhir pada bulan Maret 1966, saat Presiden Soekarno terpaksa menanda tangani surat yang terkenal dengan Surat Perintah Sebelas Maret (Supersemar), yang memberikan kekuasaan kepada Soeharto, Menteri/Panglima Angkatan Darat (Menpangad).¹⁹⁹ Kemudian setelah itu Soeharto mengeluarkan dekrit atas nama presiden yang menyatakan bahwa PKI adalah ilegal dan memerintahkan dibubarkannya partai itu beserta seluruh organisasi yang berafiliasi di bawahnya.²⁰⁰

¹⁹⁸ Wawancara, Indarsih, mantan anggota Gerwani cabang Semarang (Semarang, 11 September 2009) dan Heryani Busono (mantan Anggota HSI /Himpunan Sarjana Indonesia), Semarang, tanggal 12 September 2009.

¹⁹⁹ *Ibid.*, hlm. 91.

²⁰⁰ Lampiran B.

BAB V

SIMPULAN

Para wakil enam organisasi wanita berkumpul di Semarang pada 4 Juni 1950 untuk melebur enam organisasi mereka masing-masing ke dalam satu wadah tunggal, yaitu Gerwis. Enam organisasi tersebut ialah Rukun Putri Indonesia (Rupindo) dari Semarang, Persatuan Wanita Sedar dari Surabaya, Isteri Sedar dari Bandung, Gerakan Wanita Indonesia (Gerwindo) dari Kediri, Wanita Madura dari Madura, dan Perjuangan Putri Republik Indonesia dari Pasuruan. Kota Semarang dipilih sebagai basis Gerwis, karena secara historis merupakan “Kota Merah”. Di kota inilah lahirnya PKI. Pemimpin Gerwis yang sangat terkemuka, Ibu Munasiah, yang berbicara dengan garangnya dalam Kongres PKI 1924 dan dibuang ke Digul, berasal dari kota ini. Kongres Gerwis pertama kali diselenggarakan pada 17-22 Desember 1951 di Surabaya. Tindakan penting yang diambil pada Kongres I ialah mengecilkan sayap feminis di dalam organisasi dan berusaha mengkonsolidasi pengaruh PKI terhadap pimpinan organisasi. Pada Kongres II bulan Maret 1954 di Jakarta bertema hak-hak wanita dan anak-anak, kemerdekaan dan perdamaian. Sesuai dengan keputusan yang diambil dalam Kongres I, Gerwis diubah menjadi Gerwani.

Aktivitas Gerwani di kota Semarang sesuai dengan hal-hal yang tercantum dalam Program-Program Kerja Gerwani. Meskipun program-program kerja tersebut baru dibuat dan dikeluarkan pada tahun 1964, namun sebelumnya sudah diterapkan di daerah-daerah termasuk di kota Semarang. Program kerja Gerwani

di kota Semarang antara lain membentuk koperasi-koperasi sampai ke tingkat desa dan membantu usaha-usaha rumah tangga (misalnya menjahit, memasak, kerajinan tangan, dan industri-industri kecil lainnya). Kemudian Gerwani kota Semarang sering melakukan demonstrasi menuntut penurunan harga barang-barang pokok. Selain itu Gerwani kota Semarang juga membentuk beberapa Sekolah Rakyat (sekarang SD) untuk membantu program pemerintah mengenai pemberantasan buta huruf.

Setelah peristiwa G30S berlangsung, maka terjadi penumpasan anggota PKI dan ormas-ormasnya. Penumpasan tersebut berupa tindakan represi bahkan pembunuhan terhadap anggota PKI dan ormas-ormasnya, termasuk Gerwani. Kaum wanita yang merupakan anggota Gerwani dan yang dituduh sebagai anggotanya, mengalami penderitaan karena ditangkap, ditahan, disiksa, dipenjarakan, dibuang, juga diperkosa bergiliran dan dilecehkan martabat kemanusiaannya, dihancurkan rumahtangganya, serta difitnah habis-habisan. Aksi pelecehan seksual dan perkosaan terhadap tapol wanita dalam tahanan seringkali menyebabkan yang bersangkutan hamil dan melahirkan. Mereka mengalami penderitaan luar biasa, baik lahir maupun batin.

Bentuk represi yang dialami anggota-anggota Gerwani kota Semarang terjadi pada kurun waktu bulan Oktober tahun 1965. Proses penangkapan anggota Gerwani memiliki pola tertentu, mereka awalnya dibawa ke kecamatan masing-masing baru kemudian dibawa ke penjara wanita Bulu selama kurang lebih 5 tahun (1966-1971). Pada tahun 1971 anggota-anggota Gerwani yang ditahan di penjara wanita Bulu dipindahkan ke Plantungan-Kendal.

Akibat peristiwa G30S 1965 membuat pemerintah bertindak dengan membubarkan PKI beserta seluruh organisasi yang berafiliasi di bawahnya dan dinyatakan sebagai organisasi ilegal. Bersamaan dengan keputusan tersebut, maka aktivitas Gerwani di Indonesia dinyatakan tamat.

Daftar Pustaka

- Abdullah, Hamid. "Hinduisme, Islam dan Masyarakat Jawa", dalam *Lembaran Sastra*. No. 10. (Semarang: Fakultas Sastra Undip, 1986)
- Abdullah, Taufik . *Sejarah lokal di Indonesia* (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1985).
- Abdullah, Taufik dan Abdurrahman Surjomihardjo, eds. *Ilmu Sejarah dan Historiografi: Arah dan Perspektif* (Jakarta: Gramedia, 1985).
- Anonim, *Republik Indonesia: Propinsi Jawa Tengah* (Semarang: Kementrian Penerangan RI, 1953)
- Anonim. *Ungkapan Fakta-Fakta Sekitar Peristiwa G30S di Jateng*. (Semarang: Peperda Jateng, 1965)
- Anonim. *Ungkapan Fakta-fakta Sekitar G 30 S di Jateng*. (Semarang: Angkatan Darat Kodam VII/Diponegoro, 1965)
- Anonim, *Ungkapan Fakta-Fakta Sekitar Peristiwa G 30 S di Jateng* (Semarang: Angkatan Darat Kodam VII/Diponegoro, 1965)
- Anonim. *Mengenal Kotamadya Semarang*. (Semarang: Pemda Dati II Semarang, 1968)
- Anonim, *Perkembangan Penduduk Kota Semarang dalam Master-Plan*, (Semarang: Pemerintah Daerah, 1970)
- Anonim, *Sirnaning Jekso Katon Gapuraning Ratu* (Semarang: Sejarah TNI-AD Kodam VI/Diponegoro, 1971)
- Anonim. *Rangkaian Peristiwa Pemberontakan Komunis di Indonesia 1926-1948-1965*. (Jakarta: Lembaga Studi Ilmu-ilmu Kemasyarakatan, 1988)
- Badan Perencanaan Daerah Tingkat II Semarang, 1976.
- Budiardjo, Miriam. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. (Jakarta: PT Gramedia, 1981).
- _____. *Partisipasi dan Partai Politik, sebuah Bunga Rampai*. (Jakarta: PT Gramedia, 1981)
- _____. *Dasar-dasar Ilmu Politik* (Jakarta: Gramedia, 2003)
- Cribb, Robert. *Pembantaian PKI di Jawa dan Bali 1965-1966* (Yogyakarta: Mata Bangsa, 2004)

- Departemen P dan K, *Geografi Budaya Daerah Jawa Tengah* (Semarang: Proyek Pengembangan Media Kebudayaan Departemen P dan K, 1977)
- Diniah, Hikmah. *Gerwani Bukan PKI, Sebuah Gerakan Feminisme Terbesar di Indonesia* (Yogyakarta: Carasvati Books, 2007)
- Forum Kerjasama LPR-KROB, LPKP 65, PAKORBA, *Ringkasan Fakta Kebenaran: Korban Tragedi 1965* (Jakarta: Forum Kerjasama LPR-KROB, LPKP 65, PAKORBA, 2005)
- Gottschalk, Louis. *Mengerti Sejarah* (Jakarta: Universitas Indonesia, 1986).
- Irawan, et al. *Ekonomi Pembangunan*. (Yogyakarta: Liberty Offset, 1972)
- Ismail. *Wawasan Jatidiri dalam Pembangunan Daerah*. (Semarang: Effhar dan Dhahara Prize, 1989)
- Kartodirdjo, Sartono. et al. *Sejarah Nasional Indonesia IV*. (Jakarta: P&K, 1977).
- _____. *Pendekatan Ilmu Sosial Dalam Metodologi Sejarah* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1993).
- Kartono, Kartini. *Pengantar Metodologi Riset*. (Bandung: Alumni, 1980)
- Koentjaraningrat. *Manusia dan Kebudayaan Indonesia*. (Jakarta: Jambatan, 1971)
- _____. *Metode-metode Penelitian Masyarakat*. (Jakarta: PT Gramedia, 1983)
- Kongres Wanita Indonesia, *Sejarah Setengah Abad Pergerakan Wanita Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1978).
- Notosusanto, Nugroho. et al. *Sejarah Nasional Indonesia VI*. (Jakarta: PN Balai Pustaka, 1984)
- Nurliana, Nana dkk. *Peranan Wanita Indonesia Di Masa Perang Kemerdekaan 1945-1950* (Jakarta: Depdikbud Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional, 1986).
- Pane, Armijn. *Habis Gelap Terbitlah Terang* (Jakarta: Balai Pustaka, 1949)
- Pemerintah Daerah Kotamadya Dati II Semarang, *Kotamadya Semarang Dalam Angka 1971* (Semarang: Pemda Kotamadya Semarang, 1971)
- _____, *Sejarah Kota Semarang* (Semarang: Pemda Kotamadya Semarang, 1979)

_____, *Semarang Masa Lalu, Masa Sekarang, dan Masa Mendatang* (Semarang: Pemda Dati II Semarang, 1979)

Primariantari, Rudiah dkk. *Perempuan dan Politik Tubuh Fantastis* (Yogyakarta: Kanisius, 1998).

Pringgodigdo, A.K. *Sejarah Pergerakan Rakyat Indonesia* (Jakarta: PT. Dian Rakyat, 1967)

Reksodihardjo, Soegeng. et al. *Arsitektur Tradisional Daerah Jawa Tengah*. (Semarang: P&K, 1984)

Ricklefs, M.C. *Sejarah Indonesia Modern*. (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1991)

Ridjal, Fauzi dkk. *Dinamika Gerakan Perempuan di Indonesia* (Yogyakarta: PT. Tiara Wacana, 1993).

Rochwulaningsih, Yety. et al. *Peranan Wanita Jawa Tengah Dalam Perjuangan Bangsa Indonesia Abad XX* (Museum Negeri Provinsi Jawa Tengah “Ronggowarsito”, 1996)

Roosa, John. et al., *Tahun yang Tak Pernah Berakhir: Memahami Pengalaman Korban 65* (Jakarta: Elsam, 2004)

Shadily, Hasan. *Ensiklopedi Indonesia* (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1982)

Smelser, Neil J. *Theory of Collective Behavior* (London: Routledge & Kegan Paul, 1962)

Siregar, Bakri. “Telah Lahir Suatu Angkatan: Sebuah Tinjauan Sastra”, dalam *Prisma*. No. 2. Februari 1980.

Soebandrio, *Kesaksianku Tentang G-30-S* (Jakarta: tanpa penerbit)

Soekanto, Soerjono. *Sosiologi: Suatu Pengantar*. (Jakarta: Yayasan Penerbit UI, 1969)

Soekirno, *Semarang* (Semarang: Departemen Penerangan Kota Besar Semarang, 1956)

Soenaryo, et al. *Mengenal Kotamadya Semarang II*. (Semarang: Pemerintah Daerah, 1972)

Soeroto, Sitisemandari. *Kartini: Sebuah Biografi* (Jakarta: Gunung Agung, 1979)

Sudjinah, *Terempas Gelombang Pasang* (Jakarta: Pustaka Utan Kayu, 2003)

- Sulami, *Perempuan-Kebenaran dan Penjara: Kisah Nyata Wanita yang Dipenjara 20 Tahun Karena Tuduhan Makar dan Subversi* (Jakarta: Cipta Lestari, 1999)
- Suratmin, dkk. *Biografi Tokoh Perempuan Indonesia Pertama* (Jakarta: Depdikbud Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional, 1991).
- Suwondo, Nani. *Kedudukan Wanita Indonesia Dalam Hukum dan Masyarakat* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1981).
- Wibisono, Cristianto. et al. *Pemuda Indonesia dalam Dimensi Sejarah Perjuangan Bangsa*. (Jakarta: Kurnia Era, 1982)
- Wierenga, Saskia E. *Penghancuran Gerakan Perempuan di Indonesia* (Jakarta: Garba Budaya, 1999).
- Wiyono, R. *Organisasi Kekuatan Sosial Politik di Indonesia*. (Bandung: Alumni, 1982)
- Yuliantri, Rhoma Dwi Aria dan Muhidin M Dahlan, *Lekra Tak Membakar Buku* (Yogyakarta: Merakesumba, 2008)

DAFTAR INFORMAN

1. Nama : Sumaun Utomo
Umur : 80 tahun
Pekerjaan : Mantan Ketua Seksi sejarah CCPKI
Alamat : Singotero, Semarang
2. Nama : Heryani Busono
Umur : 76 tahun
Pekerjaan : Mantan anggota HSI
Alamat : Blimbing Raya, Semarang
3. Nama : Sumini
Umur : 63 tahun
Pekerjaan : Mantan anggota IPPI
Alamat : Runting, Pati.
4. Nama : Tumini Khadim
Umur : 77 tahun
Pekerjaan : Mantan anggota Gerwani Semarang
Alamat : Jl. Singa Tengah, Semarang
5. Nama : Endang Mardiningsih
Umur : 80 tahun
Pekerjaan : Mantan anggota Gerwani Semarang
Alamat : Jl. Beruang, Semarang

6. Nama : Indarsih
Umur : 78 tahun
Pekerjaan : Mantan anggota Gerwani Semarang
Alamat : Sampangan, Semarang
7. Nama : Ibu Warsono
Umur : 75 tahun
Pekerjaan : Mantan anggota Gerwani Semarang
Alamat : Genuk Perbalan, Semarang
8. Nama : Rondiyah
Umur : 74 tahun
Pekerjaan : Mantan anggota Gerwani Semarang
Alamat : Semarang
9. Nama : Ragil
Umur : 74 tahun
Pekerjaan : Mantan guru PGRI Non Vak Sentral
Alamat : Sampangan, Semarang
10. Nama : Ibu Rakhim
Umur : 70 tahun
Pekerjaan : Istri anggota PKI Purwodadi
Alamat : Grobogan, Purwodadi.

Lampiran A

Program Kerja Gerwani

Hak-hak Wanita:

1. Hak sama dengan laki-laki dalam semua lapangan supaya dijamin, sesuai dengan pasal 27 Undang-undang Dasar 1945 RI yang menjamin kedudukan dan hak sama bagi warganegara wanita dan laki-laki. Undang-undang dan peraturan-peraturan yang memungkinkan berlakunya diskriminasi bagi kaum wanita supaya dihapus. Dilaksanakannya Undang-undang No. 68 tahun 1959 tentang persetujuan Konvensi Hak-hak Politik bagi Wanita.
2. Supaya segera dilaksanakan Undang-undang Perkawinan yang melindungi persamaan hak wanita dan laki-laki sesuai dengan prinsip-prinsip Pasal 16 Piagam PBB. Dalam Undang-undang itu supaya dilarang adanya kawin paksa, perkawinan anak-anak, perkosaan dan perceraian yang sewenang-wenang, terhadap wanita, dan hak anak-anak yang orang tuanya bercerai supaya dilindungi.
3. Hak sipil bagi wanita supaya dijamin dan dilaksanakan, misalnya dalam perkawinan campuran supaya kaum wanita berhak memilih kewarganegaraannya sendiri sesuai dengan Undang-undang kewarganegaraan.
4. Supaya PP 19 tahun 1952 diganti dengan Peraturan Pensiun Janda dan Yatim Piatu yang adil, dan pengeluaran pensiun supaya dipermudah.
5. Badan-badan seperti BPPPP (Badan Penasehat Perkawinan dan Penyelesaian Perceraian) dan PPPPP (Panitia Penasehat Perkawinan dan Penyelesaian Perkawinan) di daerah-daerah supaya diperluas, dimana duduk wakil-wakil dari organisasi wanita yang luas. Pembelaannya supaya merata sampai daerah-daerah.
6. Dilaksanakannya Undang-undang pokok Kepegawaian dengan segera dikeluarkannya peraturan Pemerintah yang mengatur pelaksanaan Konvensi ILO No. 100 tentang jaminan upah sama bagi buruh wanita dan laki-laki untuk pekerjaan yang sama nilainya.

Dilaksanakannya jaminan hak sama bagi buruh/pegawai wanita dengan buruh/pegawai laki-laki untuk naik pangkat dan menduduki semua jabatan hak untuk mengikuti segala kursus kejuruan dengan syarat-syarat yang sama dan memasuki segala lapangan pekerjaan.

7. Mendesak dilaksanakannya peraturan Pemerintah yang mengatur cuti hamil bagi buruh/pegawai wanita dilapangan Swasta maupun Pemerintah. Sedemikian rupa sehingga menghilangkan pembatasan-pembatasan dan kesulitan-kesulitan serta birokrasi untuk memudahkan setiap buruh/pegawai wanita mendapatkan cuti dan bantuan selama hamil tua, melahirkan anak, menggugurkan kandungan, serta menjusukan anak-anaknya dan cuti haid.

8. Dilaksanakan keamanan dan keselamatan kerja bagi buruh atau pegawai wanita dan diadakannya tempat penitipan bayi yang memenuhi syarat kesehatan, Taman Kanak-kanak, diperusahaan Pemerintah dan swasta dan jawatan-jawatan yang banyak buruh atau pegawai wanitanya.

9. Mendesak kepada Pemerintah supaya segera dikeluarkan Undang-undang yang mengatur hubungan-hubungan kerja yang demokratis antara buruh dan majikan disetiap lapangan kerja. Supaya dilarang setiap bentuk pemecatan sewenang-wenang dan massal yang sering dilakukan terhadap buruh/pegawai wanita, dan segera dibentuknya Dewan Peradilan Pegawai/buruh disemua lapangan kerja.

10. Mengintensifkan dan memperluas koperasi-koperasi buruh disetiap lapangan kerja yang bisa meringankan beban kaum buruh wanita dan para isteri buruh.

11. Perlunya segera dihapuskan peraturan-peraturan yang bersumber pada IGO/IGOB untuk mengakhiri diskriminasi mengenai hak-hak wanita dalam jabatan Kepala Desa/Pamong Desa, dan lain-lain. Supaya segera dihapuskannya berbagai macam kerja tanpa dibayar yang pada hakekatnya sama dengan rodi dan pologoro yang sangat memberatkan kaum tani.

12. Mendesak supaya Pemerintah segera mewujudkan otonomi tingkat III yang menjamin

ikut-sertanya wanita tani dalam lembaga-lembaga pemerintah otonomi tingkat III dan supaya diadakan pemilihan-pemilihan secara periodik.

13. Mengharap para pejabat sungguh-sungguh merealisasi hak milik atas tanah bagi wanita tani atas namanya sendiri seperti yang tercantum dalam pasal 9 UU Agraria No. 5/1960.

14. Pemerintah supaya segera melaksanakan Undang-undang Perjanjian Bagi Hasil dengan cara yang tepat dan merata di semua tingkat daerah dan komposisi Panitia Pertimbangan Kecamatan supaya terdiri dari wakil-wakil tani penggarap, baik wanita maupun laki-laki.

15. Mendesak kepada Pemerintah supaya segera melaksanakan land-reform secara konsekwen sesuai dengan ketetapan MPRS dan mengikutsertakan wakil-wakil kerja wanita dalam panitia-panitia Pelaksanaan land-reform dan dalam Badan-badan Musyawarah kerja tani di semua tingkat.

16. Pemerintah supaya mewajibkan lintah darat mendaftarkan diri dan mengharuskan menurunkan bunga uang pinjaman dan hutang-hutang kepada lintah darat, yang tidak mendaftarkan harus dianggap tidak sah.

17. Supaya kepada kaum tani, kaum nelayan, tukang-tukang pekerja tangan, pedagang kecil diberi bantuan kredit yang murah, mudah, dan panjang oleh Pemerintah. Serta diperbanyak jumlah pasar-pasar dan alat perhubungan yang mudah dan murah, terutama diluar Jawa, untuk memudahkan pengangkutan, penjualan dan perbelanjaan kebutuhan sehari-hari. Mengusahakan berdirinya koperasi-koperasi Tani dan Nelayan sampai ke desa-desa.

18. Pajak-pajak negara yang sangat memberatkan beban rumah tangga supaya diringankan, tunggakan pajak bumi, setoran paksa, sistim pologoro, rodi, supaya dihapuskan dan nasib Pamong Desa supaya diperbaiki.

19. Supaya segera diadakan Undang-undang 1192 Kesejahteraan kaum nelayan beserta keluarganya, dan Undang-undang Bagi Hasil Nelayan.

20. Segera dilaksanakannya Program Sandang-Pangan dengan diadakan pengendalian harga barang-barang pokok kebutuhan hidup sehari-hari terutama bahan makanan dan pakaian, dengan diadakannya Dewan-dewan Pertimbangan Distribusi mengikutsertakan wakil-wakil organisasi, terutama Buruh, Tani dan Wanita. Supaya Pemerintah mengambil tindakan tegas dan keras terhadap orang-orang yang melakukan penimbunan dan spekulasi-spekulasi, dan dengan sungguh-sungguh berusaha untuk mencukupi persediaan bahan pokok serta melaksanakan distribusi secara mudah, murah, dan merata, dengan jalan melewati koperasi-koperasi, RK-RK, RT-RT.

21. Anggaran belanja untuk kesehatan dan kesejahteraan ibu dan anak supaya diperbesar. Balai-balai pengobatan, klinik-klinik persalinan, biro-biro konsultasi dan BKIA-BKIA (Balai Kesejahteraan Ibu dan Anak) serta jumlah bidan-bidan supaya diperbanyak sampai ke kecamatan-kecamatan. Pendidikan bagi dukun-dukun baji serta pendidikan kesehatan Rakjat supaya diperluas dan diadakan peraturan tarif dokter/Bidan, yang ringan dan harga obat-obatan yang murah, sesuai dengan Keputusan MPRS.

22. Mendesak agar supaya segala bentuk dan perwujudan kebudayaan dan Kesenian menjadi milik seluruh Rakjat dan menjinarkan sifat-sifat nasional.

Hak-hak Anak:

23. Anggaran belanja PD&K. supaya ditambah. Gedung-gedung sekolah yang memenuhi syarat kesehatan, sekolah-sekolah kejuruan supaya diperbanyak, dan usaha pemberantasan Buta Huruf serta meningkatkan taraf kebudayaan nasional diperluas sesuai dengan keputusan MPRS.

24. Bagi para pemuda dan anak-anak supaya ada jaminan untuk mendapatkan pendidikan yang sesuai dengan bakatnya.

25. Segera diadakan Undang-undang Wajib Belajar dengan mempersiapkan syarat-syarat pelaksanaannya dan supaya dijamin keseragaman buku-buku pelajaran dengan harga yang murah, mulai dari S.R. sampai Universitas.

26. Taman Kanak-kanak supaya diperluas dan diberi bantuan oleh Pemerintah.

27. Jumlah taman-taman bermain bagi anak-anak diadakan serta diperbanyak.

28. Perederan film, penerbitan cabul yang mempropagandakan kejahatan dan perang, supaya dilarang dan dijamin perluasan film/penerbitan yang bersifat mendidik, dan sesuai dengan perkembangan jiwa anak-anak.

Keamanan/Hak-hak Demokrasi:

29. Dilaksanakannya Ketetapan MPRS mengenai pemulihan keamanan dalam waktu sesingkat-singkatnya dengan dimulai penurunan/penghapusan tingkat keadaan bahaya bagi daerah-daerah yang sudah aman.

30. Hak-hak dan kebebasan demokrasi bagi Rakyat diseluruh daerah-daerah untuk menjamin ikut-sertanya Rakyat dalam melaksanakan pembangunan Nasional Semesta Berencana.

Kemerdekaan Nasional yang Penuh:

31. Ikutserta aktif dalam perjuangan Pembebasan Irian Barat serta pengembalian kedalam kekuasaan Republik Indonesia.

Perdamaian:

32. Dilaksanakannya Kerangka Ketiga Manipol mengenai Persahabatan dan Solidaritet Internasional atas saling menghormati dan kerjasama untuk melawan persiapan-persiapan perang dan membentuk satu Dunia Baru yang bersih dari imperialisme, kolonialisme, neokolonialisme untuk mewujudkan perdamaian dunia yang abadi.

33. Tenaga atom supaya digunakan untuk maksud-maksud damai/pemakaian senjata nuklir yang membahayakan keselamatan umat manusia supaya dilarang.

Sumber: Sumber: Media Kerja Budaya (www.mkb.kerjabudaya.org)

Lampiran B

SALINAN

822

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

INSTRUKSI PRESIDEN/PANGLIMA TERTINGGI ANGKATAN
BERSENDJATA REPUBLIK INDONESIA/ PANGLIMA BESAR
KOMANDO GANJANG MALAYSIA
NO. INST- 09/KOGAM/5/66

KAMI, PRESIDEN/PANGLIMA TERTINGGI ANGKATAN BERSENDJATA
REPUBLIK INDONESIA/PANGLIMA BESAR
KOMANDO GANJANG MALAYSIA

- Menimbang : 1. Bahwa untuk kepentingan kelantjaran dan ketertiban dalam pelaksanaan penertiban/pembersihan personil, sebagaimana dimaksud dalam Instruksi Presiden/Panglima Tertinggi Angkatan Bersendjata Republik Indonesia/Pemimpin Besar Revolusi/Mandataris MPRS No.3/3/1966, sehubungan dengan pembubaran dan peninjasaan PKI dan ormas-ormas yang sesazas/bernaung/berlindung dibawahnya, sebagai partai dan ormas-ormas terlarang, perlu segera menjempurnakan pedoman-pedoman yang termuat dalam Instruksi Presiden/Panglima Tertinggi Angkatan Bersendjata Republik Indonesia/Komando Operasi Tertinggi No.22/KOTI/1965 ;
2. Bahwa pedoman tersebut harus menjamin terlaksananya penertiban/pembersihan personil setjara integral, atas dasar ketentuan yang sama, dengan sedjauh mungkin memadukan faktor faktor kepentingan keamanan dengan kepastian hukum bagi yang bersangkutan ;
- Mengingat : 1. Keputusan Presiden Republik Indonesia No.40 tahun 1966 ;
2. Instruksi Presiden/Panglima Tertinggi Angkatan Bersendjata Republik Indonesia/Pemimpin Besar Revolusi/Mandataris MPRS No. 3/3/1966 ;
3. Keputusan Presiden/Panglima Tertinggi Angkatan Bersendjata Republik Indonesia/Pemimpin Besar Revolusi/Mandataris MPRS No. 1/3/1966 ;
4. Undang-undang No.18 tahun 1961 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kepegawaian ;
- Mengingat pula : Sebagai penjempurnaan Instruksi Presiden/Panglima Tertinggi Angkatan Bersendjata Republik Indonesia/Komando Operasi Tertinggi No.22/KOTI/1965 ;
- MENGINSTRUKSIKAN :
- K e p a d a : Semua Kementerian-kementerian/Departemen-departemen, Lembaga-lembaga Negara dan Badan-badan Pemerintah ditingkat pusat dan di daerah-daerah ;
- U n t u k : Dalam melaksanakan Instruksi Presiden/Panglima Tertinggi Angkatan Bersendjata Republik Indonesia/Pemimpin Besar Revolusi/Mandataris MPRS No.3/3/1966, berpedoman kepada ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

B A B - I

P U M U M

Pasal - 1

Ketentuan-ketentuan dalam Instruksi ini merupakan pedoman untuk melaksanakan penertiban/pembersihan personil sipil maupun anggota Angkatan Bersendjata Republik Indonesia pada Kementerian-kementerian / Departemen-departemen,

Lembaga-lembaga

Lembaga-lembaga Negara dan badan pemerintah, baik ditingkat pusat maupun di daerah-daerah, yang menjadi anggota bekas partai terlarang PKI dan organisasi massa yang seazas/bernaung/berlindung dibawahnya dan mereka yang terlibat dalam gerakan kontra revolusi "G-30-3", termasuk kegiatan-kegiatan yang mendahului atau sesudahnya.

Pasal - 2

Dasar kebijaksanaan dan prinsip-prinsip, yang diuraikan dalam Instruksi ini serta pelaksanaannya, sedjauh mungkin menggunakan ukuran yang sama dalam penindakan terhadap hal-hal yang sama sifatnya, dengan sedjauh mungkin memadukan kepentingan keamanan dengan kepastian hukum bagi yang bersangkutan, serta dengan tetap menjadikakan ruang gerak setjukannya bagi Menteri-Menteri dan pimpinan lembaga/badan yang bersangkutan, untuk dalam menerapkan dasar kebijaksanaan dan prinsip-prinsip itu mengadakan penyesuaian dengan keadaan khusus di lingkungan masing-masing.

B A B - II

KLASIFIKASI DAN PENGURAIAN

Pasal - 3

Personil sipil atau anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia yang dikenakan tindakan pembarahan/pemertihan dimaksud dalam pasal 1 Instruksi ini, diklasifikasikan dalam :

A. ~~KEJARA-KEJARA TERLIBAT SETJARA LANGSUNG DALAM "G-30-3"~~

ialah mereka yang :

1. merentjankan, turut merentjankan atau mengetahui adanya perentjanaan gerakan kontra revolusi itu, tetapi tidak melaporkannya kepada pejabat yang berwajib ;
2. dengan kesadaran akan tudjuannya, melakukan kegiatan-kegiatan dalam pelaksanaan gerakan kontra revolusi tersebut.

B. ~~KEJARA-KEJARA TERLIBAT SETJARA TIDAK LANGSUNG DALAM "G-30-3"~~

ialah mereka, yang setelah mengetahui adanya gerakan kontra revolusi itu :

1. menunjukkan sikap, baik dalam perbuatan atau dalam utjapan-utjapan, yang bersifat menjetuajui gerakan kontra revolusi tersebut ;
2. setjara sadar menunjukkan sikap, baik dalam perbuatan atau dalam utjapan, yang menentang usaha/gerakan pemusnahan "G-30-3".

C. ~~TERDAPAT PETERJAHIR ATAU PATUT DAPAT DIDUNA TERLIBAT SETJARA LANGSUNG ATAU TIDAK LANGSUNG DALAM "G-30-3"~~

ialah mereka yang :

1. menjadi anggota bekas partai terlarang PKI atau pengurus-pengurus organisasi massa yang seazas/bernaung/berlindung dibawah bekas partai tersebut, beserta aktivitas-aktivitasnya ;
2. menjadi anggota biasa dari bekas organisasi massa terlarang yang seazas/bernaung/berlindung dibawah bekas partai PKI dan mereka, yang menurut antecedan yang ada pernah terlibat dalam " Peristiwa Madiun ", yang setelah teragadjinya gerakan kontra revolusi itu tidak setjara teras menentangnja menurut kondisi dan kemampuan yang wajar.

Pasal - 4

Pasal 4.

- (1). Penindakan terhadap personal sipil atau Anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia yang terlibat seperti disebut dalam pasal 3 Instruksi ini, dibagi dalam:
 1. penindakan (repressif) yang meliputi:
 - a. pemberhentian tidak dengan hormat;
 - b. pembatasan kesempatan dalam jabatan tertentu;
 - c. retooling, sesuai Instruksi Presiden Republik Indonesia No. 5 tahun 1962;
 2. pencegahan (preventif), yang meliputi:
 - a. indoktrinasi;
 - b. pendidikan mental;
- (2). Tindakan-tindakan penyelesaian administratif dalam rangka peraturan-peraturan kepegawaian, diatur berdasarkan peraturan-peraturan keputusan kepegawaian yang berlaku bagi masing-masing golongan pegawai negeri;
 - a. bagi anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, menurut petunjuk-petunjuk/keputusan Kementerian-Kementerian dibidang Pertahanan dan Keamanan;
 - b. bagi pegawai negeri, menurut petunjuk-petunjuk/keputusan-keputusan Kantor Urusan Pegawai;

Pasal 5.

Pangsterapan berbagai macam penindakan itu adalah sebagai berikut:

- (1). terhadap mereka, yang termasuk klasifikasi tersebut dalam pasal 3 huruf A, dikenakan penindakan dalam bidang hukum pidana dan penindakan administratif berupa pemberhentian tidak dengan hormat, sedangkan selama dalam proses mereka ditahan terus;
- (2). terhadap mereka, yang termasuk dalam klasifikasi tersebut dalam pasal 3 huruf B, dikenakan penindakan administratif berupa:
 - a. pemberhentian tidak dengan hormat, apabila mereka adalah Anggota bekas PKI atau anggota ormas-ormas yang sesus/berlindung/bernama di bawah partai tersebut, atau mereka yang menurut ketentuan yang ada, pernah terlibat dalam "Peristiwa Madiun";
 - b. pembatasan kesempatan dalam jabatan atau kedudukan tertentu atau retooling, dengan diberikan indoktrinasi, apabila mereka bukan anggota bekas PKI atau anggota ormas-ormas yang bernama/berlindung/sesus dengan partai tersebut, atau mereka, yang tidak pernah terlibat dalam "Peristiwa Madiun".
- (3). terhadap mereka, yang termasuk klasifikasi tersebut dalam pasal 3 huruf C.1, dikenakan penindakan berupa pemberhentian tidak dengan hormat.
- (4). terhadap mereka, yang termasuk klasifikasi tersebut dalam pasal 3 huruf C.2, dikenakan penindakan berupa pembatasan kesempatan dalam jabatan atau kedudukan tertentu atau retooling, dengan diberikan indoktrinasi.

Pasal 6.

Page 6 of 6

- (1). Ketjuani ta neder meroke jang termasuk klasifikasi jang harus dikemukakan pendididat terkebut sjet (1), (2), a dan (3) pasal 5 Instruksi ini, dengan keputusan Menteri jang beres-kebut, atau pendididat jang ditanggudja, dapat dilakukakan penjiangan pelakukakan ketentuan-ketentuan terkebut, dala pasal 5 ini, apabila kepantingan dila, dibatan dan tugas-tugas laka terkebut madaididat, serta sapadidat kepantingan koodat dan ketertiban tana tidak terlangga karena ija.
- (2). Sebelun madaididat tiddidat penjiangan seperti jang dila-kan dala sjet (1) pasal ini, Menteri jang beres-kebut, atau pendididat jang ditanggudja, madaidat pendididat terkebut dala, ditingkat paset kepada komando Gajah Balaia, dilaadidat kepada Pundat-Pundat/Pundat/Pundat jang bar sa sjet (1) a madaidat pelakukakan.

古風集卷五

ALABAMA POWER CO.

DocId: 34282822

- [illegible]

Page 30

Apabila keadaan semakin memburuk, dan daerah daerah itu pada akhirnya
dijadikan vertikal dan tinggal tinggal usaha dari para Kementerian
Luar, dapat diberikan lebih banyak seperti yang diungkap dalam
pauli 7 terakhir ini.

Printed on demand by www.copyright.com

Teknik pelaksanaan tugasnya, tugas-tugas khusus seperti yang
dimaksud pasal 7 dan 8 Instruksi ini, berakhir akan erat
dengan dan dilaksanakan, ditinjau pasal oleh Ketua
Dewan dan MOHAR, dengan demikian akan terwujud
yang diharapkan.

SAE - IV

Page 10

Angela merueta juga telah dibuktikan dalam rangka penelitian/ membership per kaporal di dalam kelompok-kelompok tersebut. Berupa-
Bjate Republik Indonesia dari Kementerian Kesehatan dan Lembaga-
kegiatan/kegiatan lainnya dibuktikan dengan penelitian
antara lain/nya penelitian ini, demikian juga
tersebut ini.

Page 33.

Salah satu masalah pelaksanaan pemberian/pemberitahuan yang dihadapi dalam instruksi ini, yang belum diatur, diatur oleh Menteri/Kepala Lembaga/Bagian yang bersangkutan, atau dasar dan tidak bertentangan dengan maksud dan tujuan serta ketentuan-ketentuan dalam Instruksi ini.

Panel - 12 *****

Sel-sel lain mengenai penertiban/pemecatan personel yang
belum diatur dalam Instruksi ini, diatur tersendiri.
Instruksi ini mulai berlaku pada hari dikeluarkannya.

Dikeluarkan di : Djakarta
pada tanggal : 13 Mei 1966.

/ AN.PRESIDEN/PANGKALAN PERTIMPULAN ARMI TAN PERSINDJATA
REPUBLIK INDONESIA/PANGKALAN BESAR
KOMANDO GUNJANG MALAYSIA
KEPADA STAF,

ttd.

S G E H A R T O
LETNAN JENDERAL TNI

Diasalin sesuai dengan aslinya
oleh

KAPALA SUB BIRG TATA USAHA
GABUNGAN 5 KOGAM

ttd.

S U W A R D J O
KAPTEN INF NRP.128390.

Lampiran C

JUMLAH KURSI DPRD PERALIHAN KOTA SEMARANG

No.	Nama Partai	Jumlah suara untuk anggota DPRD kota Semarang	Jumlah pemilih kota Semarang	Persentase jumlah suara	Jumlah kursi yang diperoleh dalam DPRD kota Semarang
1	PKI	97.152	179.939	64,25%	14
2	PNI	27.485	179.939	11,40%	3
3	NU	18.913	179.939	10,54%	3
4	Baperki	11.399	179.939	6,35%	2
5	Masyumi	6.407	179.939	3,57%	1
6	Partai Katholik	3.638	179.939	2,02%	1
7	Persatuan Pegawai Polisi RI	3.363	179.939	1,87%	1
Jumlah kursi keseluruhan dalam DPRD peralihan kota Semarang					25

Sumber: Jawatan Penerangan Kota Semarang Tahun 1956